

Akuntabilitas

Jurnal Ilmu Akuntansi

P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1990

Vol. 13 (1), 2020

Dampak Keterlibatan Dan *Monitoring* Terhadap Kecenderungan Untuk Melakukan Eskalasi Komitmen

Hariman Bone

Karakteristik dan Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Solihyah Wulandari

Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan Dan Manajemen Laba Terhadap *Return Saham* Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi

Muhamad Nazhif Hawari, Zuwesty Eka Putri

Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan (Studi pada BMT Amanah Banjarmasin)

Syafril

Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri: Sebelum Dan Sesudah Penerapan *Good Corporate Governance*

Sabirin

Pengaruh Faktor Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Kompetensi, Dan Arogansi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Dian Fathma Alfina, Amrizal

Penyusunan Model Pengamanan Aset Tidak Bergerak di Kabupaten Sumenep

Toton Merianto, Siti Musyarofah, Bambang Haryadi

Pengaruh *Debt Covenant*, Profitabilitas, *Exchange Rate*, Mekanisme Bonus pada *Transfer Pricing*

Hepi Prayudiawan, Jodie Dwi Pamungkas

Determinan Kinerja Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah

Syukriy Abdullah, Afrah Junita

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Sistem Informasi Keuangan

Lesi Hertati, Irlan Fery, Otniel Safkaur

Akuntabilitas (Jurnal Akuntansi) adalah berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta berkejasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI-KAPd Wilayah Jakarta Banten). Berkala ilmiah ini menghususkan diri dalam pengkajian ilmu Akuntansi dan berupaya menyajikan perbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Berkala ilmiah menyambut baik kontribusi dari para akademi dan praktisi dan profesional dalam disiplin ilmu akuntansi untuk dipublikasikan dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bestari dan proses penyuntingan yang ketat.



Diterbitkan oleh:

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Bekerjasama dengan:

Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik Wilayah Jakarta

Akuntabilitas

Jurnal Ilmu Akuntansi

Diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurnal berkala Ilmiah ini fokus dalam kajian ilmu akuntansi, terbit dua kali dalam satu tahun. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi telah terakreditasi Peringkat 4 oleh Kemenristek Dikti berdasarkan SK No. 14/E/KPT/2019 (berlaku sampai Volume 15 (1), Tahun 2023).

Pemimpin Redaksi

Fitri Yani Jalil

Redaktur Pelaksana

Ade Suherlan

Ismawati Haribowo

Nur Wachidah Yulianti

Yulianti

Redaksi Ahli

Amilin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Dian Agustia (Universitas Airlangga)

Iwan Triyuwono (Universitas Brawijaya)

Rini (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Yuliansyah (Universitas Lampung)

Yusar Sagara (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Asisten Editor

M. Adam Camubar

Rahmat Yani

Alamat Redaksi

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ibnu Sina IV, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten 15412

Telp. (021) 7493318, Fax. (021) 7496006

Email: akuntabilitas@uinjkt.ac.id

Website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas>

Daftar Isi

Dampak Keterlibatan Dan <i>Monitoring</i> Terhadap Kecenderungan Untuk Melakukan Eskalasi Komitmen	1
Hariman Bone	
Karakteristik dan Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.....	11
Soliyah Wulandari	
Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan Dan Manajemen Laba Terhadap <i>Return</i> Saham Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi	23
Muhamad Nazhif Hawari, Zuwesty Eka Putri	
Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan (Studi pada BMT Amanah Banjarmasin)	35
Syafril	
Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri: Sebelum Dan Sesudah Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>.....	51
Sabirin	
Pengaruh Faktor Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Kompetensi, Dan Arogansi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	63
Dian Fathma Alfina, Amrizal	
Penyusunan Model Pengamanan Aset Tidak Bergerak di Kabupaten Sumenep	77
Toton Merianto, Siti Musyarofah, Bambang Haryadi	
Pengaruh <i>Debt Covenant</i>, Profitabilitas, <i>Exchange Rate</i>, Mekanisme Bonus pada <i>Transfer Pricing</i>.....	97
Hepi Prayudiawan, Jodie Dwi Pamungkas	
Determinan Kinerja Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah.....	109
Syukriy Abdullah, Afrah Junita	
Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Sistem Informasi Keuangan	125
Lesi Hertati, Irlan Fery, Otniel Safkaur	

Dampak Keterlibatan Dan *Monitoring* Terhadap Kecenderungan Untuk Melakukan Eskalasi Komitmen

Hariman Bone

Universitas Mulawarman
hariman.unmul@gmail.com

Abstract

Balance scorecard (BSC) provides objective, measures, targets and initiatives within each perspective to support the achievement of the company's vision and strategy. Management involvement in strategic initiatives setting in each perspective allows management to keep running the initiative even though the initiative hinders the achievement of goals. This study examined experimentally the effect of management involvement in strategic initiative setting and monitoring on escalation of commitment. We used 2 X 2 between subjects. The Anova result showed that management involvement could encourage participant in escalation of commitment for failed initiatives.

Keywords: Balanced Scorecard, escalation of commitment, management involvement, monitoring

Abstrak

Balance scorecard (BSC) memberikan sasaran, ukuran, target dan inisiatif dalam tiap perspektif untuk mendukung tercapainya visi dan strategi perusahaan. Keterlibatan manajemen dalam menyusun inisiatif strategi pada tiap perspektif memungkinkan manajemen untuk tetap menjalankan inisiatif tersebut walaupun inisiatif tersebut menghalangi pencapaian tujuan dan merugikan perusahaan. Penelitian ini ingin menguji apakah keterlibatan manajemen dalam menentukan inisiatif strategi akan mendorong manajer untuk melakukan eskalasi komitmen (mempertahankan inisiatif tersebut walaupun dalam keadaan merugi) dan apakah monitoring mampu mengurangi tingkat eskalasi komitmen. Penelitian ini menggunakan eksperimen dengan desain 2 X 2 *between subjects*. Hasil uji Anova menunjukkan bahwa keterlibatan mendorong seseorang untuk tetap mempertahankan inisiatif yang dipilihnya (eskalasi komitmen).

Kata Kunci: *Balance scorecard*, eskalasi komitmen, keterlibatan dan monitoring

PENDAHULUAN

BSC merupakan alat yang digunakan untuk menerjemahkan visi dan strategi perusahaan. BSC diawali dengan perumusan sasaran, ukuran, target dan inisiatif pada tiap-tiap perspektif sehingga dapat mencapai visi dan strategi perusahaan (R. S. Kaplan, Davenport, Robert, Kaplan, & Norton, 2001; Lueg, 2015).

Namun demikian penerapan BSC dalam dunia bisnis bukan tanpa cela. Beberapa penelitian menunjukkan adanya keterbatasan kognitif dalam Evaluasi kinerja yang menggunakan BSC (Cardinaels & van Veen-Dirks, 2010; Hibbets, Roberts, & Albright, 2007; S. E. Kaplan, Petersen, & Samuels, 2018; Libby, Salterio, & Webb, 2004; Lipe & Salterio, 2000). Secara spesifik, artikel seminal Lipe dan Salterio (2000) telah menguji bias evaluasi kinerja dalam BSC. Mereka menemukan bahwa partisipan cenderung untuk lebih mempertimbangkan pengukuran yang sama dibandingkan pengukuran yang unik. S. E. Kaplan et al. (2018) menguji *negativity bias* dalam evaluasi kinerja BSC, mereka menemukan bahwa evaluator menilai kinerja lebih rendah bagi manajer yang memiliki ukuran di bawah target meskipun ukuran tersebut tidak penting dalam kinerja keseluruhan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mendiskusikan kecenderungan bias evaluasi kinerja dengan BSC, namun masih kurang penelitian yang menguji pengaruh psikologis seseorang yang berdampak negatif terhadap penerapan BSC. Dalam penerapan BSC, organisasi menetapkan *objective, measures, target* dan inisiatif (R. S. Kaplan et al., 2001). Pada kondisi perubahan lingkungan yang sangat cepat, inisiatif yang kita tentukan sebelumnya kemungkinan tidak tepat lagi pada lingkungan yang baru sehingga untuk dapat mencapai strategi maka kita harus melakukan perubahan inisiatif. Akan tetapi, dalam literatur psikologi perubahan inisiatif tidak mudah untuk dilakukan. Seseorang cenderung untuk mempertahankan inisiatif yang telah diusulkan walaupun inisiatif tersebut tidak lagi menguntungkan.

Teori pembenaran-diri (*self justification theory*) menyatakan bahwa agen lebih cenderung untuk melanjutkan komitmen yang tidak menguntungkan karena ingin mempertahankan komitmen sebelumnya (Sharp, Chen, & Salter, 2013; Staw, 1981; Staw & Fox, 1977). Penelitian ini ingin menguji teori tersebut dalam konteks pemilihan inisiatif dalam BSC. Secara spesifik, penelitian ini menguji kecenderungan manajer yang terlibat dalam pemilihan inisiatif untuk tetap mempertahankan inisiatif tersebut walaupun inisiatif tersebut tidak lagi sesuai dengan strategi (kecenderungan untuk melakukan eskalasi komitmen). Lebih lanjut, penelitian ini menguji peran monitoring dalam mempengaruhi eskalasi komitmen tersebut berbasis penelitian Chong and Suryawati (2010).

Penelitian ini merupakan integrasi dari penelitian Kramer and Maas (2019) dan Tayler (2010). Kramer and Maas (2019) menguji eskalasi bias dalam pengukuran kinerja, namun tidak menguji eskalasi komitmen dalam inisiatif strategi. Tayler (2010) menguji keberhasilan inisiatif strategi antara manajer yang terlibat dalam inisiatif strategi dan yang tidak terlibat, namun tidak membuktikan adanya eskalasi komitmen dalam pemilihan inisiatif strategi. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada eskalasi komitmen dalam penentuan inisiatif strategi.

Penelitian ini menindaklanjuti penelitian yang dilakukan oleh Tayler (2010). Ia menyatakan dalam pembahasan penelitiannya:

“The findings of this study relate to prior work on the “escalation of commitment,” the tendency for individuals to increase commitment to a failing course of action. While motivated reasoning processes can result in an escalation of commitment, escalation of commitment does not necessarily imply that motivated reasoning has taken place, as escalation of commitment does not speak to the data-evaluation process. An escalation-of commitment outcome could result from a conscious desire to save face, investing more in the hopes of recovering losses, in addition to being driven by motivated reasoning. Though the primary results of the current study are consistent with an escalation of commitment to an unsuccessful strategic initiative, process data and mediation results suggest that motivated reasoning is a driving force behind this escalation. Future research could further disentangle motivated reasoning from more conscious processes that lead to an escalation of commitment”.

Tayler (2010) belum mampu menunjukkan *adanya eskalasi komitmen* dalam penelitiannya karena kecenderungan untuk meneruskan inisiatif yang kurang sukses itu diakibatkan oleh proses evaluasi data sehingga bukan merupakan suatu kesengajaan untuk menilai inisiatif tersebut sukses. Eskalasi komitmen muncul karena adanya persepsi kebanggaan dalam diri dan keinginan untuk menyelamatkan pribadi dari kegagalan (Cheng, Schulz, Luckett, & Booth, 2003) bukan hasil dari evaluasi data. Oleh karena itu, studi ini memodifikasi penelitian Tayler (2010) dengan menambahkan suatu kondisi sehingga manajer merasa bahwa kesuksesannya merupakan suatu keharusan dan dampaknya memunculkan keinginan untuk melakukan eskalasi komitmen. Modifikasi dilakukan dengan menambahkan kondisi pemicu eskalasi komitmen yang terdapat dalam penelitian Cheng et al. (2003) ke dalam instrumen penelitian Tayler (2010).

Penelitian ini menggunakan eksperimen dengan jumlah partisipan sebanyak 45 orang. Partisipan penelitian ini diminta untuk mempertimbangkan apakah mereka melanjutkan atau menghentikan suatu inisiatif strategi yang telah ditentukan dengan skala 1 (melanjutkan) sampai 10 (menghentikan). Hasil uji Anova menunjukkan bahwa manajer yang terlibat dalam penentuan inisiatif strategi cenderung memilih untuk mempertahankan strateginya dibandingkan manajer yang tidak terlibat dalam penentuan strategi.

Penelitian ini memberikan kontribusi pengembangan teori dan praktik. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kecenderungan eskalasi komitmen ditentukan oleh teori pembenaran-diri. Dalam konsep BSC, penelitian ini memberikan bukti tambahan peran psikologis dalam penerapan BSC. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan BSC diliputi oleh kelemahan sumber daya manusia dalam menerapkan BSC.

METODE

Penelitian ini menggunakan dan memodifikasi eksperimen yang dikembangkan oleh Tayler (2010). Modifikasi dilakukan karena penelitian ini ingin menguji adanya kecenderungan manajer untuk melakukan eskalasi komitmen yang belum bisa disimpulkan dari penelitian sebelumnya. Modifikasi dilakukan dengan menambahkan beberapa kondisi yang ada pada penelitian Cheng et al. (2003) yaitu komitmen keputusan awal dan *dissonance cognition*. Kedua kondisi tersebut merupakan hal yang penting yang harus ada untuk menciptakan kondisi eskalasi komitmen.

Partisipan

Penelitian ini menggunakan mahasiswa S1 yang telah menempuh mata kuliah sistem pengendalian manajemen sebagai partisipan. Alasan pemilihan subjek ini adalah; 1) Mahasiswa pada tahap tersebut telah banyak belajar tentang BSC dan manajemen strategi 2) penelitian terdahulu dalam literatur akuntansi dan manajemen menyatakan bahwa dalam penelitian pengambilan keputusan dan pertimbangan, mahasiswa dapat dibenarkan sebagai pengganti manajer (Clinton 1999). Jumlah partisipan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 45 orang.

Tugas Partisipan

Partisipan diasumsikan sebagai manajer menengah pada Paladin Pizza (perusahaan fiktif yang didesain untuk eksperimen dan selanjutnya hanya disebut sebagai perusahaan). tugas partisipan di sini diminta untuk mengevaluasi sebuah inisiatif strategi baru apakah akan diterapkan secara keseluruhan pada perusahaan tersebut atau tidak. Latar belakang perusahaan tersebut kemudian diberikan kepada semua partisipan dan informasi tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan sedang mempertimbangkan dua inisiatif strategi untuk diimplementasikan yaitu: "Strategi Kualitas Bahan" dan "Strategi Beli 4 Gratis 1". Masing-masing inisiatif strategis tersebut mengindikasikan pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan kualitas dan kuantitas. Selanjutnya dinyatakan bahwa kedua inisiatif strategis tersebut tidak menimbulkan biaya tetap, biaya variabel kedua inisiatif strategis tersebut relatif sama dan perusahaan tidak menaikkan harga produk terkait dengan penerapan inisiatif strategis tersebut.

Penulis memanipulasi keterlibatan dalam dua level yaitu tanpa keterlibatan dan dengan keterlibatan. Dalam kondisi tanpa keterlibatan partisipan dikondisikan bahwa mereka tidak terlibat dalam pemilihan inisiatif dan inisiatifnya ditentukan oleh manajer yang lebih tinggi. Sedangkan dalam kondisi dengan keterlibatan manajer diberikan keleluasaan untuk memilih dan kemudian mengimplementasikan inisiatif tersebut.

Manipulasi kedua pada kondisi dengan *monitoring* para partisipan diinformasikan bahwa keberhasilan inisiatif mereka akan dievaluasi oleh suatu departemen yang khusus untuk melakukan review atas inisiatif-inisiatif dalam BSC. Sedangkan tanpa *monitoring* mereka tidak diberikan informasi sebelumnya.

Pada akhir skenario partisipan akan diminta untuk mengindikasikan apakah akan melanjutkan atau menghentikan inisiatif sekarang. Respons mereka diukur dengan skala 10 sebagaimana digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya (Rutledge dan Karim 1999 dan Ho dan Vera-Mufloz 1998). Angka respons 1-5 mengindikasikan bahwa proyek tersebut akan dilanjutkan (mempertahankan inisiatif yang telah dipilih). Sedangkan angka 6-10 mengindikasikan bahwa inisiatif tersebut akan dihentikan (menggantikan inisiatif lainnya)

Desain dan Prosedur

Penelitian ini menggunakan eksperimen dengan desain 2 X 2 *between subject*. Faktor independen pertama adalah keterlibatan manajer (tanpa keterlibatan dan dengan keterlibatan), sedangkan faktor independen kedua adalah *monitoring* (tanpa *monitoring*

dan dengan *monitoring*. Tabel 1 memberikan gambaran tentang desain eksperimen dalam penelitian ini.

Tabel 1. Matriks Desain Eksperimen

	Tanpa <i>Monitoring</i>	<i>Monitoring</i>
Tanpa keterlibatan	I	II
Dengan keterlibatan	III	IV

Sebelum mengerjakan kasus eksperimen, partisipan diminta untuk mengisi format kesukarelaan dan kesediaan untuk mengikuti eksperimen (*informed-consent form*). Setelah itu partisipan setuju, mereka diberikan amplop yang berisi tentang instruksi dan materi kasus eksperimen. Partisipan akan membaca informasi terkait perusahaan dan inisiatif BSC dan hasil inisiatif tersebut dalam bentuk kinerja empat perspektif.

Amplop yang diberikan pada masing-masing partisipan secara otomatis membagi partisipan secara acak ke dalam beberapa kelompok sesuai desain eksperimen yang ditentukan sebelumnya. Kelompok I menerima amplop informasi perusahaan dan materi kasus yang menyebutkan bahwa inisiatif strategi telah ditentukan terlebih dahulu oleh manajer level atas. Kelompok dua menerima amplop yang sama isinya dengan kelompok I namun mereka diberikan kondisi bahwa mereka akan dievaluasi oleh departemen reviu yang ada dalam perusahaan.

Untuk kelompok III partisipan diberikan gambaran kasus yang dilengkapi dengan keterlibatan partisipan dalam menentukan inisiatif strategi, namun kelompok ini tidak diberikan *monitoring*. Kelompok IV diberikan kasus yang sama namun dengan *treatment* yang lengkap yaitu diberikan keterlibatan dan dimonitoring oleh departemen reviu.

Desain Eskalasi Komitmen

Sebagaimana penelitian sebelumnya (Harrison dan Harrell; 1995), penelitian ini memanipulasi komitmen awal terhadap strategi mereka dengan menginformasikan subjek pada kelompok III dan kelompok IV bahwa mereka diminta untuk memilih inisiatif dan salah satu ukuran promosi mereka adalah keberhasilan dari inisiatif tersebut. Lebih lanjut sesuai dengan "*norm of consistency*" manajer pada kelompok tersebut dikatakan bahwa mereka memiliki reputasi yang tinggi dan telah berhasil melaksanakan inisiatif-inisiatif yang mereka pilih secara sukses pada tahun-tahun yang sebelumnya, sehingga jika mereka gagal pada inisiatif saat ini reputasi mereka sebagai manajer sukses akan tercederai.

Sebagaimana karakteristik penelitian eskalasi komitmen perlu adanya *dissonance cognitive* sehingga penelitian ini juga memanipulasinya dengan memberikan penurunan kinerja pada tahun kedua terkait strategi tersebut dibandingkan dengan target yang ditentukan sebelumnya. Selain hal tersebut, eksperimen ini juga memasukkan probabilitas atas keberhasilan dari inisiatif saat ini dan inisiatif alternatif. Untuk inisiatif saat ini diberikan probabilitas kemungkinan 25% keberhasilannya setelah tahun kedua sedangkan alternatif lain keberhasilannya 75%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cek manipulasi

Uji manipulasi digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta atas kasus eksperimen yang telah dikerjakan. Untuk faktor pertama yaitu keterlibatan, partisipan diminta untuk menjawab pertanyaan; apakah anda dilibatkan dalam pemilihan strategi? Faktor kedua yaitu monitoring, partisipan diminta untuk menjawab apakah terdapat departemen yang memonitoring setiap inisiatif strategi? Dari 71 partisipan yang mengikuti eksperimen, 15 diantaranya memutuskan untuk tidak mengikuti eksperimen, 11 partisipan gagal dalam uji manipulasi sehingga hanya 45 partisipan yang digunakan dalam pengolahan data.

Pengujian Hipotesis

Variabel dependen yang diuji dalam penelitian ini adalah eskalasi komitmen yaitu kecenderungan manajer PT. Pizza untuk melanjutkan atau menghentikan inisiatif strategi yang telah ditentukan. Variabel independen terdiri atas keterlibatan (terlibat, tidak terlibat) dan monitoring (ada, tanpa monitoring). Dengan demikian ada 4 kelompok manipulasi sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya.

Jumlah partisipan, rata-rata nilai eskalasi komitmen untuk masing-masing kelompok beserta standar deviasinya dideskripsikan pada tabel 2. Tabel 3 menunjukkan hasil uji ANOVA *between subject effect*.

Tabel 2 Jumlah Partisipan dan Rata-Rata Eskalasi Komitmen Tiap Kelompok

		Monitoring		Total
		Tidak ada	Ada	
Keterlibatan	Tidak terlibat			
	Rata-rata	6,636	6,750	6,684
	Dev. Std	1,912	2,765	2,237
	n	11	8	19
	Terlibat			
	Rata-rata	4,133	4,364	4,231
	Dev. Std	1,807	1,748	1,751
	n	15	11	26
	Total			
Rata-rata	5,192	5,368		
Dev. Std	2,209	2,477		
n	26	19		

Tabel 3. Hasil Uji ANOVA

	DF	MS	F	p-value
Keterlibatan	1	64,008	15,778	0,000
Monitoring	1	0,317	0,078	0,781
Keterlibatan X Monitoring	1	0,036	0,009	0,925
Error	41	4,057		

Pengaruh variabel keterlibatan terhadap eskalasi komitmen signifikan pada level 0,05 dengan nilai $F=15,778$ dan nilai $p=0,000$ (tabel 3). Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan eskalasi komitmen antara manajer yang terlibat dalam penentuan inisiatif strategi dibandingkan dengan yang tidak terlibat. Nilai rata-rata eskalasi komitmen kelompok yang tidak terlibat adalah 6,684 dan kelompok yang terlibat sebesar 4,231. Hasil tersebut mendukung H1 bahwa manajer yang terlibat dalam penentuan inisiatif strategi lebih cenderung untuk melanjutkan inisiatif tersebut dibandingkan dengan manajer yang tidak terlibat dalam penentuan strategi.

Hipotesis pertama mengeksplorasi tentang keterlibatan dalam penentuan strategi terhadap kecenderungan untuk melakukan eskalasi komitmen. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan manajer dalam penentuan inisiatif strategi mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan eskalasi komitmen. Temuan ini sejalan dengan dengan teori prospek dan pembenaran-diri dimana individu dalam ketidakpastian risiko akan datang cenderung untuk memilih hal yang berisiko (Staw, 1976; Tversky & Kahneman, 1979). Kecenderungan ini juga pernah diteliti oleh Tayler (2010) yang menemukan ada kecenderungan subjek yang terlibat dalam pemilihan inisiatif strategi akan lebih merekomendasikan inisiatif strategi yang dipilihnya daripada yang tidak terlibat. Namun penelitian Tayler belum memasukkan konsep eskalasi komitmen.

Pengujian hipotesis 2 menggunakan interaksi antara variabel keterlibatan dan monitoring sebagaimana tersaji pada tabel 3. Hipotesis 2 menyatakan eskalasi komitmen pada manajer yang terlibat dalam pemilihan inisiatif akan berkurang ketika dalam kondisi monitoring dibandingkan tanpa monitoring. Hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi variabel keterlibatan dan monitoring terhadap eskalasi komitmen tidak signifikan dengan nilai $F=0,009$ dan nilai $p=0,925$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 tidak didukung. Perbedaan nilai rata-rata antara monitoring dan tanpa monitoring dalam kondisi dengan keterlibatan juga menunjukkan angka yang tidak signifikan (Tabel 4). Nilai rata-rata monitoring dengan keterlibatan sebesar 4,133 sedangkan nilai tanpa monitoring dengan keterlibatan sebesar 4,3636.

Tabel 4 Uji Beda Grup Ada Tanpa Monitoring dalam Kondisi Ada Keterlibatan

	Monitoring	Rata-rata	<i>p-value</i>
Ada keterlibatan	Ada	4,133	0,992
	Tanpa	4,364	

Hipotesis kedua menjelaskan tentang kemampuan monitoring untuk melakukan mengurangi eskalasi komitmen. Temuan penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan sehingga data yang digunakan tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Temuan ini tidak konsisten dengan Chong and Suryawati (2010) karena partisipan yang digunakan adalah mahasiswa. Mahasiswa belum mampu memahami pengawasan (monitoring) sebagaimana praktisi yang telah mengalami pengawasan secara melekat atas kinerja mereka.

SIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh keterlibatan manajer dan monitoring terhadap kecenderungan untuk melakukan eskalasi komitmen. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Tayler (2010) yang menjelaskan tentang pengaruh keterlibatan dalam dukungan inisiatif strategi. Tayler (2010) belum mampu menunjukkan bahwa dukungan terhadap inisiatif strategi merupakan eskalasi komitmen. Penelitian ini mendesain inisiatif dalam konteks BSC dengan memadukan instrumen Cheng et al. (2003), Chong and Suryawati (2010) dan Tayler (2010).

Implikasi penting dari penelitian ini. Bukti bahwa keterlibatan cenderung untuk menjadikan manajer untuk melakukan eskalasi komitmen akan merugikan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kecenderungan untuk melakukan eskalasi komitmen akan menjadikan seseorang untuk mempertahankan inisiatif strategi walaupun inisiatif strategi tersebut dalam jangka panjang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan.

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, penggunaan mahasiswa sebagai partisipan tidak merefleksikan secara penuh keadaan ril yang dihadapi oleh mereka terutama pada peresapan atas manipulasi kondisi monitoring. Kedua, Sebagaimana penelitian eksperimen lainnya, kemampuan generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati.

PUSTAKA ACUAN

- Anand, M., Sahay, B., & Saha, S. (2005). Balanced scorecard in Indian companies. *Vikalpa*, 30(2), 11-26.
- Banker, R. D., Chang, H., & Pizzini, M. J. (2004). The balanced scorecard: Judgmental effects of performance measures linked to strategy. *The Accounting Review*, 79(1), 1-23.
- Bazerman, M. H. (1984). The relevance of Kahneman and Tversky's concept of framing to organizational behavior. *Journal of Management*, 10(3), 333-343.
- Bloom, R. (2008). Scorecard Best Practices: Design, Implementation, and Evaluation. *The Journal of Government Financial Management*, 57(2), 54.
- Bowen, M. G. (1987). The escalation phenomenon reconsidered: Decision dilemmas or decision errors? *Academy of management review*, 12(1), 52-66.
- Cardinaels, E., & van Veen-Dirks, P. M. (2010). Financial versus non-financial information: The impact of information organization and presentation in a Balanced Scorecard. *Accounting, Organizations and Society*, 35(6), 565-578.
- Cheng, M. M., Schulz, A. K., Lockett, P. F., & Booth, P. (2003). The effects of hurdle rates on the level of escalation of commitment in capital budgeting. *Behavioral Research in Accounting*, 15(1), 63-85.
- Chong, V. K., & Suryawati, R. F. (2010). De-escalation strategy: The impact of monitoring control on managers' project evaluation decisions. *Journal of Applied Management Accounting Research*, 8(2), 39.
- Davis, M. A., & Bobko, P. (1986). Contextual effects on escalation processes in public sector decision making. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 37(1), 121-138.

- Devigne, D., Manigart, S., & Wright, M. (2016). Escalation of commitment in venture capital decision making: Differentiating between domestic and international investors. *Journal of Business Venturing*, 31(3), 253-271.
- Dilla, W. N., & Steinbart, P. J. (2005). Relative weighting of common and unique balanced scorecard measures by knowledgeable decision makers. *Behavioral Research in Accounting*, 17(1), 43-53.
- Festinger, L. (1962). *A theory of cognitive dissonance* (Vol. 2): Stanford university press.
- Hibbets, A. R., Roberts, M. L., & Albright, T. (2007). *Common-measures bias in the balanced scorecard: cognitive effort and general problem-solving ability*.
- Kaplan, R. S., Davenport, T. H., Robert, N. P. D. K. S., Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). *The strategy-focused organization: How balanced scorecard companies thrive in the new business environment*: Harvard Business Press.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). Using the balanced scorecard as a strategic management system.
- Kaplan, S. E., Petersen, M. J., & Samuels, J. A. (2018). Further Evidence on the Negativity Bias in Performance Evaluation: When Does the Evaluator's Perspective Matter? *Journal of Management Accounting Research*, 30(1), 169-184.
- Kiesler, C. A. (1971). The psychology of commitment.
- Kramer, S., & Maas, V. S. (2019). Selective Attention as a Determinant of Escalation Bias in Subjective Performance Evaluation Judgments. *Behavioral Research in Accounting*.
- Levi, A. S. (1982). *Escalating commitment and risk taking in dynamic decision behavior*. ProQuest Information & Learning.
- Libby, T., Salterio, S. E., & Webb, A. (2004). The balanced scorecard: The effects of assurance and process accountability on managerial judgment. *The Accounting Review*, 79(4), 1075-1094.
- Lipe, M. G., & Salterio, S. E. (2000). The balanced scorecard: Judgmental effects of common and unique performance measures. *The Accounting Review*, 75(3), 283-298.
- Lueg, R. (2015). Strategy maps: the essential link between the balanced scorecard and action. *Journal of Business Strategy*.
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Rubin, J. Z., & Brockner, J. (1975). Factors affecting entrapment in waiting situations: The Rosencrantz and Guildenstern Effect. *Journal of personality and social psychology*, 31(6), 1054.
- Sarangee, K. R., Schmidt, J. B., & Calantone, R. J. (2019). Anticipated regret and escalation of commitment to failing, new product development projects in business markets. *Industrial Marketing Management*, 76, 157-168.
- Sharp, D. A., Chen, Y., & Salter, S. (2013). Escalation of Commitment to a Course of Action: The Role of Agency, Framing and National Culture: An Eight Country Study.

- Speckbacher, G., Bischof, J., & Pfeiffer, T. (2003). A descriptive analysis on the implementation of balanced scorecards in German-speaking countries. *Management Accounting Research*, 14(4), 361-388.
- Staw, B. M. (1976). Knee-deep in the big muddy: A study of escalating commitment to a chosen course of action. *Organizational behavior and human performance*, 16(1), 27-44.
- Staw, B. M. (1981). The escalation of commitment to a course of action. *Academy of management review*, 6(4), 577-587.
- Staw, B. M., & Fox, F. V. (1977). Escalation: The determinants of commitment to a chosen course of action. *Human Relations*, 30(5), 431-450.
- Taylor, W. B. (2010). The balanced scorecard as a strategy-evaluation tool: The effects of implementation involvement and a causal-chain focus. *The Accounting Review*, 85(3), 1095-1117.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263-291.
- van Veen-Dirks, P. M., & Lillis, A. M. (2018). Do the Motives for Adoption of the Balanced Scorecard affect its Development and Use? *Performance Measurement and Management Control: The Relevance of Performance Measurement and Management Control Research*, 15.

Karakteristik dan Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Solihyah Wulandari

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
solihyah.wulandari@uinbanten.ac.id

Abstract

The aim of this research is to prove empirically the influence of firm characteristics. There are market price to book value ratio, firm age, market capitalization, debt equity ratio, earnings per share, liquidity, and growth of asset as firm characteristics. The research object are manufacture firm in Indonesian Stock Exchange during 2013-2017. The sample selection is using purposive sampling method. Based on criteria, samples which are used in this research are 37 firms. Secondary data are collected with documentation of financial statement from Indonesia Stock Exchange. Those data are processed using statistical test of multiple regressions. The result of this research proves that market price to book value ratio, debt equity ratio, earnings per share, and growth influence to dividend policy. In the other hand, firm age, market capitalization, and liquidity influence to dividend policy.

Keywords: Dividend policy, market price to book value ratio, firm age, market capitalization, debt-equity ratio

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kebijakan dividen. Karakteristik perusahaan yang dimaksud adalah *market price to book value ratio*, umur perusahaan, *market capitalization*, *debt equity ratio*, *earnings per share*, likuiditas, dan tingkat pertumbuhan aset. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan pada kriteria, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 37 perusahaan. Data sekunder yang dikumpulkan adalah laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia. Data tersebut diolah menggunakan uji statistik model regresi berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *market price to book value ratio*, *debt equity ratio*, *earnings per share*, dan pertumbuhan aset berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Sedangkan, umur perusahaan, *market capitalization*, dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

Kata Kunci: Kebijakan dividen, *market price to book value ratio*, umur perusahaan, *market capitalization*, *debt equity ratio*

PENDAHULUAN

Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan perusahaan untuk menentukan apakah laba yang diterima digunakan untuk pembagian dividen atau investasi dimasa mendatang. Hal ini akan berdampak terhadap reaksi dan sikap investor. Investor akan menilai negatif jika perusahaan tidak membagikan dividen atau memotong dividen. Perusahaan juga harus mempertimbangkan pertumbuhan perusahaan dengan memperhatikan investasi dimasa yang akan datang. Pembagian dividen juga memiliki pengaruh besar terhadap kreditur. Kreditur akan memberikan penilaian positif jika perusahaan membayar dividen kepada investor. Kreditur akan berpikir jika perusahaan memiliki kas yang cukup untuk pembayaran dividen sehingga perusahaan dapat membayar pokok dan bunga pinjaman.

Penting bagi investor maupun kreditor untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk memberikan keputusan pembayaran dividen kepada investor. Salah satu penentu kebijakan dividen yaitu karakteristik perusahaan (rasio keuangan dan umur perusahaan). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu Singhanian & Gupta (2012) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Namun terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian Singhanian dan Gupta.

Penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu likuiditas dan pertumbuhan aset (Kuzucu, 2015). Penelitian Singhanian & Gupta (2012) menggunakan perusahaan yang terdaftar di *Nifty Stock Exchange* (India), sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Singhanian & Gupta (2012) menggunakan periode tahun 2000 sampai dengan 2010 sedangkan pada penelitian ini periode penelitiannya adalah tahun 2014 sampai dengan 2016.

Singhanian dan Gupta menyatakan bahwa *Market Price to Book Value Ratio* adalah rasio antara harga pasar yang berlaku di pasar modal dan nilai buku perusahaan, untuk mengambil unit jumlah data perusahaan menurut *pecking* urutan perusahaan dengan pertumbuhan dan kegiatan investasi yang lebih baik memiliki kesempatan untuk mempertahankan lebih banyak dana untuk pendanaan internal dan sesuai membayar dividen lebih sedikit (Singhanian & Gupta, 2012).

Singhanian dan Gupta (2012) menyatakan bahwa keberadaan suatu perusahaan diukur dari tahun berdiri perusahaan tersebut, untuk mengambil unit jumlah data perusahaan menurut *pecking*, perusahaan yang matang akan memberikan jaminan yang menjanjikan kepada investor karena perusahaan tersebut telah berdiri cukup lama dari awal perusahaan tersebut didirikan sampai saat ini, sehingga investor dapat tertarik untuk menginvestasikan dananya kepada perusahaan yang telah berusia cukup lama (Singhanian & Gupta, 2012). Penelitian Singhanian & Gupta (2012), Ressay dan Chariri (2013), dan Takhtaei (2014) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh umur perusahaan terhadap kebijakan dividen.

Singhanian dan Gupta (2012) menyatakan bahwa total kapitalisasi pasar perusahaan sama dengan produk dari total saham harga yang luar biasa dan pasar unit saham

perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar dan proses yang lebih baik ke dalam pasar modal jarang mengandalkan informasi dari sumber internal dan dengan cara ini, akan cenderung untuk mendistribusikan dividen lebih, karena itu kapitalisasi pasar adalah penentu kebijakan dividen (Singhania & Gupta, 2012). Penelitian yang dilakukan Singhania & Gupta (2012), Devi & Erawati (2014) serta Damayanti & Martiningtyas (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara *market to book value* ratio terhadap kebijakan dividen.

Penelitian yang dilakukan Pasaribu, Kowanda, & Nawawi (2014) serta Singhania & Gupta (2012) berpendapat bahwa *debt equity ratio* terdapat pengaruh terhadap kebijakan dividen. Semakin rendah DER akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Hal ini disebabkan karena semakin besar proporsi hutang yang digunakan untuk struktur modal suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula jumlah kewajibannya. Bukti empiris mengenai pengaruh *earnings per share* terhadap kebijakan dividen ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Martiningtyas (2014), dan Zameer *et al.* (2013) kenaikan *earnings per share* pada suatu perusahaan akan meningkatkan pembayaran dividen. *Earnings per share* yang semakin tinggi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam membagikan dividen. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai *earnings per share* maka akan semakin tinggi pula kebijakan dividen perusahaan tersebut.

Tariq (2015) menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen dimana sejalan dengan penelitian Sunarya (2013). Namun dalam penelitian Darminto (2008) menyatakan likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen, dimana hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maladjian & Khoury (2014). Adanya pengaruh negatif likuiditas terhadap kebijakan dividen menandakan bahwa semakin besar tingkat likuiditas perusahaan, maka dividen yang dibagikan oleh perusahaan akan menurun. Namun hal berbeda diungkapkan dalam penelitian Darminto (2008) serta Maladjian & Khoury (2014) yang menyatakan bahwa besar atau kecilnya tingkat likuiditas perusahaan tidak akan mempengaruhi tingkat pembayaran dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

Thanatawee (2011) melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan aset berpengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan aset yang tinggi akan memerlukan lebih banyak pembiayaan sehingga cenderung mengurangi pembayaran dividen kepada pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh Marietta & Sampurno (2013) Return On Assets, size increased but it is not followed by increase Dividend Payout Ratio. This research aims to analyze the effect mechanism of liquidity, profitability, growth, firm size and financial leverage against the dividend payout ratio at manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange (IDX menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan aset tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Pernyataan tersebut juga setuju oleh Ritha & Koestiyanto (2013). Hal ini mengartikan bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan yang besar membuat perusahaan melakukan investasi dalam perusahaan lebih besar dibandingkan dengan membayar dividen kepada pemegang saham.

Perbedaan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dan signifikansi penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah ingin membuktikan secara empiris pengaruh *market price to book value ratio*, umur perusahaan, market capitalization, earnings per share, likuiditas, dan tingkat pertumbuhan aset terhadap kebijakan dividen. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Karakteristik dan Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

METODE

Periode penelitian ini yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Definisi operasional dan pengukuran untuk setiap variabel diuraikan sebagai berikut:

a. Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen merupakan keputusan perusahaan mengenai pembayaran dividen kepada para pemegang saham, apakah akan membayarkannya atau tidak, ketika memutuskan untuk membayarkannya berapa besarnya. Dalam penelitian ini, variabel kebijakan dividen menggunakan *Dividend Payout Ratio* (DPR) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$DPR = \frac{\text{Dividen Tunai}}{\text{Laba Bersih}}$$

b. Market Price to Book Value Ratio

Market price to book value ratio adalah harga pasar yang berlaku di pasar modal dan nilai buku perusahaan, untuk mengambil jumlah unit data perusahaan (Singhania & Gupta, 2012). Dalam penelitian ini, variabel *market price to book value ratio* (MPBV) dirumuskan sebagai berikut:

$$MPBV = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Nilai Buku Perusahaan}}$$

c. Umur Perusahaan

Umur perusahaan (AGE) adalah keberadaan suatu perusahaan diukur dari tahun berdirinya perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini, variabel umur perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$AGE = \text{Years that company has been into existence}$$

d. Market Capitalization

Market capitalization (MARCAP) adalah total kapitalisasi pasar perusahaan sama dengan produk dari total saham harga yang beredar dan harga pasar saham perusahaan (Singhania & Gupta, 2012). Dalam penelitian ini, variabel market capitalization dirumuskan sebagai berikut:

$$MARCAP = \frac{\text{Harga saham x jumlah saham beredar}}{10.000.000.000}$$

e. *Debt-Equity Ratio*

Debt-Equity Ratio (DER) adalah perbandingan antara total utang (termasuk jangka pendek dan utang jangka panjang) dan jumlah ekuitas (termasuk ekuitas dan cadangan dan surplus) perusahaan (Singhania & Gupta, 2012). Dalam penelitian ini, variabel *Debt-equity ratio* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

f. *Earnings per Share*

Earnings per share (EPS) adalah rasio total pendapatan dan jumlah saham yang beredar. Dikatakan semakin menguntungkan suatu perusahaan jika perusahaan tersebut mendapatkan laba yang melebihi target yang dicapai (Singhania & Gupta, 2012). Variabel *earnings per share* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Weighted Average Saham yang Beredar}}$$

g. Likuiditas

Pada penelitian ini likuiditas diukur menggunakan CR (*Current Ratio*). CR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur dan evaluasi kemampuan membayar utang jangka pendek perusahaan menggunakan aset lancar (Kieso, Weygandt, & warfield, 2017). CR diukur dengan rumus:

$$\text{CR} = \frac{\text{Aset lancar}}{\text{Utang lancar}}$$

h. Tingkat Pertumbuhan Aset

Tingkat pertumbuhan aset (GROWTH) dari perusahaan mengidentifikasi bahwa perusahaan cenderung menggunakan kas yang diperoleh dalam tahun berjalan untuk melakukan investasi kembali atau tidak. Menurut Alphonse & Tran (2014) ukuran perusahaan dapat dihitung dengan:

$$\text{GROWTH} = \frac{(\text{Total Aset}_t - \text{Total Aset}_{t-1})}{\text{Total Aset}_{t-1}}$$

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen yaitu rasio pembayaran dividen. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{DPR} = \alpha_0 + \beta_1(\text{MPBV}) + \beta_2(\text{AGE}) + \beta_3(\text{MARCAP}) + \beta_4(\text{DER}) + \beta_5(\text{EPS}) + \beta_6(\text{CR}) + \beta_7(\text{GROWTH}) + \varepsilon$$

Keterangan:

DPR : Kebijakan dividen

α_0 : Konstanta

$\beta_1 \dots \beta_7$: Koefisien regresi

MPBV : *Market price to book value ratio*
 AGE : Umur perusahaan
 MARCAP : Market capitalization
 DER : *Debt-equity ratio*
 EPS : *Earning per share*
 CR : Likuiditas (Current Ratio)
 GROWTH : Tingkat Pertumbuhan Aset
 ε : *Error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama periode penelitian 2013-2017. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan yang dipilih sesuai dengan kriteria yang di uraikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara konsisten pada periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2017.	133	399
Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan keuangan dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember.	(2)	(6)
Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah.	(27)	(81)
Perusahaan manufaktur yang tidak secara konsisten menghasilkan laba untuk periode buku tahun 2014 sampai dengan 2016.	(6)	(18)
Perusahaan manufaktur yang membagikan dividen secara konsisten untuk periode buku tahun 2015 sampai dengan 2017.	(58)	(174)
Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data lengkap sesuai kebutuhan penelitian ini.	(2)	(6)
Jumlah data sebelum outlier	38	114
Jumlah data yang outlier	(1)	(3)
Jumlah data final setelah outlier	37	111

Hasil Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan nilai signifikansi 0,05. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data Sebelum *Outlier*

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Asymp. Sig. (2 -tailed)</i>	0,000
N	114

Sumber: Pengolahan data

Berdasarkan tabel 2, nilai dari *asymp. sig. (2-tailed)* adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa data residual tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, dilakukan uji *outlier* untuk mengurangi data yang bersifat ekstrim. Setelah dilakukan uji *outlier*, terdapat 3 data yang harus dihilangkan sehingga jumlah data menjadi 111 data.

b. Hasil Uji *Outlier*

Uji *outlier* dilakukan apabila data yang diuji dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan hasil bahwa data tidak berdistribusi normal. Hasil dari pengujian normalitas data residual setelah dilakukan uji *outlier* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data Setelah *Outlier*

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Asymp. Sig. (2 -tailed)</i>	0,071
N	111

Sumber: Pengolahan data

Berdasarkan tabel 3, setelah menghilangkan data yang *outlier*, data residual mempunyai nilai *asymp.sig (2-tailed)* sebesar 0,071 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Oleh karena itu, data yang digunakan adalah data setelah dilakukan uji *outlier* yaitu 111 data.

Pengujian Hipotesis

a. Analisis Koefisien Korelasi (R)

Uji koefisien korelasi (R) dilakukan untuk menguji kekuatan hubungan antara variabel independen dengan dependen. Hasil analisis koefisien korelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Koefisien Korelasi

Model	R
1	0,682

Sumber: Pengolahan data SPSS versi 23

Berdasarkan analisis koefisien korelasi (R) pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,682 lebih besar dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara *market price to book value ratio* (MPBV), umur perusahaan (AGE), *market capitalization* (MARCAP), *debt-equity ratio* (DER), *earnings per share*

(EPS), likuiditas (CR), dan tingkat pertumbuhan aset (GROWTH) terhadap kebijakan dividen (DPR) dalam model regresi adalah kuat.

b. Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,429

Sumber: Pengolahan data

Analisis koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5, nilai *adjusted R²* sebesar 0,429 atau 42,9% . Hal ini berarti besarnya persentase variasi dari variabel dependen yaitu kebijakan dividen (DPR) yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu *market price to book value ratio* (MPBV), umur perusahaan (AGE), *market capitalization* (MARCAP), *debt-equity ratio* (DER), *earnings per share* (EPS), likuiditas (CR), dan pertumbuhan aset (GROWTH) adalah sebesar 42,9% dan sisanya sebesar 57,1% dijelaskan oleh variasi dari variabel lain yang tidak termasuk dalam model dan dianggap tetap.

c. Hasil Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F juga bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi layak dan tepat untuk pengambilan keputusan dalam penelitian ini atau tidak. Hasil uji statistik F adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Statistik F

Model	Sig.
1	0,000

Sumber: Pengolahan data

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah fit sehingga data layak digunakan dalam pengambilan keputusan.

d. Hasil Uji Statistik t

Uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji statistik t adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Statistik t

Variabel	B	Sig.	Keterangan
MPBV	0,017000	0,000	Ha ₁ dapat diterima
AGE	0,000000	0,934	Ha ₂ tidak dapat diterima
MARCAP	0,000035	0,591	Ha ₃ tidak dapat diterima
DER	-0,1910000	0,000	Ha ₄ dapat diterima
EPS	0,000038	0,027	Ha ₅ dapat diterima
CR	-0,004000	0,613	Ha ₆ tidak dapat diterima
GROWTH	-0,340000	0,013	Ha ₇ dapat diterima

Sumber: Pengolahan data

Model persamaan regresi berganda pada penelitian ini diperoleh dari hasil pengolahan data statistik dari tabel 7 adalah sebagai berikut:

$$DPR = 0,478 + 0,017 (MPBV) + 0,000 (AGE) + 0,000003509 (MARCAP) - 0,191 (DER) + 0,000003832 (EPS) - 0,004 (CR) - 0,340 (GROWTH) + \varepsilon$$

Berdasarkan hasil pada tabel 7 dan persamaan regresi berganda, dapat diuraikan variabel *Market Price to Book Value* (MPBV) memiliki nilai signifikansi 0,000 dengan nilai koefisien 0,017. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, hasil ini menunjukkan bahwa Hipotesis 1 (Ha₁) diterima, yaitu *Market Price to Book Value* berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Nilai koefisiennya menunjukkan arah yang positif yang berarti semakin tinggi *Market Price to Book Value*, maka semakin besar perusahaan membayarkannya kepada para investor. Adanya kesempatan investasi di masa yang akan datang tidak menutup kemungkinan dividen para pemegang saham akan dibayarkan oleh perusahaan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel umur perusahaan (AGE) memiliki signifikansi 0,934 di atas 0,05, yang berarti Hipotesis 2 (Ha₂) tidak dapat diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Keputusan mengenai perusahaan akan membagikan dividen atau tidak tidak tergantung pada lamanya perusahaan berdiri, tetapi tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *market capitalization* (MARCAP) memiliki signifikansi 0,591 di atas 0,05, yang berarti Hipotesis 3 (Ha₃) tidak dapat diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *market capitalization* tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Perusahaan yang tergolong besar memiliki akses dana ke pasar modal, sehingga hal ini tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk membayarkan dividen kepada para pemegang saham atau tidak.

Hasil pengujian menunjukkan variabel *Debt Equity Ratio* (DER) memiliki nilai signifikansi 0,000 dengan nilai koefisien -0,191. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, hasil ini menunjukkan bahwa Hipotesis 4 (Ha₄) diterima, yaitu *Debt Equity Ratio*

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Nilai koefisiennya menunjukkan arah yang negatif yang berarti semakin tinggi *Debt Equity Ratio*, maka semakin kecil perusahaan membayarkan dividennya kepada para investor. Perusahaan yang memiliki sumber pendaan yang lebih besar berasal dari utang, cenderung membayarkan dividen kepada pemegang saham lebih kecil.

Hasil pengujian menunjukkan variabel *Earnings per Share* (EPS) memiliki nilai signifikansi 0,027 dengan nilai koefisien 0,00003509. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, hasil ini menunjukkan bahwa Hipotesis 5 (H_{a_5}) diterima, yaitu *Earnings per Share* berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Nilai koefisiennya menunjukkan arah yang positif yang berarti semakin tinggi *Earnings per Share*, maka semakin besar perusahaan membayarkan dividennya kepada para investor. Dividen merupakan bagian laba perusahaan yang didistribusikan kepada para pemegang saham, sehingga semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan semakin besar pula jumlah dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel likuiditas (CR) memiliki signifikansi 0,613 di atas 0,05, yang berarti Hipotesis 6 (H_{a_6}) tidak dapat diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Keputusan mengenai perusahaan akan membagikan dividen atau tidak tidak tergantung pada rasio lancar perusahaan, tetapi tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

Hasil pengujian menunjukkan variabel pertumbuhan aset perusahaan (GROWTH) memiliki nilai signifikansi 0,013 dengan nilai koefisien -0,340. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, hasil ini menunjukkan bahwa Hipotesis 7 (H_{a_7}) diterima, yaitu pertumbuhan aset perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Nilai koefisiennya menunjukkan arah yang negatif yang berarti semakin tinggi pertumbuhan aset perusahaan, maka semakin besar perusahaan membayarkan dividennya kepada para investor. Perusahaan yang tingkat pertumbuhannya besar tentunya memiliki banyak tingkat investasi aset yang harus segera dibiayai untuk tujuan ekspansi, sehingga semakin sedikit dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan terhadap 37 perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) *Market price to book value ratio* memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen; 2) Umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen; 3) *Market capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen; 4) *Debt equity ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen; 5) *Earnings per share* memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen; 6) *Likuiditas* tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen; dan 7) *Tingkat* pertumbuhan aset memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah investor perlu mendapatkan informasi dan menganalisisnya sebelum melakukan keputusan investasi, salah satunya adalah dengan mempertimbangkan rasio-rasio keuangan, terutama MPBV, *rasio earnings per share* dan

tingkat pertumbuhan aset yang merupakan penentu di dalam kebijakan dividen perusahaan. Bagi pihak manajemen perusahaan sebaiknya memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi investor yang akan menginvestasi dananya.

PUSTAKA ACUAN

- Alphonse, P., & Tran, Q. T. (2014). A Two-Step Approach to Investigate Dividend Policy: Evidence from Vietnamese Stock Market. *International Journal of Economics and Finance*. <https://doi.org/10.5539/ijef.v6n3p16>
- Damayanti, Y. I., & Martiningtiyas, C. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pembayaran Dividen. *E- Journal Manajemen Fakultas Ekonomi*, 1(2), 70–83.
- Darminto. (2008). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur modal, dan kepemilikan saham terhadap kebijakan dividen. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Devi, N., & Erawati, N. (2014). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(3), 709–716.
- Kieso, Weygandt, & warfield. (2017). Akuntansi Keuangan Menengah Intermediate Accounting. *Salemba Empat*.
- Kuzucu, N. (2015). Determinants of Dividend Policy: A Panel Data Analysis for Turkish Listed Firms. *International Journal of Business and Management*. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v10n11p149>
- Maladjian, C., & Khoury, R. El. (2014). Determinants of the Dividend Policy: An Empirical Study on the Lebanese Listed Banks. *International Journal of Economics and Finance*.
- Marietta, U., & Sampurno, D. (2013). Analisis Pengaruh Cash Ratio, Return On Assets, Growth, Firm Size, Debt to Equity Ratio Terhadap Dividend Payout Ratio : (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2011). *Diponegoro Journal of Management*, 2(3), 1–11. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>
- Pasaribu, R. B. F., Kowanda, D., & Nawawi, K. (2014). Determinan Dividend Payout Ratio pada Emiten LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*.
- Ressy, A. E., & Chariri, A. (2013). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kebijakan Dividen di Bursa Efek Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3), 13–22.
- Ritha, H., & Koestiyanto, Ek. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio (DPR). *E-Journal Manajemen Dan Bisnis*.
- Singhania, M., & Gupta, A. (2012). Determinants of Corporate Dividend Policy: A Tobit Model Approach. *Vision: The Journal of Business Perspective*. <https://doi.org/10.1177/0972262912460152>
- Sunarya, D. H. (2013). Pengaruh Kebijakan Utang, Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen Dengan Size Sebagai Variabel Moderasi Pada Sektor Manufaktur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*.

- Takhtaei, N. (2014). Relationship between Firm Age and Financial Leverage with Dividend Policy. *Asian Journal of Finance & Accounting*, 6(2), 53. <https://doi.org/10.5296/ajfa.v6i2.5910>
- Tariq, A. (2015). the Joint-Determinants of Leverage and Dividend Policy: a Balanced Panel Study of Non Financial Firms of India and Pakistan. *European Scientific Journal*.
- Thanatawee, Y. (2011). Life-Cycle Theory and Free Cash Flow Hypothesis: Evidence from Dividend Policy in Thailand. *International Journal of Financial Research*, 2(2), 52–60. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v2n2p52>
- Zameer, H., Rasool, S., Iqbal, S., & Arshad, U. (2013). Determinants of dividend policy: A case of banking sector in pakistan. *Middle East Journal of Scientific Research*. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.18.3.12200>

Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan Dan Manajemen Laba Terhadap *Return Saham* Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi

Muhamad Nazhif Hawari¹, Zuwesty Eka Putri²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

²zuwesty.eka@uinjkt.ac.id

Abstract

This research aims to test influence of financial performance, company size and profit management on return of shares with dividend policy as moderation variable. This research was conducted in a manufacturing company registered in Indonesia Sharia stock index (ISSI) period 2016-2018. The sampling method in this study uses purposive sampling. The number of samples on this study was as many as 20 companies. The financial performance of the study is calculated by a debt to equity ratio. Hypothesis testing in this study used multiple regression methods and moderated regression analysis. The result of this research show the financial performance and company size has no effect on the stock return and earning management affects the stock return. Dividend policy is not able to moderate the influence of financial performance, company size and profit management on return of shares.

Keywords: financial performance, company size, profit management, stock return, dividend policy

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan dan manajemen laba terhadap *return* saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2016-2018. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 20 perusahaan. Kinerja keuangan dari penelitian ini dihitung dengan rasio hutang terhadap modal. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dan *moderated regression analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *return* saham dan manajemen laba berpengaruh terhadap *return* saham. Kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan dan manajemen laba terhadap *return* saham.

Kata Kunci: Kinerja keuangan, ukuran perusahaan, manajemen laba, *return* saham, kebijakan dividen

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia merupakan pasar yang menjanjikan untuk pengembangan industri keuangan syariah. Investasi syariah di pasar modal merupakan bagian dari industri keuangan syariah dan mempunyai peranan yang cukup penting untuk meningkatkan pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan salah satu indeks berbasis syariah di Bursa Efek Indonesia selain Jakarta Islamic Index (JII) yang diterbitkan oleh Bapepam-LK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 12 Mei 2011. Konstituen ISSI adalah seluruh saham yang tergabung dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang di review oleh OJK setiap enam bulan sekali (Mei dan November) dan tercatat di BEI. Hal yang melatarbelakangi terbentuknya ISSI adalah untuk memisahkan antara saham syariah dan non syariah yang dahulunya disatukan dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Cara ini diharapkan agar para investor muslim tertarik dan tidak takut menanamkan modalnya pada saham yang diragukan kehalalannya. Adapun setiap tahun tingkat kapitalisasi pasar ISSI dan JII terus mengalami kenaikan yang berarti semakin besar kapitalisasi pasar, maka semakin mahal perusahaan tersebut dihargai oleh pasar.

Tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan *return*, tanpa melupakan faktor resiko investasi yang harus dihadapinya. *Return* merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa *return* realisasi yang sudah terjadi atau *return* ekpektasi yang belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi di masa mendatang. *Return* realisasi dihitung berdasarkan data historis. *Return* realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return historis ini juga berguna sebagai dasar penentuan *return* ekspektasi (*expected return*) dan risiko di masa datang. Return ekspektasi (*expected return*) adalah *return* yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan *return* realisasi yang sifatnya sudah terjadi, *return* ekspektasi sifatnya belum terjadi (Retnaningrum dan Haryanto, 2018).

Ekspektasi dari para investor atau pemegang saham terhadap investasinya adalah memperoleh *return* (tingkat pengembalian) sebesar-besarnya dengan risiko tertentu. Oleh karena itu, investor memiliki kepentingan untuk mampu memprediksi berapa besar investasi mereka. Besar kecilnya *return* saham dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah manajemen laba, ukuran perusahaan, *leverage* dan kebijakan dividen (Adiwibowo, 2018).

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar misalnya dengan membuat laporan keuangan yang memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK, GAAP atau ketentuan lainnya (Subagyo, 2017). Adiwibowo (2018) menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan mencerminkan perusahaan mempunyai kemampuan yang semakin besar untuk dapat membiayai kebutuhan dananya (kesempatan investasi) pada masa yang akan datang. Ukuran perusahaan juga dapat menjelaskan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kinerjanya pada saat terjadi perubahan yang mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut.

Selain kinerja keuangan dan ukuran perusahaan, manajemen laba juga merupakan faktor yang mempengaruhi *return* saham. Manajemen laba atau *earnings management* merupakan suatu kondisi dimana pihak manajemen ternyata tidak berhasil mencapai target laba yang ditentukan, maka manajemen akan memanfaatkan keleluasaan yang diperbolehkan oleh standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk memodifikasi laba yang dilaporkan. Manajemen termotivasi untuk memperlihatkan kinerja yang baik dalam menghasilkan nilai atau keuntungan maksimal bagi perusahaan sehingga manajemen cenderung memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi yang dapat memberikan informasi laba lebih baik (Adiwibowo, 2018).

Keputusan yang diambil oleh manajemen terhadap laba yang dihasilkan juga berpengaruh pada kebijakan mengenai besarnya dividen yang akan dibagikan kepada investor. Kebijakan dividen sering dianggap sebagai sinyal bagi investor dalam menilai baik buruknya perusahaan, hal ini disebabkan karena kebijakan dividen dapat membawa pengaruh terhadap harga saham perusahaan (Kurniawan, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2017) menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap *return* saham dan kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *return* saham.

Untuk memperkirakan *return* suatu saham, investor dapat melakukan pendekatan penilaian saham yang meliputi analisis fundamental dan analisis teknikal (Susanti, 2016). Analisis fundamental berkaitan dengan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan yang merupakan cerminan dari kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Abdullah *et al.* (2015) menemukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara *leverage* dan *return* saham. Hasil yang serupa juga dilakukan oleh penelitian (Adiwibowo, 2018) bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *return* Saham. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Kinerja keuangan berpengaruh terhadap *return* saham.

Ukuran perusahaan akan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam membiayai kebutuhan dananya (kesempatan investasi) pada masa yang akan datang dan memberikan pengaruh positif bagi investasi (Adiwibowo, 2018). Ukuran perusahaan yang besar mempunyai sumber daya yang besar pula, tentunya akan melakukan kegiatan operasional yang semakin besar dan semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Besarnya pendapatan yang diperoleh perusahaan akan berpengaruh positif terhadap laba dan tentu akan memberikan *return* yang cukup besar bagi pemegang saham. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarsono dan Sudiyatno (2016) dan Adiwibowo (2018) yang memberikan kesimpulan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *return* saham. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *return* saham.

Dalam teori keagenan memberi penjelasan bahwa kebebasan manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi dan aturan yang tepat sering memicu manajemen memilih kebijakan yang dapat memaksimalkan kepentingan mereka dan nilai pasar saham dan menimbulkan konflik kepentingan antara agen selaku manajemen dan prinsipal selaku

pemilik. Manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan manajemen akibat dari keleluasaan yang diperbolehkan oleh Standar Akuntansi Keuangan. Salah satu motivasi manajemen perusahaan melakukan praktik manajemen laba adalah untuk mendapatkan laba yang diharapkan oleh investor. Hasil dari penelitian Istiqomah dan Adhariani (2017) menunjukkan manajemen laba memiliki pengaruh terhadap imbal hasil saham atau *stock return*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃: Manajemen laba berpengaruh terhadap *return* saham.

Dividen memiliki atau mengandung informasi sebagai syarat prospek perusahaan. Semakin besar dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, maka kinerja keuangan akan dianggap semakin baik, dan pada akhirnya penilaian terhadap perusahaan yang tercermin melalui harga saham juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya. Pengaruh kinerja keuangan khususnya *leverage* terhadap *return* saham dapat dikuatkan atau dilemahkan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. Apabila *leverage* rendah maka dividen yang dibagikan kepada investor akan lebih besar, dan *return* saham akan tinggi. Namun, apabila *leverage* tinggi maka dividen yang dibagikan kepada investor rendah, dan *return* saham akan kecil. Dalam penelitian Adiwibowo (2018) menunjukkan bahwa kebijakan dividen dapat secara signifikan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap pengembalian saham. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄: Kebijakan dividen memoderasi berpengaruh kinerja keuangan terhadap *return* saham.

Kebijakan dividen sebagai variabel moderasi juga mempunyai peran memperkuat atau memperlemah pengaruh ukuran perusahaan terhadap *return* saham. Apabila ukuran perusahaan besar dan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham besar, maka *return* saham juga akan besar. Namun sebaliknya, apabila ukuran perusahaan besar dan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham kecil, maka *return* saham akan kecil. Hasil dari penelitian Sudarsono dan Sudiyatno (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *return* saham. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₅: Kebijakan dividen memoderasi berpengaruh ukuran perusahaan terhadap *return* saham.

Kebijakan dividen menjadi pusat perhatian banyak pihak seperti pemegang saham, kreditor, maupun pihak eksternal lain yang memiliki kepentingan dari informasi yang dikeluarkan perusahaan (Adiwibowo, 2018). Apabila perusahaan melakukan manajemen laba dan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham besar, maka *return* saham juga akan semakin besar. Hasil dari penelitian Adiwibowo (2018) menunjukkan bahwa Kebijakan Dividen dapat secara signifikan memoderasi pengaruh manajemen pendapatan terhadap *return* saham. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₆: Kebijakan dividen memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap *return* saham.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI, sedangkan perusahaan yang terdaftar di BEI yang sesuai dengan kriteria yang dibuat merupakan sampel. Metode penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* untuk menentukan kriteria khusus terhadap sampel. Sumber data yang digunakan menggunakan data sekunder dan metode yang digunakan yaitu metode pengumpulan data dengan cara menganalisis semua catatan informasi, dokumen dan studi pustaka. Data-data tersebut diperoleh dari website resmi BEI yaitu www.idx.co.id.

Berikut ini adalah operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Kinerja Keuangan (X1)

Kinerja keuangan dapat dinilai dari beberapa rasio di antaranya rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Dalam penelitian ini, Kinerja Keuangan di proksikan menggunakan rasio leverage. Rasio leverage digunakan karena rasio leverage dapat mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang (Wijaya, 2017). *Debt to equity ratio* (DER) merupakan imbalan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya.

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal}}$$

2. Ukuran Perusahaan (X2)

Ukuran perusahaan (Size) adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aset, penjualan, log size, nilai pasar saham, kapitalisasi pasar, dan lain-lain yang semuanya berkorelasi tinggi (Wijaya, 2017). Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan (Size) menggunakan Log Total Asset.

$$\text{Size} = \text{Logaritma natural (Total Asset)}$$

3. Manajemen Laba (X3)

Dalam penelitian ini, manajemen laba dapat dihitung dengan menggunakan modified Jones model yang dikembangkan oleh (Dechow et al. 1995). Model tersebut lebih tepat digunakan untuk mengurangi dugaan kecenderungan dari Model Jones untuk mengukur akrual diskresioner dengan error ketika diskresi yang digunakan melebihi pendapatan. Modified Jones model dianggap sebagai model yang mampu mendeteksi adanya manajemen laba (Indrayanti dan Wirakusuma, 2017). Perhitungan manajemen laba dengan menggunakan model tersebut sebagai berikut:

$$\text{DA}_{it} = (\text{TA}_{it}/\text{A}_{it-1}) - \text{NDA}_{it}$$

4. Kebijakan Dividen (X4)

Dividend payout ratio (DPR) merupakan rasio yang menunjukkan bagian atas laba yang diperoleh perusahaan nantinya akan dibayarkan kepada pemegang saham biasa berbentuk dividen kas. Kebijakan dividen dijadikan variabel moderasi dengan alasan bahwa kebijakan dividen selalu menjadi pusat perhatian banyak pihak baik investor,

kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan karena dividen mempunyai informasi yang sarat akan prospek perusahaan untuk kedepannya (Dewi et al, 2017). Menghitung kebijakan dividen dapat dengan cara:

$$DPR = \frac{\text{Dividend}}{\text{Net Profit}}$$

5. Return Saham (Y)

Abnormal return digunakan sebagai indikator dari *stock return*. Dalam penelitian ini digunakan *cummulative abnormal return (CAR)* untuk mengetahui reaksi pasar atas pengumuman atau informasi laba yang dikeluarkan atau dipublikasikan oleh perusahaan dan dijadikan sebagai proksi dari *return* saham atau *stock return*. *CAR* merupakan akumulasi dari *abnormal return* selama satu tahun (12 bulan). Penggunaan proksi ini sama dengan yang digunakan oleh Istiqomah dan Adhariani (2017) dan Uswati dan Mayangsari (2016). *CAR* dapat dicari dengan menggunakan persamaan berikut:

$$CAR (t1, t2) = \sum AR_{t1,t2}$$

Metode analisis pada penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda (model 1) untuk H₁, H₂ dan H₃ dan MRA (model 2) untuk H₄, H₅, dan H₆ variabel independen yang akan diteliti yaitu kinerja keuangan, ukuran perusahaan, dan manajemen laba sedangkan variabel dependennya adalah *return* saham dan ditambah dengan variabel moderasi yaitu kebijakan dividen. Model regresi yang akan digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$CAR = a + \beta_1 DER + \beta_3 Size + \beta_4 DA + \beta_5 DPR + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

$$CAR = a + \beta_1 DER + \beta_3 Size + \beta_4 DA + \beta_5 DPR + \beta_6 DER * DPR + \beta_8 Size * DPR + \beta_9 DA * DPR + \varepsilon \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

a = Konstanta

β = Koefisien regresi

DER = *Leverage* (Kinerja Keuangan)

Size = Ukuran Perusahaan

DA = Manajemen Laba

DPR = Kebijakan Dividen

CAR = *Return* Saham

ε = Residual Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang termasuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia pada sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2018.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum. Kemudian, dengan melihat nilai *mean* dan standar deviasi dapat memberikan gambaran mengenai kualitas data. Berikut hasil statistik deskriptif:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CAR	60	-.63	.79	-.0129	.28370
DER	60	.08	1.83	.5368	.35577
Size	60	26.25	32.20	29.0148	1.42358
DA	60	-.12	.27	.0590	.07394
DPR	60	.01	2.25	.4798	.42535
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data diolah.

Dari data pada tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan adalah 60 data. Nilai *return* saham yang dihitung menggunakan proksi *Cumulative Abnormal Return* (CAR) menunjukkan nilai minimum -0,63 dan maksimum 0,79. Rata-rata nilai *Return* Saham adalah -0,0129 dengan standar deviasi sebesar 0,28370. Hasil tersebut mengungkapkan bahwa *return* saham pada penelitian ini cenderung mengalami *capital loss*. Hasil statistik deskriptif dari variabel kinerja keuangan yang dihitung dengan menggunakan rasio leverage atau Solvabilitas dengan proksi Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,08 dan maksimum sebesar 1,83. Rata-rata nilai Kinerja Keuangan adalah 0,5368 dengan standar deviasi sebesar 0,35577. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan memiliki rasio DER dibawah angka 1 yang artinya perusahaan-perusahaan tersebut sehat secara keuangan. Sementara itu, variabel ukuran perusahaan yang dihitung dengan menggunakan Logaritma natural Total Aset (Size) menunjukkan nilai minimum sebesar 26,25 dan nilai maksimum sebesar 32,20. Rata-rata nilai Ukuran Perusahaan adalah 29.0148 dengan standar deviasi sebesar 1.42358. Dari hasil tersebut diatas mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan pada penelitian tidak memiliki kesenjangan yang terpaut jauh dan relatif setara. Untuk variabel Manajemen Laba yang dihitung dengan menggunakan Diskresioner Akrua (DA) menunjukkan nilai minimum sebesar -0,12 dan maksimum sebesar 0,27. Rata-rata nilai Manajemen Laba adalah 0,0590 dengan standar deviasi sebesar 0,07394. Hasil ini mengungkapkan bahwa rata-rata perusahaan melakukan manajemen laba sebesar 5%. Sedangkan variabel Kebijakan Dividen yang dihitung dengan menggunakan Dividen Payout Ratio (DPR) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,01 dan maksimum sebesar 2,25. Rata-rata nilai Kebijakan Dividen adalah 0,4798 dengan standar deviasi sebesar 0,42535. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata melakukan pembagian dividen sebesar 47% dari *net profit*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas data, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, dan uji heterokedasitas. Semua uji asumsi klasik yang dilakukan telah memenuhi seluruh syarat untuk setiap uji tersebut.

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.471 ^a	.222	.165	.25920
2	.530 ^a	.281	.184	.205628

Sumber: Data diolah.

Model 1 pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,165, yang berarti bahwa sebesar 16,5% variabel Return Saham dijelaskan oleh variabel Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Manajemen Laba. Sisanya yaitu 83,5% dijelaskan oleh faktor-faktor selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara itu, pada model 2 terjadi kenaikan Adjusted R Square dengan nilai 0,184 atau sebesar 18,4% dan sisanya sebesar 81,6% dijelaskan oleh faktor lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Hasil Uji F

Hasil F disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.053	4	.263	3.920	.007
Residual	3.695	55	.067		
Total	4.749	59			

Sumber: Data diolah.

Hasil uji F pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,007 yang berarti $<0,05$. Maka model penelitian ini sudah *fit* dan juga secara bersama-sama yang artinya variabel independen yaitu kinerja keuangan, ukuran perusahaan, manajemen laba, dan kebijakan dividen secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu *return* saham.

3. Hasil Uji t

Hasil t disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji t

Model	Variabel	B	Sig.
1	Constant	.471	.528
	DER	-.109	.268
	Size	-.017	.504
	DA	1.474	.004
	DPR	-.025	.764
2	Constant	1.269	.389
	DER	-.012	.928
	Size	-.046	.344
	DA	2.139	.026
	DPR	-1.783	.520
	DER*DPR	-.226	.314
	Size*DPR	.064	.471
DA*DPR	-2.146	.344	

Sumber: Data diolah.

Persamaan regresi berganda model 1 dan persamaan MRA model 2 yang terbentuk dalam penelitian ini adalah:

Model 1:

$$CAR = 0,471 - 0,109 \text{ DER} - 0,017 \text{ Size} + 1,474 \text{ DA}$$

Model 2:

$$CAR = 1,269 - 0,012 \text{ DER} - 0,46 \text{ Size} + 2,139 \text{ DA} - 1,783 \text{ DPR} - 0,226 \text{ DER*DPR} + 0,064 \text{ Size*DPR} - 2,146 \text{ DA*DPR}$$

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4, model 1, diperoleh nilai signifikansi variabel kinerja keuangan sebesar 0,268, yang berarti variabel kinerja keuangan dengan proxy *leverage* (DER) tidak berpengaruh terhadap *return* saham, oleh karena itu, H_1 ditolak. Beberapa indikasi yang dapat menyebabkan pengujian ini tidak memiliki pengaruh adalah investor tidak tertarik terhadap informasi tinggi rendahnya rasio hutang perusahaan karena perusahaan yang memiliki rasio leverage rendah tidak menjamin harga saham perusahaan tersebut akan selalu naik. Dalam penelitian ini, rasio leverage cukup rendah dengan rata-rata 0,53 akan tetapi harga saham mengalami penurunan

yaitu sebesar 1% sehingga tinggi rendahnya rasio leverage tidak mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut. Menurut Kurniawan (2017) disebutkan bahwa *Debt to equity ratio* tidak mempengaruhi harga pada perusahaan yang listing di Bursa Efek. Sementara itu, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai sig. sebesar 0,504 yang berarti variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *return* saham. Hal ini mengindikasikan bahwa H_2 ditolak. Naik dan turunnya harga saham tidak dipengaruhi oleh faktor besar kecilnya suatu perusahaan. Pada penelitian ini contohnya pada tahun 2018 saham INTIP memiliki nilai ukuran perusahaan sebesar 30,9 dari rata-rata ukuran perusahaan 29 mengalami penurunan saham sebesar 3%. Dan pada tahun yang sama saham SIDO dengan nilai ukuran perusahaan sebesar 28,8 mengalami kenaikan harga saham sebesar 49%. Sedangkan variabel manajemen laba memiliki nilai sig. sebesar 0,004, berarti variabel manajemen laba berpengaruh terhadap *return* saham. Oleh karena itu, H_3 diterima. Peran manajemen dalam menentukan laba akrual atau diskresioner akrual salah satunya yaitu untuk menarik para investor untuk menanam sahamnya di perusahaan tersebut. Dengan banyaknya investor, diharapkan harga saham perusahaan meningkat dan memberikan *return* yang diharapkan bagi investor.

Hasil yang diperoleh pada model 2 di tabel 4, menunjukkan bahwa variabel kebijakan dividen tidak mampu memoderasi kinerja keuangan terhadap *return* saham atau H_4 ditolak. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig. sebesar 0,314. Indikasi penyebab tidak berpengaruhnya kebijakan dividen dalam memoderasi kinerja keuangan terhadap *return* saham salah satunya yaitu rasio *leverage* atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya tidak mempengaruhi harga saham perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di ISSI periode 2016-2018. Sementara itu, variabel kebijakan dividen juga tidak mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap *return* saham atau H_5 ditolak, ditunjukkan dengan nilai sig. sebesar 0,471 Periode dan sampel penelitian ini menjadi indikasi utama tidak berpengaruhnya kebijakan dividen untuk memoderasi ukuran perusahaan terhadap *return* saham. Perusahaan yang besar belum tentu menghasilkan *gain* dan perusahaan kecil belum tentu *loss*. Begitu pula kebijakan dividen tidak mampu memoderasi hubungan manajemen laba terhadap *return* saham atau H_6 ditolak (nilai sig. sebesar 0,955). Salah satu indikasi atau penyebab tidak berpengaruhnya kebijakan dividen dalam memoderasi manajemen laba terhadap *return* saham yaitu terbatasnya sampel dan ruang lingkup penelitian sehingga tidak mendapatkan hasil yang signifikan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hasil, yaitu kinerja keuangan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *return* saham dan manajemen laba berpengaruh terhadap *return* saham. Kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan dan manajemen laba terhadap *return* saham.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan informasi bagi perusahaan dan investor tentang faktor yang mempengaruhi *retrun* saham.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya menggunakan sektor manufaktur yang terdaftar di ISSI. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel atau mencari faktor lain yang mempengaruhi *return* saham.

PUSTAKA ACUAN

- Abdullah, M. N., Parvez, K., Karim, T., dan Tooheen, R. B. 2015. *"The impact of financial leverage and market size on stock returns on the Dhaka stock exchange: Evidence from selected stocks in the manufacturing sector"*. International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 10-15 .
- Adiwibowo, A. S. 2018. *"Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Return Saham Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi"*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang Vol. 6, No. 2, 203-222.
- Dewi, L. S., Budiarta, I. K., dan Suputra, I. D. 2017. *"Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Tax, Leverage Dan Firm Size Pada Earnings Management"*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6.1, 277-302.
- Indrayanti, N. P., dan Wirakusuma, M. G. 2017. *"Pengaruh Manajemen Laba Pada Return Saham Dengan Kualitas Audit Dan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi"*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1762-1790 .
- Istiqomah, A., dan Adhariani, D. 2017. *"Pengaruh Manajemen Laba terhadap Stock Return dengan Kualitas Audit dan Efektivitas Komite Audit sebagai Variabel Moderasi"*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 19, No. 1, 1-12
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. 1976. *"Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure"*. Journal of Financial Economics 3, 305-360.
- Kurniawan, A. 2017. *"Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Dengan Menjadikan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderate Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks (JII 2007 - 2011)"*. Akuisisi - Jurnal Akuntansi Vol. 13, 1-14.
- Retnaningrum, M., dan Haryanto, T. 2018. *"Analisis Pengaruh Kebijakan Dividen Dan Leverage Terhadap Return Saham Dengan Pemoderasi CSR"*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto , 1-9.
- Subagyo. 2017. *"Efek Mediasi Kinerja Perusahaan Pada Pengaruh Manajemen Laba Riil dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saha"*. JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN, Vol.2, No., 283 - 304 .
- Susanti. 2016. *"Pengaruh Cr Dan Roe Terhadap Return Saham Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Intervening"*. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 5, Nomor 3, 228-236.
- Uswati, L., dan Mayangsari, S. 2016. *"Pengaruh Manajemen Laba Terhadap future Stock Return Dengan Asimetri Informasi Sebagai Variabel moderating"*. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan–Volume 20, Nomor2, 242–259.

Wijaya, R. 2017. "*Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Harga Saham dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Intervening*". Jurnal Keuangan dan Perbankan, 21(3), 459-472.

Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan (Studi pada BMT Amanah Banjarmasin)

Syafril

ASMI Citra Nusantara Banjarmasin
Syafri.riau@gmail.com

Abstract

Research used to know financial performance and compared with industry standards. Focus on this BMT Amanah Banjarmasin and compared with Bank Indonesia standards. Focus on this research is on a financial report 2017 and 2018. From the BMT financial statements then analyzed the liquidity, solvency, rentability, and effectivity for comparison of results in each year and will be adjusted to Bank Indonesia (BI) standard that can be analyzed to measure what the financial level and performance of the BMT . Data analysis method is comparative descriptive analysis. While the data source used in this study is secondary data in the form of bank financial statement documents. The results show, bank liquidity is able to meet the short term in a timely manner. The result of solvency is seen ability of bank in fulfilling and keeping its ability to always able to fulfill its obligation in paying debt in a timely manner. The profitability of banks has a good ratio. Maximally maximized resource viewing effectivity results.

Keywords: financial performance, liquidity, solvability, profitability, effectivity, ratio analysis

Abstrak

Penelitian digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan BMT Amanah Banjarmasin dan dibandingkan dengan standar Bank Indonesia. Fokus dalam penelitian ini adalah pada laporan keuangan tahun 2017 dan 2018. Dari laporan keuangan BMT kemudian dianalisis likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan efektivitas untuk mendapatkan perbandingan hasil pada setiap tahun dan akan disesuaikan dengan standar Bank Indonesia (BI) yang dapat dianalisis untuk mengukur seperti apa tingkat keuangan dan kinerja BMT tersebut. Metode analisis data adalah analisis deskriptif komparatif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa dokumen laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan, likuiditas BMT mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Hasil solvabilitas memperlihatkan kemampuan BMT dalam memenuhi dan menjaga kemampuannya untuk selalu mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang secara tepat waktu. Hasil profitabilitas memperlihatkan bank memiliki rasio yang baik. Hasil efektivitas memperlihatkan bank mempergunakan sumber daya yang dimiliki secara maksimal.

Kata Kunci: kinerja keuangan, likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, efektivitas, analisa rasio

PENDAHULUAN

Lembaga bisnis merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan hukum Islam. Lembaga bisnis dalam Islam sesungguhnya bukan saja berfungsi sebagai pengumpul modal dan mengakumulasikan laba, tetapi juga berperan dalam pembentukan sistem ekonomi yang lebih adil dan terbebas dari perilaku yang tidak adil.

Dalam berbisnis (*muamallah*) dalam Islam haruslah berlaku adil dan transparan antara para pihak baik itu antara penjual dan pembeli, pemilik modal dan karyawan begitu juga dengan pencatatan transaksinya haruslah transparan. Pencatatan transaksi yang baik akan memudahkan bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kondisi usahanya apakah mendapatkan keuntungan (laba) atau mengalami kerugian. Pencatatan transaksi usaha juga berguna untuk proses pengambilan keputusan atau menentukan strategi usaha agar usaha lebih maju (sukses) dan bertahan dalam jangka panjang.

Islam ternyata melalui al-qur'an, Allah telah menggariskan bahwa prinsip akuntansinya adalah penekanan pada pertanggungjawaban atau *accountability*. Hal ini dapat dilihat dalam Firman Allah, Surat Al Baqarah ayat 282. Prinsip-prinsip dari akuntansi Islam tertuang dalam al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat tersebut dapat dirumuskan prinsip-prinsip umum akuntansi Islam, yaitu: 1) Keadilan, 2) Kebenaran, 3) Pertanggungjawaban (Nurhasanah, 2018). Penjelasan tentang perlunya pencatatan transaksi usaha ini dapat dijumpai dalam Surat Al Baqarah Ayat 282, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai (seperti berjualbeli, utang-piutang, sewa menyewa dan sebagainya) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Al-Baqarah: 282)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Amanah, seperti halnya perbankan syariah lainnya juga memiliki standar pencatatan akuntansi sebagai pedoman dalam melakukan transaksi dan pembukuannya sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Menurut Dariansyah (2018), laporan keuangan disusun berdasarkan berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dengan melakukan pencatatan yang baik maka kinerja keuangan dapat dinilai oleh pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya nasabah, pemilik modal, kreditur, pemerintah dan masyarakat. Jika kinerja keuangannya baik dan sehat maka akan menarik minat nasabah untuk menyimpan dananya di BMT Amanah karena akan memberikan kontribusi tingkat Bagi Hasil atau *Return On Investment* yang tinggi. Begitu juga dengan pihak kreditur yang tentunya akan memberikan pembiayaan kepada BMT Amanah untuk pengembangan usahanya.

Tujuan utama dari lembaga keuangan adalah mencari dan meningkatkan laba usaha. Lembaga keuangan harus dapat memanfaatkan peluang dan kesempatan agar dapat terus berkembang. Hal ini mendorong lembaga keuangan untuk dapat melakukan kinerja yang efektif dan efisien sehingga mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain untuk terus mempertahankan kelangsungan hidup lembaga keuangan dan melakukan pengembangan usahanya (Syafri, 2018). Dalam penelitiannya, Rusdiana, AS (2018) mengatakan bahwa bagi sebuah entitas bisnis, efisiensi adalah hal yang sangat penting. Konsep efisiensi seringkali didefinisikan sebagai melakukan sesuatu secara benar (*doing the thing right*). Hal ini

biasanya selalu dikaitkan dengan bagaimana cara perusahaan dalam mencapai tujuannya. Menurut Nuhu (2011), *the two primary objectives of every business are profitability and solvency. Profitability is the ability of a business to make profit, while solvency is the ability of a business to pay debts as they come due.*

Bank/BMT dikatakan sehat apabila indikator-indikator yang menunjukkan kinerja suatu bank menunjukkan nilai yang baik, dalam arti nilai tersebut berada dalam rata-rata industri perbankan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri perbankan, atau sesuai dengan/atau lebih tinggi dari kriteria yang telah ditetapkan oleh manajemen bank/BMT atau pemerintah (Kusumo, 2002). Peneliti lainnya, Pangemanan, dkk. (2017), menyatakan bahwa kinerja perusahaan adalah prestasi yang dipakai perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut

Untuk dapat menilai kondisi lembaga keuangan maka diperlukan laporan keuangan. Agar laporan keuangan berguna dalam proses pengambilan keputusan, maka laporan keuangan perlu dianalisis dan diinterpretasikan. Analisis laporan keuangan (*financial statement analysis*) pada hakekatnya adalah menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan angka yang lain atau menjelaskan arah perubahannya (*trend*). Angka-angka dalam laporan keuangan akan menjadi sedikit artinya apabila dilihat secara sendiri-sendiri (Soemarso, SR, 2004). Interpretasi laporan keuangan (*financial statement interpretation*) menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan, termasuk hasil analisisnya, dengan keputusan usaha yang akan diambil.

Analisa laporan keuangan pada BMT amanah merupakan hal yang sangat penting, karena dengan menganalisa kinerja keuangan akan semakin besar manfaatnya dalam proses pengambilan keputusan-keputusan bisnis kedepannya. Laporan keuangan dapat menunjukkan kinerja yang telah dicapai pada suatu waktu. Kinerja keuangan tersebut dapat diketahui dengan menghitung rasio-rasio keuangan sehingga dapat diketahui prestasi suatu BMT. Alat analisa yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan tersebut adalah dengan menggunakan analisis rasio yaitu likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan efisiensi usaha.

Aspek likuiditas yang dipakai dalam rasio BMT dengan menghitung *Cash Ratio*, *Quick Ratio*, *Banking Ratio (LDR)*, dan *Loan to Asset Ratio*. Aspek rentabilitas dapat diketahui dengan menghitung *Return on Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, dan *Gross Profit Margin (GPM)*. Aspek Solvabilitas dapat diketahui dengan menghitung *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Primary Ratio* dan *Capital Ratio*. Sementara aspek efisiensi usaha dapat diketahui dengan menghitung *Leverage Multiple Ratio*, *Asset Utilization Ratio (AUR)*, dan *Operating Ratio*. Selain itu analisis rasio juga dapat membantu manajemen BMT dalam memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi berdasarkan informasi laporan keuangan baik dari perbandingan rasio-rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang pada internal BMT maupun perbandingan eksternal dengan BMT lainnya atau dengan standar kinerja keuangan dari institusi pemerintahan seperti Bank Indonesia atau Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.

Dalam penelitiannya, Khairiyahtul (2016) mengatakan bahwa *financial ratios are used to connect the various predictions that contained in the financial statements so that the*

financial condition and results o the operations of a company can be described. Ratio is a useful guidance in evaluating the company's financial position and the operating results and comparing with the previous years or other companies. There are four groups of financial ratios, which are: (1).The liquidity ratio is the ratio to determine a company's ability to implement the production process and meet the financial obligations at the billed time. (2). Activity ratio is the ratio to determine the company's ability to perform activities of daily company (3). Profitability ratio is the ratio to determine the company's ability to gain the profit from the policies and (4). The solvency ratio is a ratio that used to measure how far the company's assets are financed by debt.The figure number and caption should be typed below the illustration in 10pt and center justified.

Penelitian yang dilakukan Mirdhani (2014) tentang aplikasi rasio CAMEL untuk menilai kesehatan bank pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2012. Penelitian ini menggunakan rasio-rasio keuangan dalam analisa CAMEL untuk mengetahui tingkat kesehatan bank yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang dibandingkan dengan indikator sesuai dengan matriks kriteria peringkat komponen keuangan yang dikeluarkan oleh SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004. Begitu juga penelitian Pengemanan (2017), penelitian dan pembahasan mengenai analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan PT. Bank Central Asia, Tbk. Cabang Manado membandingkannya dengan ketentuan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP/2004.

Berdasarkan beberapa penelitian penulis tertarik meneliti kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan pada BMT Amanah Banjarmasin sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang penilaian kinerja keuangan bank. Hal inilah yang kemudian digunakan oleh peneliti sebagai dasar dalam penyusunan secara ringkas penetapan peringkat komponen kinerja keuangan bank/BMT, yang dapat digolongkan menjadi lima peringkat yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik (Mudawamah, dkk, 2018). Adapun nilai indikator rasio keuangan menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/1/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Standar Tingkat Kesehatan Menurut Bank Indonesia

Rasio	Nilai Standar BI	Keterangan
Likuiditas Ratio		
Quick Ratio	>175%	Sangat Baik
	150% - 174%	Baik
	125% - 149 %	Kurang Baik
	<149%	Tidak Baik
Banking Ratio (LDR)	>102,25%	Tidak Baik
	98.50% - 102.25%	Kurang Baik
	94.75% - <98.50%	Baik
	<94.75%	Sangat Baik

Rasio	Nilai Standar BI	Keterangan
Loan to Asset Ratio	>102.25%	Tidak Baik
	98.50% - 102.25%	Kurang Baik
	94.75% - <98.50%	Baik
	<94.75%	Sangat Baik
Solvabilitas Ratio		
Primary Ratio	>14.5%	Sangat Baik
	12.60% - 14.50%	Baik
	10.35% - <12.60%	Kurang Baik
	0 - 10.35%	Tidak Baik
Capital Ratio	>81%	Sangat Baik
	66% - 81%	Baik
	51% - <66%	Kurang Baik
	<51%	Tidak Baik
Capital Adequacy Ratio (CAR)	>20%	Sangat Baik
	12% - 20%	Baik
	8% - <12%	Kurang Baik
	?8%	Tidak Baik
Rentabilitas Ratio		
Return on Asset (ROA)	>1.215%	Sangat Baik
	0.999% - 1.215%	Baik
	0.765% - <0.999%	Kurang Baik
	<0.765%	Tidak Baik
Return on Equity (ROE)	>1.215%	Sangat Baik
	0.999% - 1.215%	Baik
	0.765% - <0.999%	Kurang Baik
	<0.765%	Tidak Baik
Gross Profit Margin (GPM)	>1.22%	Sangat Baik
	0.99% - 1.21%	Baik
	0.77% - 0.98%	Kurang Baik
	<0.76%	Tidak Baik
Efficiency Ratio		
Cost of Efficiency 1 (CE1)	<93.52%	Sangat Baik
	93.52% - 94.73%	Baik
	94.73% - 95.92%	Kurang Baik
	>95.52%	Tidak Baik
Cost of Efficiency 2 (CE2)	<75%	Sangat Baik
	76% - 93%	Baik
	94% - 96%	Cukup Baik
	96% - 100%	Kurang Baik
>100%	Tidak Baik	

Sumber: Bank Indonesia

Dengan dilakukan analisa terhadap rasio-rasio keuangan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi kinerja keuangan BMT Amanah. Analisa kinerja keuangan akan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pengelola lembaga keuangan, anggota, nasabah, kreditur, pemerintah dan masyarakat umum lainnya untuk mengambil suatu keputusan. Informasi ini dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan dan kondisi lembaga keuangan serta perkembangan untuk jangka waktu yang akan datang.

Penelitian yang dilakukan Kaur (2016) menyimpulkan bahwa *Ratio analysis stands for the process of determining and presenting the relationship of items and groups of items in financial statements. It is a vital tool of financial analysis. It is a way in which a financial stability and health of a concern can be judged.* Penelitian Widaryanti (2014) menggunakan Laporan keuangan BMT dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui kinerja BMT sudah berjalan dengan baik atau belum. Indikator dari kinerja ini diukur dengan menggunakan tingkat kesehatan BMT menggunakan metode CAMEL.

Penelitian lain menganalisa tingkat kesehatan BMT dengan menggunakan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah (Affand, 2014). Kesehatan Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi dimana Koperasi dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Sedangkan penelitian Syofyan (2017) menyatakan bahwa penilaian tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan dapat diukur dengan menggunakan satu alat analisis yaitu analisis CAMEL, singkatan dari beberapa faktor yang dinilai antara lain: Capital, Aset, Manajemen, Earning, dan Liquidity.

Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan penelitian pada BMT Amanah Banjarmasin untuk mengetahui permasalahan "Bagaimana kondisi dan kinerja keuangan BMT Amanah dinilai dari segi rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan efisiensi periode tahun 2017 dan 2018.

METODE

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Laporan Keuangan tahunan BMT Amanah Banjarmasin tahun 2017-2018, yang terdiri dari: Neraca, dan Laporan Laba Rugi. 2) Analisis rasio keuangan bank yang sesuai dengan teori dan peraturan perbankan Indonesia yang relevan, yang terdiri dari: Rasio Likuiditas (*Quick Ratio, Loan to Deposit Ratio, Loan to Assets Ratio*), Rasio Rentabilitas (*Return On Assets, Return On Equity, Net Profit Margin*, Beban Operasi/Pendapatan Operasi), Rasio Solvabilitas (*Capital Adequacy Ratio dan Debt to Equity Ratio*), Rasio Efektivitas Usaha (*cost effectivity 1 dan 2*).

Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data dapat diperinci sebagai berikut: 1) Review data keuangan (laporan keuangan) bank khususnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan pada BMT Amanah Banjarmasin. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi, dari tahun 2017-2018. 2) Melakukan perhitungan atas rasio likuiditas,

rentabilitas, solvabilitas dan efektivitas pada Laporan Keuangan bank. Perhitungan ini menggunakan rasio keuangan perbankan yang terdiri dari: a) Rasio Likuiditas yang terdiri dari (1) *Quick Ratio (QR)*, (2) *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, (3) *Loan to Assets Ratio (LAR)*. b) Rasio Rentabilitas yang terdiri dari, (1) *Return On Assets (ROA)*, (2) *Return On Equity (ROE)*, (3) *Beban Operasi/Pendapatan Operasi (BOPO)*, (4) *Net Profit Margin (NPM)*. c) Rasio Solvabilitas yang terdiri dari (1) *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, (2) *Debt to Equity Ratio (DER)*. d) Rasio Efisiensi yang terdiri dari (1) *Cost Efficiency 1* dan (2) *Cost Efficiency 2*. 3) Membandingkan hasil perhitungan rasio keuangan perbankan dengan metode time series analysis, yaitu dengan membandingkan hasil perhitungan rasio keuangan BMT Amanah Banjarmasin tahun 2017-2018. 4) Menginterpretasikan nilai rasio yang telah dihitung dan membandingkannya dengan tolok ukur Bank Indonesia untuk menilai kinerja keuangan bank yang bersangkutan.

Setelah mendapatkan rasio-rasio keuangan BMT Amanah, selanjutnya dibandingkan dengan rasio keuangan berdasarkan nilai standar tingkat kesehatan Bank/BMT sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31mei 2004 tentang penilaian kinerja keuangan bank. Melalui pendekatan CAMELS (capital, asset, management, earnings, liquidity, sensitivity market risk), ini merupakan alat ukur resmi yang telah ditetapkan Bank/BMT Indonesia. Bagi bank/BMT tujuan penilaian tersebut adalah untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kinerja bank sehingga dapat digunakan sebagai input bagi bank/BMT dalam menyusun strategi dan rencana bisnis kedepan serta memperbaiki kelemahan-kelemahan yang berpotensi mengganggu kinerja bank/BMT. Bagi investor dengan diketahuinya tingkat peringkat kinerja lewat laporan keuangan yang sudah dianalisis maka dapat mempertimbangkan di bank manakah mereka akan menginvestasikan modalnya sekaligus mengukur seberapa besar risiko-risiko yang akan dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa rasio *likuiditas* bertujuan untuk menilai atau mengukur kemampuan BMT Amanah Banjarmasin dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Analisis rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Quick Ratio*, *Banking Ratio (LDR)*, dan *Loan to Asset Ratio*.

Adapun hasil penelitian kinerja keuangan berdasarkan *Quick Ratio* untuk taun 2017–2018 pada BMT Amanah Banjarmasin dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis *Quick Ratio*

Tahun	<i>Quick Ratio</i>	Standar BI	Kriteria Penilaian
2017	40,02%	<149%	Tidak Baik
2018	33,31%	<149%	Tidak Baik
Rerata*	36,66%	<149%	Tidak Baik

Sumber: Data diolah 2019, *Rerata= rata-ratapertahun

Berdasarkan hasil analisa *quick ratio* di tahun 2017, 2018 dan rata-rata pertahun menunjukkan bahwa *quick ratio* masuk kategori tidak baik. Pada tahun 2017 *quick ratio* sebesar 0,402 atau 40,02% yang berarti setiap Rp.1 *deposit* dijamin oleh Rp.0,402 *cash assets*. Sedangkan pada tahun 2018 *quick ratio* mengalami penurunan menjadi 0,3331 atau 33,31% yang berarti setiap Rp.1 *deposit* dijamin oleh Rp.0,3331 *cash assets*. Penurunan *quick ratio* pada tahun 2018 menunjukkan bahwa BMT kurang mampu meningkatkan kualitas kas atau asetnya. Semakin rendah *quick ratio* maka semakin rendah pula tingkat likuiditas BMT karena kurang dapat menjamin pengembalian simpanan (*deposit*) baik dalam bentuk tabungan maupun deposito berjangka kepada para nasabah penyimpan dana.

Adapun hasil penelitian kinerja keuangan berdasarkan *Banking Ratio/Loan to Deposite Ratio* (LDR) untuk tahun 2017–2018 pada BMT Amanah Banjarmasin dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Loan to Deposite Ratio

Tahun	Banking Ratio (LDR)	Standar BI	Kriteria Penilaian
2017	85.06%	<94.75%	Sangat Baik
2018	92.72%	<94.75%	Sangat Baik
Rerata	88,89%	<94.75%	Sangat Baik

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan hasil analisa *banking ratio (loan to deposit ratio)* di tahun 2017, 2018 dan rata-rata pertahun menunjukkan bahwa *banking ratio* masuk kategori sangat baik. Pada tahun 2017 *banking ratio* sebesar 0,8506 atau 85.06% yang berarti bahwa setiap Rp.1 *deposit* menjamin Rp.0,8506 dari pembiayaan yang diberikan. Sedangkan pada tahun 2018 *banking ratio* mengalami kenaikan menjadi 0,9272 atau 92.72% yang berarti setiap Rp.1 *deposit* menjamin Rp.0,9272 dari pembiayaan yang diberikan.

Kenaikan *banking ratio* pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat kualitas BMT sangat baik karena BMT kurang membutuhkan jumlah dana yang besar untuk membiayai pembiayaannya. Semakin rendah nilai *banking ratio* maka tingkat likuiditas BMT semakin tinggi karena dapat menjamin pemberian pinjaman kepada nasabah peminjam dengan menggunakan simpanan (*deposit*) yang ada.

Sementara itu, hasil penelitian kinerja keuangan berdasarkan *Loan to Asset Ratio* untuk tahun 2017–2018 pada BMT Amanah Banjarmasin dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Loan to Asset Ratio

Tahun	Loan to Asset Ratio	Standar BI	Kriteria Penilaian
2017	68.48%	<94.75%	Sangat Baik
2018	72.61%	<94.75%	Sangat Baik
Rerata	70,55%	<94.75%	Sangat Baik

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan hasil analisa *loan to assets ratio* di tahun 2017, 2018 dan rata-rata pertahun menunjukkan bahwa *loan to assets ratio* masuk kategori sangat baik. Pada tahun 2017 *loan to assets ratio* sebesar 0,6848 atau 68.48% yang berarti bahwa setiap Rp.1 asset yang tersedia mampu memenuhi pembiayaan yang diberikan sebesar Rp.0,6848. Sedangkan pada tahun 2018 *loan to assets ratio* mengalami kenaikan menjadi 0,72,61 atau 72.61% yang berarti setiap Rp.1 asset yang tersedia mampu memenuhi Rp.0,72.61 dari pembiayaan yang diberikan. Kenaikan *loan to assets ratio* pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat kualitas BMT sangat baik. Semakin rendah nilai *loan to assets ratio* menunjukkan bahwa kemampuan BMT untuk memenuhi permintaan pinjaman dari nasabah semakin tinggi. Hal ini disebabkan permintaan pinjaman dari nasabah lebih kecil dibandingkan dengan total assets yang dimiliki oleh BMT Amanah Banjarmasin.

Analisa rasio *solvabilitas* bertujuan untuk menilai atau mengukur kemampuan BMT Amanah Banjarmasin dalam memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Primary Ratio*, *Capital Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

Adapun hasil penelitian kinerja keuangan berdasarkan *Primary Ratio* untuk tahun 2017–2018 pada BMT Amanah Banjarmasin dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis *Primary Ratio*

Tahun	Primary Ratio	Standar BI	Kriteria Penilaian
2017	17.28%	>14.50%	Sangat Baik
2018	19.73%	>14.50%	Sangat Baik
Rerata	18,50	>14.50%	Sangat Baik

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan hasil analisa *primary ratio* di tahun 2017, 2018 dan rata-rata pertahun menunjukkan bahwa *primary ratio* masuk kategori sangat baik. Pada tahun 2017 *primary ratio* sebesar 0,1728 atau 17.28% yang berarti bahwa setiap Rp.1 dari asset dijamin oleh *equity capital* sebesar Rp.0,1728. Sedangkan pada tahun 2018 *primary ratio* mengalami kenaikan menjadi 0,1973 atau 19.73% yang berarti setiap Rp.1 dari asset dijamin oleh *equity capital* sebesar Rp.0,1973. Kenaikan *primary ratio* pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat modal BMT sangat baik. Semakin tinggi *primary ratio* menunjukkan bahwa kemampuan modal BMT Amanah Banjarmasin untuk menutup penurunan assetnya akibat berbagai kerugian yang tidak dapat dihindarkan semakin baik.

Adapun hasil penelitian kinerja keuangan berdasarkan *Capital Ratio* untuk tahun 2017–2018 pada BMT Amanah Banjarmasin dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Analisis *Capital Ratio*

Tahun	Capital Ratio	Standar BI	Kriteria Penilaian
2017	25.09%	<51%	Tidak Baik
2018	27.18%	<51%	Tidak Baik
Rerata	26,49%	<51%	Tidak Baik

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan hasil analisa *capital ratio* di tahun 2017, 2018 dan rata-rata pertahun menunjukkan bahwa *capital ratio* masuk kategori tidak baik. Pada tahun 2017 *capital ratio* sebesar 0,2509 atau 25.09% yang berarti bahwa setiap Rp.1 dari pinjaman dijamin oleh *equity capital* sebesar Rp.0,2509. Sedangkan pada tahun 2018 *capital ratio* mengalami kenaikan menjadi 0,2718 atau 27.18% yang berarti setiap Rp.1 dari pinjaman dijamin oleh *equity capital* sebesar Rp.0,2718. Kenaikan *capital ratio* pada tahun 2018 belum menunjukkan perbaikan *solvabilitas* BMT karena masih dalam kategori tidak baik. Semakin rendah *capital ratio* menunjukkan bahwa kemampuan BMT Amanah Banjarmasin untuk menutup kredit atau pinjaman usaha masih rendah.

Adapun hasil penelitian kinerja keuangan berdasarkan *Capital Adequacy Ratio* untuk tahun 2017–2018 pada BMT Amanah Banjarmasin dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis *Capital Adequacy Ratio*

Tahun	Capital Adequacy Ratio	Standar BI	Kriteria Penilaian
2017	25.09%	>20%	Sangat Baik
2018	27.18%	>20%	Sangat Baik
Rerata	26,49%	>20%	Sangat Baik

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan hasil analisa *capital adequacy ratio* (CAR) di tahun 2017, 2018 dan rata-rata pertahun menunjukkan bahwa *capital adequacy ratio* masuk kategori sangat baik. Pada tahun 2017 sebesar 0,2509 atau 25.09% yang berarti bahwa setiap Rp.1 dari pembiayaan dan surat-surat berharga dijamin oleh modal sebesar Rp.0,2509. Sedangkan pada tahun 2018 *capital adequacy ratio* mengalami kenaikan menjadi 0,2718 atau 27.18% yang berarti setiap Rp.1 dari pembiayaan dan surat-surat berharga dijamin oleh modal sebesar Rp.0,2718. Kenaikan *capital adequacy ratio* pada tahun 2018 menunjukkan bahwa *solvabilitas* BMT semakin baik. Semakin tinggi *capital adequacy ratio* menunjukkan bahwa kemampuan modal BMT Amanah Banjarmasin untuk menjamin pembiayaan dan surat-surat berharga semakin baik.

Analisa rasio *rentabilitas* bertujuan untuk menilai atau mengukur kemampuan BMT Amanah Banjarmasin dalam menghasilkan keuntungan (laba) selama periode tertentu. Analisis rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)* dan *Gross Profit Margin (GPM)*.

Adapun hasil penelitian kinerja keuangan berdasarkan *Return on Assets* untuk tahun 2017–2018 pada BMT Amanah Banjarmasin dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Analisis *Return on Asset*

Tahun	Return on Asset	Standar BI	Kriteria Penilaian
2017	3.04%	≥1.215%	Sangat Baik
2018	7,35%	≥1.215%	Sangat Baik
Rerata	5,20%	≥1.215%	Sangat Baik

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan hasil analisa *return on assets* (ROA) di tahun 2017, 2018 dan rata-rata pertahun menunjukkan bahwa *return on assets* masuk kategori sangat baik. Pada tahun 2017 sebesar 0,0304 atau 3.04% yang berarti bahwa setiap Rp.1 dari asset menghasilkan laba sebesar Rp.0,0304. Sedangkan pada tahun 2018 *return on assets* mengalami kenaikan menjadi 0,0735 atau 7.35% yang berarti setiap Rp.1 dari asset menghasilkan laba sebesar Rp.0,0735. Kenaikan *return on assets* pada tahun 2018 menunjukkan bahwa *rentabilitas* BMT semakin baik. Semakin tinggi *return on assets* menunjukkan bahwa kemampuan BMT Amanah Banjarmasin dalam menghasilkan laba dan menggunakan assetnya sangat baik.

Adapun hasil penelitian kinerja keuangan berdasarkan *Return on Equity* untuk tahun 2017–2018 pada BMT Amanah Banjarmasin dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Analisis *Return on Equity*

Tahun	Return on Equity	Standar BI	Kriteria Penilaian
2017	18.51%	≥1.215%	Sangat Baik
2018	38.57%	≥1.215%	Sangat Baik
Rerata	28,54%	≥1.215%	Sangat Baik

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan hasil analisa *return on equity* (ROE) di tahun 2017, 2018 dan rata-rata pertahun menunjukkan bahwa *return on equity* masuk kategori sangat baik. Pada tahun 2017 sebesar 0,1851 atau 18.51% yang berarti bahwa setiap Rp.1 dari modal menghasilkan laba sebesar Rp.0,1851. Sedangkan pada tahun 2018 *return on equity* mengalami kenaikan menjadi 0,3857 atau 38.57% yang berarti setiap Rp.1 dari modal menghasilkan laba sebesar Rp.0,3857. Kenaikan *return on equity* pada tahun 2018 menunjukkan bahwa *rentabilitas* BMT semakin baik. Semakin tinggi *return on equity* menunjukkan bahwa kemampuan BMT Amanah Banjarmasin dalam menghasilkan laba dan menggunakan modalnya sangat baik.

Adapun hasil penelitian kinerja keuangan berdasarkan *Gross Profit Margin* untuk tahun 2017–2018 pada BMT Amanah Banjarmasin dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Analisis *Gross Profit Margin*

Tahun	Gross Profit Margin	Standar BI	Kriteria Penilaian
2017	13.77%	>1.22%	Sangat Baik
2018	102.02%	>1.22%	Sangat Baik
Rerata	57,90%	>1.22%	Sangat Baik

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan hasil analisa *gross profit margin* (GPM) di tahun 2017, 2018 dan rata-rata pertahun menunjukkan bahwa *gross profit margin* masuk kategori sangat baik. Pada tahun 2017 sebesar 0,1377 atau 13.77% yang berarti bahwa setiap Rp.1 dari pendapatan operasi yang dikeluarkan BMT mampu menghasilkan laba kotor sebesar Rp.0,1377. Sedangkan pada tahun 2018 *gross profit margin* mengalami kenaikan menjadi 1,0202 atau 102.02% yang berarti setiap Rp.1 dari modal menghasilkan laba kotor sebesar Rp.1,0202.

Kenaikan *gross profit margin* pada tahun 2018 menunjukkan bahwa *rentabilitas* BMT semakin baik. Semakin tinggi *gross profit margin* menunjukkan bahwa kemampuan BMT Amanah Banjarmasin menghasilkan laba kotor dari operasional usahanya sangat baik. Analisa rasio efisiensi bertujuan untuk menilai atau mengukur kinerja manajemen BMT Amanah Banjarmasin dalam menggunakan semua faktor produksinya secara tepatguna dan berhasil guna (efisien dan efektif). Analisis rasio efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cost of Efficiency 1 (CE1)* dan *Cost of Efficiency 2 (CE2)*.

Adapun hasil penelitian kinerja keuangan berdasarkan *Assets Utilities Ratio/Cost of Efficiency 1 (CE1)* untuk tahun 2017–2018 pada BMT Amanah Banjarmasin dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Analisis *Cost of Efficiency 1 (CE1)*

Tahun	Cost of Efficiency 1 (CE1)	Standar BI	Kriteria Penilaian
2017	25.13%	<93.52%	Sangat Baik
2018	28.32%	<93.52%	Sangat Baik
Rerata	26,73%	<93.52%	Sangat Baik

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan hasil analisa *cost of efficiency 1 (CE1)* di tahun 2017, 2018 dan rata-rata pertahun menunjukkan bahwa *cost of efficiency 1* masuk kategori sangat baik. Pada tahun 2017 sebesar 0,2513 atau 25.13% yang berarti bahwa setiap Rp.1 dari *total assets* dapat menghasilkan *income* sebesar Rp.0,2513. Sedangkan pada tahun 2018 *cost of efficiency 1*

mengalami kenaikan menjadi 0,2832 atau 28.32% yang berarti setiap Rp.1 dari *total assets* menghasilkan *income* sebesar Rp.0,2832.

Kenaikan *cost of efficiency 1* pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi semakin baik. Semakin tinggi *cost of efficiency 1* menunjukkan kemampuan BMT Amanah Banjarmasin dalam memanfaatkan asetnya untuk meningkatkan pendapatan sangat baik.

Adapun hasil penelitian kinerja keuangan berdasarkan *Operating Ratio/Cost of Efficiency 2 (CE2)* untuk tahun 2017-2018 pada BMT Amanah Banjarmasin dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Analisis *Cost of Efficiency 2 (CE2)*

Tahun	Cost of Efficiency 2 (CE2)	Standar BI	Kriteria Penilaian
2017	87.89%	76% - 93%	Baik
2018	69.13%	≤75%	Sangat Baik
Rerata	78,51%	76% - 93%	Baik

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan hasil analisa *cost of efficiency 2 (CE2)* di tahun 2017 dan rata-rata pertahun menunjukkan kategori baik dan sedangkan pada tahun 2018 menunjukkan kategori sangat baik. Pada tahun 2017 sebesar 0,8789 atau 87.89% yang berarti bahwa setiap Rp.1 dari pendapatan operasi yang diterima memerlukan biaya operasi dan non operasi sebesar Rp.0,8789. Sedangkan pada tahun 2018 *cost of efficiency 2* mengalami penurunan menjadi 0,6913 atau 69.13% yang berarti bahwa setiap Rp.1 pendapatan operasi yang diterima memerlukan biaya operasi dan non operasi sebesar Rp.0,6913.

Semakin tinggi *cost of efficiency 2* pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi BMT semakin rendah. Semakin terendah *cost of efficiency 2* menunjukkan bahwa kemampuan BMT Amanah Banjarmasin dalam menekan biaya operasional dan non operasional dalam menghasilkan pendapatan operasional semakin baik.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan data dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain: (1) Kinerja keuangan BMT Amanah Banjarmasin tahun 2017-2018 dilihat dari rasio likuiditas untuk Quick Ratio masuk kategori tidak baik karena <14% (standar BI), dan Banking Ratio masuk kategori sangat baik karena <94.75% dan Loan to Assets Ratio masuk kategori sangat baik karena <93.75%. Jika dilihat secara keseluruhan rasio likuiditas BMT Amanah Banjarmasin masuk kategori Baik. (2). Kinerja keuangan BMT Amanah Banjarmasin tahun 2017-2018 dilihat dari rasio solvabilitas untuk Primary Ratio masuk kategori sangat baik karena >14.5% (standar BI), dan Capital Ratio masuk kategori tidak baik karena <51% dan Capital Adequacy Ratio masuk kategori sangat baik karena < >20%. Jika dilihat secara keseluruhan rasio solvabilitas BMT Amanah

Banjarmasin masuk kategori Baik. (3). Kinerja keuangan BMT Amanah Banjarmasin tahun 2017-2018 dilihat dari rasio rentabilitas untuk Return On Assets masuk ategori sangat baik karena $\geq 1.215\%$ (standar BI), dan Return OnEquity masuk kategori sangat baik karena $\geq 1.215\%$ dan Gross Profit Margin masuk kategori sangat baik karena $> 1.22\%$. Jika dilihat secara keseluruhan rasio likuiditas BMT Amanah Banjarmasin masuk kategori Sangat Baik. (4). Kinerja keuangan BMT Amanah Banjarmasin tahun 2017-2018 dilihat dari rasio efisiensi untuk cost of efficiency 1 masuk ategori sangat baik karena $< 93.52\%$ (standar BI), dan cost of efficiency 2 tahun 2017 masuk kategori berada pada kisaran $77\%-93\%$ (standar BI) dan pada tahun 2018 berada dalam kategori sangat baik karena $\leq 75\%$. Jika dilihat secara keseluruhan rasio likuiditas BMT Amanah Banjarmasin masuk kategori Sangat Baik.

Penelitian ini menggambarkan kondisi keuangan BMT Amanah secara keseluruhan adalah baik dan memiliki prospek yang cerah buat nasabah. Penelitian ini memiliki keterbatasan sampel yang hanya dua periode pembukuan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel penelitian dan variabel-variabel yang diteliti untuk menambah perbendaharaan penelitian. Selamat meneliti buat menghasilkan karya yang lebih baik.

PUSTAKA ACUAN

- Affandi, Pandi. (2014). "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengukur Kesehatan Keuangan Koperasi kSU BMT Arafah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang". Jurnal Among Makarti. 7 (13). Juli 2014.
- Dariansyah, Dedy. (2018). "Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsoliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial". Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 11 (2). 2018: 395 - 408.
- Harahap, SS. (2007). "Analisis Kritis Laporan Keuangan," Gramedia Persada, Jakarta.
- Kaur, Savtri. (2016). "Ratio Analysis", Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR). 2 (12). 2016. ISSN: 2454-1362, <http://www.onlinejournal.in>
- Khairiyah, dkk. (2016). "Financial Ratio Analysis for Increasing the Financial Performance of the Company at Bank Bukopin". International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) 29 (2). 231-236
- Kountur, R. (2009). Metode Penelitian. Edisi Revisi. Jakarta: Buana Printing
- Kusumo, Wilyanto Kusuo. (2002). "Analisis Rasio-Rasio Keuangan Sebagai Indikator Dalam Memprediksi Kebangkrutan Perbankan Di Indonesia. Tesis. Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Martono. (2002). "Bank dan Lembaga Keuangan Lain". Ekonosia. Yogyakarta.
- Maccfoedz, Mas'ud. (1989). "Akuntansi Manajemen". Edisi 4. BPFE. Yogyakarta.
- Mirdhani, L.P. (2014) "Analisis Rasio Camel Untuk Menilai Kesehatan Bank pada Perusahaan LQ-45 Di BEI". Jurnal Ilmu & Riset Manajemen. 3 (5).
- Mudayawanah, dkk. (2018) "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan

- Perusahaan (Studi pada Bank Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Unibraw, Malang. 54 (1)
- Nuh, Muhammad. (2005) "Accounting Principless". Edisi 1. Penerbit Fajar. Jakarta
- Nuhu, Mohammed. (2011). "Role of Ratio Analysis in Business Decisions: A Case Study NBC Maiduguri Plant". *Journal of Educational and Social Research* MCSER Publishing. Rome-Italy. 4 (5).
- Nurhasanah, Siti. (2018) "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat". *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, UIN Syarif Hidayatullah, 11 (2). 327 - 348.
- Nurlatifah & Sepky Mardian. (2016). "Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia". *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 9 (1).
- Pangemanan, dkk. (2017). "Analisis Rasio Likuiditas, Leverage Dan Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Central Asia, Tbk.Cabang Manado" *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2). 25-34.
- Parathon, dkk. (2018). "Analisis Rasio Keuangan Perbankan Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan Bank (Studi Kasus PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Surabaya periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. 54 (1).
- Rahmadaniar, dkk. (2013). "Analisis Rasio Keuangan Perbankan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Bank (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. yang Listing Di BEI Untuk Periode Tahun 2009- 2011)". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 1 (1).
- Riyanto, Bambang. (1995). "Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan". Edisi 4. BPFE. Yogyakarta.
- Rusdiana, AS. (2018). "Efisiensi Dan Stabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia". *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*. 11 (2). 203 - 222.
- Sawir, Agnes. (2005)."Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan". Gramedia Pustaka utama. Jakarta.
- Simagungsong, MP (1995). "Pelajaran Akuntansi Dasar Dua". Edisi 10. Karya Utama. Jakarta.
- Soemarso, SR. (2004). "Akuntansi. Suatu Pengantar". Esisi 5. Salemba Empat. Jakarta.
- Sudana, IM. (2011). "Manajemen Keuangan Perusahaan: Teori dan Praktek". Erlangga. Jakarta.
- Sugiyono, Prof. Dr. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafriil. (2018)."Pengaruh Operating Incme, Net Income dan Total Assets Terhadap Return On Assets Pada BMT Amanah Banjarmasin". *Jurnal Al Amwal*. STEI Iqra Annisa. 7 (1). 32-43. Pekanbaru.
- Syofyan, Andriyani. (2017). "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Metode CAMEL". *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2 (2).

- Widaryanti. (2014) "Analisis Kinerja Keuangan Dan Pengelolaan Internal BMT (Studi Kasus Pada BMT-BMT Di Kota Semarang)". Jurnal Ekonomi & Bisnis. UNISNU Jepara. 11 (1).
- Yuliadi & Yusran, RR (2018) "Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas Dan Aktivitas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di BEI" *ECONOMICA* Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat. 7(1). 64-71.

Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri: Sebelum Dan Sesudah Penerapan *Good Corporate Governance*

Sabirin

Institut Agama Islam Negeri Pontianak
sabirin_bisa@yahoo.com

Abstract

This research aims to determine the Financial Performance Assessment Before and After Implementation of Good Corporate Governance (GCG) seen from the ratio (1) Liquidity, (2) Profitability, and (3) Capital. The research method is quantitative research with a comparative approach. The ratio used to measure the financial performance of Bank Syariah Mandiri Tbk consists of the ratio of FDR, ROA, ROE, and CAR. The data analysis technique used is the data Normality and the Mann-Whitney test. The results of this study based on the normality test show that the data are normally distributed. The Mann-Whitney test results show that (1) after implementing GCG, liquidity ratio has satisfactory performance assessment compared to before the implementation of GCG. (2) After implementing GCG, profitability ratio has satisfactory performance assessment compared to before the implementation of GCG. (3) After implementing GCG, the capital ratio has a satisfactory performance assessment compared to before the implementation of GCG.

Keywords: Good Corporate Governance, Liquidity, Profitability, Capital

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penilaian Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilihat dari rasio (1) Likuiditas, (2) Profitabilitas, dan (3) Modal. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri Tbk terdiri dari rasio FDR, ROA, ROE, dan CAR. Teknik Analisis data menggunakan uji Normalitas data dan uji Mann-Whitney. Hasil penelitian ini berdasarkan uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji Mann-Whitney menunjukkan (1) Sesudah penerapan GCG, rasio likuiditas memiliki penilaian kinerja yang memuaskan dibandingkan dengan sebelum diterapkannya GCG. (2) Sebelum penerapan GCG, rasio profitabilitas memiliki penilaian kinerja yang memuaskan dibandingkan dengan sebelum diterapkannya GCG. (3) Sesudah penerapan GCG, rasio modal memiliki penilaian kinerja yang memuaskan dibandingkan dengan sebelum diterapkannya GCG.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Likuiditas, Profitabilitas, Permodalan

PENDAHULUAN

Kinerja adalah pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan suatu metode atau pendekatan. Pengukuran kinerja perusahaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran kinerja non keuangan (*nonfinancial performance measurement*) dan pengukuran kinerja keuangan (*financial performance measurement*). (Morse dan Davis, 1996 dalam Tugiman, 2000; Hirsch, 1994 dalam Pratolo, 2007).

Salah satu dasar penilaian prestasi suatu perusahaan disektor keuangan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nilai perusahaan merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan. Tujuan dari menganalisis laporan keuangan perusahaan, yaitu untuk menilai atau mengevaluasi suatu kinerja khususnya manajemen perusahaan dalam suatu periode akuntansi, serta menentukan strategi apa yang harus diterapkan pada periode berikutnya jika tujuan perusahaan sebelumnya telah tercapai. *Good Corporate Governance* merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *stakeholders value* (Lastanti, 2005: dalam Ramadhani, 2008). Penilaian tingkat kesehatan bank dengan cakupan penilaian atas *Good Corporate Governance* telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 pasal 6 ayat 1. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung dengan regulasi yang baik, diharapkan akan mencegah berbagai bentuk ketidakjujuran dalam penyajian laporan keuangan.

Menurut Kurniaty (2008) menyatakan bahwa GCG memiliki prinsip-prinsip yaitu keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan informasi, dan kemandirian. Moeljono (2005, dalam Adib 2012) menyatakan bahwa terdapat lima karakteristik GCG yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas laba dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang berlandaskan peraturan, undang-undang dan norma yang berlaku (Trinanda dan Mukodim, 2010).

Perusahaan yang telah menerapkan *Good Corporate Governance*, seharusnya telah memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang telah menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya. Klapper dan Love (2002, dalam Hidayah, 2008) menemukan bukti bahwa *Good Corporate Governance* yang lebih baik mempunyai hubungan yang tinggi dengan kinerja perusahaan.

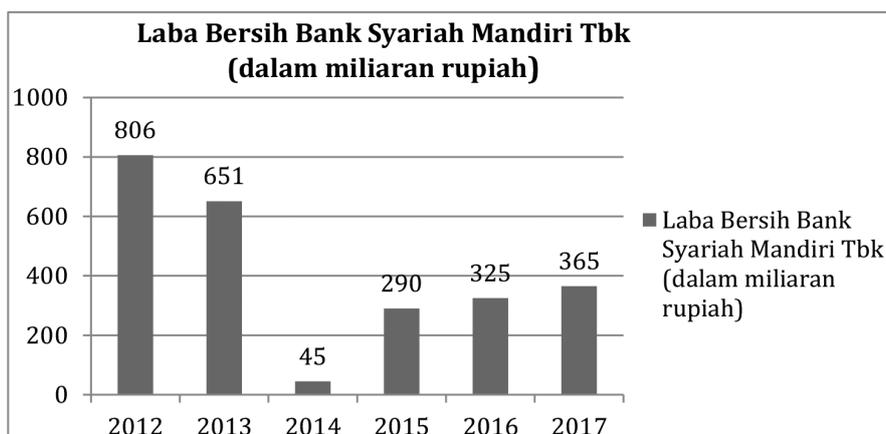
Hasil pembahasan Deni, dkk (2005, dalam Hidayah, 2008) menemukan bukti adanya hubungan yang positif dan signifikan antara *Good Corporate Governance* dan kinerja perusahaan. Waggle dan Don (2001, dalam Hidayah, 2008) menyatakan bahwa

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan alat yang signifikan dalam memprediksi kesuksesan suatu perusahaan disamping beberapa faktor *financial* lainnya. Hasil pembahasan yang dilakukan oleh Hastuti (2005) menemukan hasil bahwa konsep *Good Corporate Governance* dapat menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Pengelolaan perusahaan harus menerapkan pilar-pilar *Good Corporate Governance* yang salah satu pilarnya adalah transparansi. Hasil pembahasan Trinada dan Mukodim (2010) menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* yang baik akan mengakibatkan kinerja keuangan perusahaan menjadi baik. Pratolo (2007) membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh langsung signifikan secara parsial terhadap kinerja perusahaan. Pembahasan yang dilakukan oleh Ristifani (2009) menunjukkan hubungan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan mempunyai hubungan searah yang sangat kuat.

Bank Syariah Mandiri Tbk sebagai salah satu lembaga keuangan syariah berkomitmen penuh melaksanakan *Good Corporate Governance* sejak tahun 2012 di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang terkait. Bank Syariah Mandiri Tbk menjadikan *GCG* sebagai unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi semakin meningkat (syariahamandiri.co.id).

Penerapan *GCG* secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan dan memaksimalkan nilai perusahaan. Sehingga BSM memiliki prestasi dengan mendapatkan penghargaan, penghargaan yang diraih oleh BSM tentunya tidak terlepas dari penilaian serta bentuk manajemen yang dilakukan secara baik dan benar oleh bank syariah mandiri. Penghargaan BSM diantaranya Penghargaan *The Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)* pada 19 Desember 2017, Bank Syariah Kinerja Terbaik Kategori Bank Syariah Buku 2-3 dengan Aset di atas Rp30 Triliun pada 6 Desember 2017, *Award for The Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)* pada 17 Desember 2015, Penghargaan untuk *Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)* pada 17 Desember 2014, *Platinum Trophy Award 2013* penghargaan atas kinerja keuangan perusahaan pada 22 Februari 2013, dan Penghargaan untuk *Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)* pada 12 Desember 2012 serta masih banyak penghargaan lainnya (syariahamandiri.co.id).

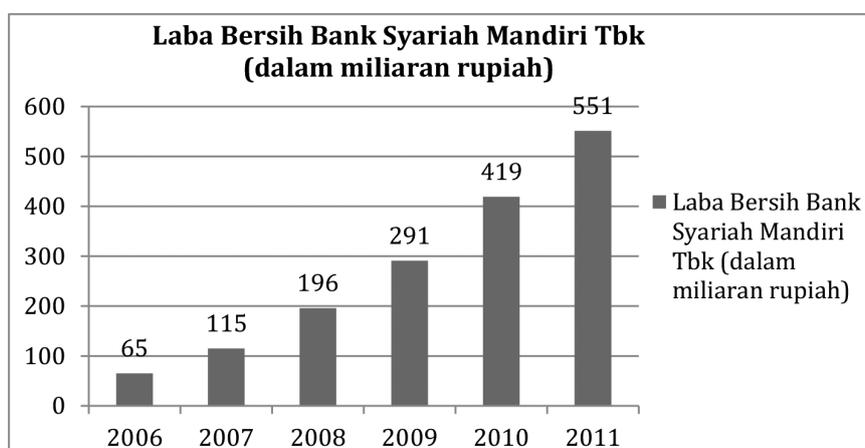
Pada tahun 2017, Bank Syariah Mandiri Tbk tetap menunjukkan kinerja dengan tumbuh positif sehingga Bank dapat terus berkontribusi membangun ekonomi negeri dan mengalirkan berkah bagi umat, Pertumbuhan pangsa pasar Bank Syariah Mandiri Tbk tersebut mencakup sisi aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan. *Market share aset* per akhir Desember 2017 sebesar 20,73%, Dana Pihak Ketiga 23,27% dan Pembiayaan 21,24%. Pertumbuhan pasar Bank Syariah Mandiri Tbk tidak sejalan dengan pertumbuhan perolehan laba bersih tahunannya. Berikut ini pertumbuhan laba bersih Bank Syariah Mandiri Tbk periode 2012-2017 yang ditunjukkan pada gambar 1.

Gambar 1 Laba Bersih Bank Syariah Mandiri Tbk (dalam miliaran rupiah)

Sumber: Laporan Keuangan BSM Tbk, Data olahan 2019

Gambar 1 menunjukkan bahwa laba bersih tahun 2017 kurang memuaskan. Terlihat bahwa laba bersih 2012 naik sebesar 46,27% menjadi 806 miliar, jika dibandingkan 2011 Rp 551 miliar. kemudian tahun 2013 turun sebesar 19,23%, menjadi 651 miliar, jika dibandingkan 2012 Rp 806 miliar. Selanjutnya di tahun 2014 turun lagi sebesar 93,08% menjadi 45 miliar dibandingkan 2013 Rp 651 miliar. Berikutnya laba bersih BSM mulai beranjak naik di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Namun besarnya laba bersih yang diperoleh pada tahun tersebut tidak sebanding dengan laba bersih ditahun 2012 dan 2013. Terlihat bahwa laba bersih 2015 naik senilai 54,4% menjadi 290 miliar dibandingkan 2014 Rp 45 miliar, di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 naik senilai 25,86% menjadi 365 miliar dibandingkan 2015 Rp 290 miliar.

Jika dibandingkan dengan perkembangan laba bersih Bank Syariah Mandiri Tbk periode 2006-2011, maka terlihat terjadi perbedaan kinerja Bank Syariah Mandiri Tbk yang sangat signifikan, ditunjukkan pada gambar 2.

Gambar 2 Laba Bersih Bank Syariah Mandiri Tbk (dalam miliaran rupiah)

Sumber: Laporan Keuangan BSM Tbk, Data olahan 2019

Berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa kinerja PT Bank Mandiri Syariah Tbk periode 2006-2011 terbilang memuaskan. Terlihat bahwa perolehan laba bersih tahun 2007 sebesar 76,92% menjadi Rp 115 Miliar, jika dibandingkan tahun 2006 Rp 65 Miliar. Kemudian pada tahun 2008 laba bersih naik sebesar 70,43% menjadi Rp 196 miliar, jika dibandingkan tahun 2007 Rp 115 miliar. Kemudian tahun di tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 naik 89,34% menjadi 551 miliar, dibandingkan tahun 2009 Rp 291 miliar.

Berdasarkan kedua data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja PT Bank Mandiri Syariah Tbk sedikit mengalami penurunan yang terindikasi dari perolehan laba bersih sebelum diterapkannya GCG dan sesudah diterapkannya GCG. Penurunan kinerja PT Bank Mandiri Syariah Tbk menjadi hal menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait dengan apakah terjadi penurunan kinerja operasional PT Bank Mandiri Syariah Tbk selama ini dari sisi likuiditas, profitabilitas, dan modal perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan penilaian kinerja PT Bank Mandiri Syariah Tbk sebelum diterapkannya GCG dan sesudah diterapkannya GCG dengan pendekatan analisis rasio likuiditas, profitabilitas dan rasio permodalan. Selain itu GCG menjadi tema yang menarik dilingkungan keuangan bisnis islam, karena tuntutan pelaksanaan operasional bisnis yang harus sehat. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya selain pada objek penelitian juga pada rasio yang digunakan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian ini berusaha menjelaskan ada atau tidaknya perbedaan kinerja keuangan pada Bank Syariah Mandiri yang diukur dengan menggunakan rasio *FDR*, *ROA*, *ROE*, dan *CAR*.

Objek penelitian dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Sumber data penelitian berupa laporan keuangan bank yang dipublikasikan dari tahun sebelum penerapan GCG 2006-2011 dan sesudah penerapan GCG 2012-2017 yang diakses dari situs resmi (www.syariahmandiri.co.id). Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Syariah Mandiri Tbk sebelum dan sesudah penerapan GCG. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *non probability sampling*.

Metode analisis data yang digunakan adalah uji normalitas dan uji Mann-Whitney. Untuk menguji data yang berdistribusi normal, dalam penelitian ini digunakan alat uji normalitas *kolmogrov-Smirnov*. Sementara itu, uji Mann-Whitney digunakan untuk membandingkan mean dari dua sampel yang berhubungan atau dua populasi yang saling independen (Suyanto, 2017). Maksudnya adalah sebuah sampel tetapi mengalami dua perlakuan yang berbeda, dimana dalam penelitian ini berupa data rasio keuangan sebelum dan sesudah penerapan GCG dari BSM. Pedoman pengambilan keputusan dengan Uji Mann-Whitney dapat dilihat berdasarkan probability:

- a. Jika $Sig > 0,05$ maka H_0 ditolak
- b. Jika $Sig < 0,05$ maka H_0 diterima

Dari pedoman tersebut, perumusan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0: \mu_1 \neq \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 = \mu_2$$

Keterangan:

μ_1 = kinerja keuangan bank syariah mandiri sebelum penerapan GCG

μ_2 = kinerja keuangan bank syariah mandiri setelah penerapan GCG

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel berikut ini menunjukkan kinerja Bank Syariah Mandiri Tbk Sebelum dan Setelah Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG):

Tabel 1. Kinerja Bank Syariah Mandiri Tbk Sebelum dan Setelah Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Periode		FDR (%)	ROA (%)	ROE (%)	CAR (%)
Sebelum penerapan GCG	2006	90.21	1.10	10.23	12.56
	2007	92.96	1.53	16.05	12.43
	2008	89.12	1.83	21.34	12.66
	2009	83.07	2.23	21.40	12.39
	2010	82.54	2.21	25.05	10.60
Sesudah penerapan GCG	2011	86.03	1.95	24.24	14.57
	2012	94.4	2.25	25.05	13.82
	2013	89.37	1.52	15,34	14.10
	2014	82.13	-0.03	-3	14.12
	2015	81.99	0.56	5.92	12.85
	2016	79.19	0.59	5.81	14.01
	2017	77.66	0.59	5.72	15.89

Sumber: Laporan Keuangan, Data olahan 2019

Data pada tabel 1 menunjukkan rata-rata kinerja likuiditas Bank Syariah Mandiri pada tahun 2006-2011 masih dalam kategori cukup memuaskan. Terlihat bahwa rasio FDR tahun 2006-2008 memiliki kategori cukup baik, karena masuk dalam standar BI yakni 85%-100%. Kemudian pada tahun 2009-2010 rasio FDR masuk kategori baik, karena masuk dalam standar BI yakni 75%-85%. Kemudian pada tahun 2011 rasio FDR mengalami penurunan kategori menjadi cukup baik, karena masuk dalam standar BI yakni 85%-100%. Sementara itu, pada tahun 2012-2017 rata-rata kinerja likuiditas Bank Syariah Mandiri Tbk masih dalam kategori memuaskan. Terlihat bahwa rasio FDR pada tahun 2012-2013 memiliki kategori cukup baik, karena masuk dalam standar BI yakni 85%-100%. Kemudian pada tahun 2014-2017 rasio FDR memiliki kategori baik, karena masuk dalam standar BI yakni 75%-85%.

Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tbk pada tahun 2006-2011 masih dalam kategori memuaskan. Terlihat bahwa rasio ROA tahun 2006 memiliki kategori cukup baik karena masuk dalam standar BI yakni 0,5%-1,25%. Kemudian tahun 2007-2011 rasio ROA memiliki kategori yang sangat baik, karena masuk dalam standar BI yakni diatas 1,5%. Begitu pula pada tahun 2012-2017, rata-rata kinerja profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tbk masih dalam kategori cukup memuaskan. Terlihat bahwa rasio ROA pada tahun 2012-2013 memiliki kategori sangat baik, karena masuk dalam standar BI yakni diatas 1,5%. Kemudian pada tahun 2014 rasio ROA mengalami penurunan kategori menjadi kurang baik karena masuk dalam standar BI yakni 0%-0,5%. Kemudian pada tahun 2015-2017 rasio ROA mengalami peningkatan kategori menjadi cukup baik karena masuk dalam standar BI yakni 0,5%-1,25%.

Menggunakan rasio Return on Equity (ROE) juga menunjukkan bahwa rata-rata kinerja profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tbk pada tahun 2006-2011 masih dalam kategori memuaskan. Terlihat bahwa rasio ROE pada tahun 2006 memiliki kategori cukup baik karena masuk dalam standar BI yakni 5%-12,5%. Kemudian pada tahun 2007-2011 rasio ROE memiliki kategori sangat baik, karena masuk dalam standar BI yakni diatas 15%. Untuk periode 2012-2017 menunjukkan rata-rata kinerja profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tbk masih dalam kategori cukup memuaskan. Terlihat bahwa rasio ROE pada tahun 2012-2013 memiliki kategori sangat baik karena masuk dalam standar BI yakni diatas 15%. Kemudian pada tahun 2014 rasio ROE memiliki kategori kurang baik karena masuk dalam standar BI yakni 0%-5%. Kemudian pada tahun 2015-2017 rasio ROE memiliki kategori cukup baik karena masuk dalam standar BI yakni 5%-12,5%.

Sementara itu, kinerja permodalan Bank Syariah Mandiri Tbk diukur menggunakan rasio CAR. Berdasarkan data yang ada, diperoleh hasil bahwa rata-rata kinerja permodalan Bank Syariah Mandiri Tbk pada tahun 2006-2011 masih dalam kategori memuaskan. Terlihat bahwa rasio CAR pada tahun 2006-2009 memiliki kategori sangat baik karena masuk dalam standar BI yakni diatas 12%. Kemudian pada tahun 2010 rasio CAR mengalami penurunan kategori menjadi kategori baik karena masuk dalam standar BI yakni berkisar 9%-12%. Kemudian pada tahun 2011 rasio CAR mengalami peningkatan kategori menjadi kategori sangat baik karena masuk dalam standar BI yakni diatas 12%. Untuk periode 2012-2017, rata-rata kinerja permodalan Bank Syariah Mandiri Tbk masih dalam kategori memuaskan. Terlihat bahwa rasio CAR pada tahun sesudah diterapkannya GCG yakni tahun 2012-201 rasio CAR memiliki kategori yang sangat baik karena masuk dalam standar BI yakni diatas 12%.

Data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Setelah dilakukan uji normalitas data, selanjutnya dilakukan uji *Mann-Whitney*. Berikut ini adalah hasil uji *Mann-Whitney*:

Tabel 2. Hasil Uji *Mann-Whitney*

Test Statistics ^a	FDR (%)	ROA (%)	ROE (%)	CAR (%)
Mann-Whitney U	10.000	7.000	11.500	5.000
Wilcoxon W	31.000	28.000	32.500	26.000
Z	-1.281	-1.764	-1.043	-2.082
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200	.078	.297	.037
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.240 ^b	.093 ^b	.310 ^b	.041 ^b

a. Grouping Variable: GCG

b. Not corrected for ties.

Sumber: Laporan Keuangan, Data olahan 2019

Berdasarkan hasil pada tabel 2, diperoleh hasil nilai uji Mann-Whitney U untuk kinerja likuiditas sebesar 10.000, nilai Z -1.281, dan nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa “H₀ ditolak”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan penilaian kinerja likuiditas yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan GCG pada Bank Syariah Mandiri. Karena tidak ada perbedaan penilaian yang signifikan, berarti tidak ada perbedaan penilaian kinerja likuiditas BSM sebelum dan sesudah penerapan GCG.

Selanjutnya, nilai uji Mann-Whitney U untuk kinerja profitabilitas dengan rasio ROA sebesar 7.000, nilai Z -1.764, dan nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,078 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa “H₀ ditolak”, artinya bahwa tidak terdapat perbedaan penilaian kinerja profitabilitas ROA yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan GCG pada Bank Syariah Mandiri. Karena tidak ada perbedaan penilaian yang signifikan, maka rumusan masalah penelitianpun dapat terjawab yakni tidak ada perbedaan penilaian kinerja profitabilitas ROA BSM sebelum dan sesudah penerapan GCG. Sementara itu, menggunakan rasio ROE, diperoleh nilai uji Mann-Whitney U sebesar 11.500, nilai Z -1.043, dan nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,297 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan penilaian kinerja profitabilitas ROE yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan GCG pada Bank Syariah Mandiri. Karena tidak ada perbedaan penilaian yang signifikan, maka rumusan masalah penelitianpun dapat terjawab yakni tidak ada perbedaan penilaian kinerja profitabilitas ROE BSM sebelum dan sesudah penerapan GCG.

Kinerja permodalan yang ditunjukkan dengan rasio CAR memiliki nilai uji Mann-Whitney U sebesar 5.000, nilai Z -2.082, dan nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,037 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa “H₀ ditolak”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan penilaian kinerja permodalan yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan GCG pada Bank Syariah Mandiri. Karena tidak ada perbedaan penilaian yang signifikan, maka rumusan masalah penelitianpun dapat terjawab yakni tidak ada perbedaan penilaian kinerja permodalan BSM sebelum dan sesudah penerapan GCG.

Kinerja likuiditas Bank Syariah Mandiri Tbk Sebelum dan Setelah Penerapan Good Corporate Governance

Hasil uji Mann-Whitney sebesar 10.000, nilai Z -1.281, dan nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 maka H_0 ditolak. Artinya bahwa tidak terdapat perbedaan penilaian kinerja Likuiditas bank sebelum dan sesudah penerapan GCG pada Bank Syariah Mandiri. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan peningkatan kinerja likuiditas Bank Syariah Mandiri sebelum dan sesudah penerapan GCG tidak jauh berbeda, dibuktikan dengan range perubahan kinerja likuiditas masih dalam kategori standar yang sama yaitu pada kategori 85-100%.

Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian terhadap rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada rasio FDR sesudah diterapkannya GCG lebih memuaskan jika dibandingkan dengan sebelum diterapkannya GCG. Terlihat bahwa nilai rata-rata rasio FDR sebelum dan sesudah penerapan GCG memiliki kategori cukup baik karena masuk dalam standar Bank Indonesia yakni 85-100%. Hasil ini menunjukkan bahwa likuiditas Bank Syariah Mandiri lebih memuaskan setelah penerapan GCG dibandingkan dengan sebelum penerapan GCG. Hasil ini senada dengan penelitian Sari dan Pratomo (2014) yang menunjukkan bahwa pada rasio *FDR/LDR* sebelum dan *FDR/LDR* sesudah penerapan *Good Corporate Governance* tidak terdapat perbedaan yang cukup jauh antara *FDR* sebelum dan *FDR* sesudah penerapan GCG.

Sebagai salah satu Bank Syariah dengan nilai Aset tertinggi Bank Syariah Mandiri memang sudah berkomitmen dalam melaksanakan tata kelola yang baik, benar dan sesuai syariat, namun baru di tahun 2012 Bank Syariah Mandiri berkomitmen penuh dalam penerapannya. Hal ini terbukti dengan pencapaian dan penghargaan yang diperoleh BSM dalam hal tata kelola.

Penilaian Kinerja Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tbk Sebelum dan Setelah Penerapan Good Corporate Governance

Hasil uji Mann-Whitney pada kinerja profitabilitas ROA sebesar 7.000, nilai Z -1.764, dan nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,078 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 maka H_0 ditolak. Artinya bahwa tidak terdapat perbedaan penilaian kinerja Profitabilitas bank sebelum dan sesudah penerapan GCG pada Bank Syariah Mandiri Tbk. hal ini mengindikasikan bahwa perubahan peningkatan kinerja profitabilitas bank syariah mandiri Tbk sebelum dan sesudah penerapan GCG tidak jauh berbeda dibuktikan dengan range perubahan kinerja profitabilitas masih dalam kategori standar yang sama yakni 0,5-1,25%. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian terhadap rasio ROA yang memiliki nilai rata-rata rasio ROA sebelum dan sesudah penerapan penerapan GCG memiliki kategori cukup baik karena masuk dalam standar Bank Indonesia yakni 0,5-1,25%.

Jika dilihat dari kinerja profitabilitas ROE Hasil uji Mann-Whitney pada kinerja profitabilitas ROE sebesar 11.500, nilai Z -1.043, dan nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,297 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 maka H_0 ditolak. Artinya bahwa tidak terdapat perbedaan penilaian kinerja Profitabilitas bank sebelum dan sesudah penerapan GCG pada

Bank Syariah Mandiri Tbk. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan peningkatan kinerja profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tbk sebelum dan sesudah penerapan GCG tidak jauh berbeda dibuktikan dengan range perubahan kinerja profitabilitas masih dalam kategori standar yang sama yakni 0,5-1,25%. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian terhadap rasio ROE yang menunjukkan nilai rata-rata rasio ROE sebelum dan sesudah penerapan GCG memiliki kategori sangat baik karena masuk dalam standar Bank Indonesia yakni diatas 1,5%. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari (2009) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ROE sebelum dan ROE sesudah penerapan GCG di PT. Petrokimia Gresik tahun 2003-2005.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang cukup jauh Profitabilitas Bank Syariah Mandiri setelah penerapan GCG dibandingkan dengan sebelum penerapan GCG.

Penilaian Kinerja Permodalan Bank Syariah Mandiri Tbk Sebelum dan Setelah Penerapan Good Corporate Governance

Hasil uji Mann-Whitney pada kinerja permodalan sebesar 5.000, nilai Z -2.082, dan nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,037 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 maka H_0 diterima. Artinya bahwa terdapat perbedaan penilaian kinerja permodalan bank sebelum dan sesudah penerapan GCG pada Bank Syariah Mandiri Tbk. Hal ini mengindikasikan terjadinya perubahan peningkatan kinerja permodalan bank yang dibuktikan dengan range perubahan kinerja permodalan masih dalam kategori standar yang sama yakni pada kategori > 12%. Peningkatan nilai rata-rata permodalan bank sesudah penilaian penerapan GCG lebih tinggi pada tahun 2017 sebesar 14,14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2011 sebesar 12,53%.

Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata yang yang diperoleh kinerja permodalan sebelum dan sesudah penerapan GCG nilai rata-rata rasio CAR sebelum dan sesudah penerapan GCG memiliki kategori sangat baik karena masuk dalam standar Bank Indonesia yakni diatas 12%. Bank Syariah Mandiri dilihat dari Kinerja permodalan juga sudah berhasil mempertahankan kecukupan modal minimum yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 8 %.

Berdasarkan data hasil analisa kinerja permodalan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sesudah diterapkan GCG, kinerja permodalannya lebih memuaskan dibandingkan sebelum diterapkannya GCG. Penelitian ini di dukung dengan penelitian sebelumnya yakni Zamani dan Moeljadi (2012) berdasarkan hasil uji beda penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan GCG.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tiga kinerja keuangan yang menjadi alat analisis, baik sebelum dan setelah penerapan GCG, tidak terdapat perbedaan yang signifikan, hal ini disebabkan karena memang sebelum adanya aturan yang mewajibkan setiap perbankan untuk menerapkan GCG Bank Syariah Mandiri sudah secara sukarela menerapkannya, dan baru ditahun 2012,

Bank Syariah Mandiri berkomitmen penuh dalam penerapannya. Sehingga hasilnya pun berdampak dengan kinerja keuangan meningkat, salah satunya pada kinerja permodalan. Nilai rata-rata rasio CAR sebelum dan sesudah penerapan GCG memiliki kategori sangat baik yakni diatas 12% (standar Bank Indonesia). Nilai rata-rata permodalan bank sesudah penilaian penerapan GCG lebih tinggi pada tahun 2017 sebesar 14,14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2011 sebesar 12,53%.

Sementara untuk perbaikan kedepan Bank Syariah Mandiri sebaiknya mengalokasikan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan yang lebih efisien dan mengevaluasi efektifitas dana pihak ketiga yang diterima sehingga nilai rasio *FDR* semakin membaik lagi seiring dengan diterapkannya GCG. Bank Syariah Mandiri juga harus melakukan evaluasi terhadap objek investasi dengan resiko gagal bayar yang rendah. Bank Syariah Mandiri juga harus lebih efektif dalam belanja modal dan mengelola aktiva yang dimiliki. Melaksanakan operasional yang efektif dan efisien guna mempertahankan dan meningkatkan kemampuan permodalan, memaksimalkan modal yang diperoleh dari sumber selain bank sehingga dapat menekan peningkatan kewajiban guna membiayai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.

PUSTAKA ACUAN

- Chandra, dkk. (2016). "Analysis Of Financial Performance PT Bank Syariah Mandiri And PT Bank Mandiri Tbk With CAMEL Method", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vol 16 No. 02 Tahun 2016.
- Darsono. 2007. *Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis*. Jakarta: Diadit Media.
- Dwiridotjahjono, Jajok. 2010. Penerapan *Good Corporate Governance* Manfaat dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia.
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, Irham. 2012. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung. Alfabeta.
- Harjito, Agus, dkk. 2011. *Manajemen Keuangan Edisi Kedua*. Yogyakarta: Ekonesia
- Harmono. 2016. *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus dan Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2016. *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*. Jakarta. Kompas Gramedia.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2016. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta. Kompas Gramedia.
- Inayah Permata Sari dan Wahyu Ario Pratomo. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Bank Pemerintah Sebelum dan Sesudah Implementasi Penerapan kebijakan *Good Corporate Governance*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol.2 No.3.
- Kasmir, 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lusiana, 2012. *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*. Cetakan 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- M.Puadi, Yeni Fitriyani, dan Achmad Labib, 2018. *Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Syariah*. Wahana Islamika: *Jurnal Studi Keislaman* Vo, 1 . 4 No 1. 2018

- Meilani, Sayekti Endah Retno. 2015. Hubungan Penerapan *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Syariah Di Indonesia. Seminar Nasional dan The 2nd Call for Syariah Paper FEB UMS.
- Muhamad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Muhammad, 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwanto dan Fuad Yanuar, 2017. *Kontribusi Pembiayaan Yang Diberikan oleh Perbankan Syariah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2012-2016*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Iqtishadja Vol.4. No.2. 2017.
- Riyanto, Bambang. 2010. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Rukmana, Amir Machmud. 2010. *Bank Syariah*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sabirin, 2018. *Analisa Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index Dan Islamic Corporate Governance*. Jurnal Al-Maslahah, 2018
- Salim Darmadi, "Corporate Governance Disclosure In The Annual Report An Exploratory Study On Indonesian Islamic Banks", Humanomics, Vol. 29 No. 1, 2013 pp. 4-23 q Emerald Group Publishing Limited Tahun 2013.
- Salin, Agus. 2018. *Perbedaan kinerja keuangan perbankan sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate Governance (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Tbk.)*. Ekomadania Volume 1. Nomor 2. Januari 2018
- Sangadji, E.M., dan Sopiiah. (2010). *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V ANDI.
- Sofyan Harahap Syafri. 2006. *Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suyanto, M. 2006. *Pengaruh Pelaksanaan Prinsip Syariah terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Lingkungan Kegiatan Bank Syariah di Indonesia*. OPTIMAL, Vol. 4, No. 1.
- Yogy Oktavianto, Fransisca Yaningwati dan Zahroh Z A. 2014. *Penerapan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Pada Pt. Hm Sampoerna, Tbk Yang Listing Di Bei Periode 2010-2012)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)| Vol. 9 No. 2 April 2014
- Yunanto Adi Kusumo, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002 -2007 (dengan Pendekatan PBI No. 9/1/PBI/2007)", *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II, No. 1, (Juli 2008).
- Zamani dan Moeljadi. 2012. *Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Brawijaya. Vol. 1 No. 1.

Pengaruh Faktor Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Kompetensi, Dan Arogansi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Dian Fathma Alfina¹, Amrizal²

^{1,2}Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan
¹dian97fathma@gmail.com

Abstract

This study was to examine the influences of the fraud pentagon theory's factors towards the financial statement fraud on banking listed in BEI for the period of 2014-2018. This study consisted of nine independent variables. Four variables of pressure (financial stability, external pressure, financial targets, personal financial needs). Two variables of the opportunity (nature of industry, ineffectiveness of monitoring). And a variable of rationalization, competence, and arrogance. Based on the results of Beneish M-Model analysis, out of 43 banks, 28 of them were indicated to have manipulated their financial statements during the study period. Meanwhile, the results of logistic regression analysis showed a positive influence of financial stability (ACHANGE), personal financial needs (OSHIP), nature of the industry (RECEIVABLE), ineffective monitoring (IND), competence (DIRCHANGE), and arrogance (CEOPIC) on financial statement fraud, while external pressures (LEV), financial targets (ROA), and rationalization (AUDCHANGE) have a negative effect on financial statement fraud.

Keywords: fraud pentagon, financial statement fraud, banking financial statement fraud

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh faktor-faktor yang terdapat pada teori fraud pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018. Penelitian ini terdiri dari sembilan variabel bebas. Empat variabel dari elemen tekanan (stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, dan kebutuhan keuangan personal). Dua variabel dari elemen kesempatan (sifat industri, ketidak efektifan pengawasan). Serta variabel rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi. Berdasarkan hasil analisis Beneish M-Model, dari 45 perbankan yang terdaftar di BEI, 28 diantaranya terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan selama masa penelitian. Sementara itu, hasil analisis regresi logistik menunjukkan adanya pengaruh positif antara stabilitas keuangan (ACHANGE), kebutuhan keuangan personal (OSHIP), sifat industri (RECEIVABLE), ketidakefektifan pengawasan (IND), kompetensi (DIRCHANGE), dan arogansi (CEOPIC) terhadap kecurangan laporan keuangan, sementara tekanan eksternal (LEV), target keuangan (ROA), dan rasionalisasi (AUDCHANGE) memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kata Kunci: segi lima kecurangan, fraud pentagon, kecurangan pada perbankan

PENDAHULUAN

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mencatat secara global pada tahun 2012 terjadi fraud sebanyak 1.388 kasus, tahun 2014 sebanyak 1.483 kasus, kemudian tahun 2016 terjadi 2.410 kasus, dan 2018 terjadi sebanyak 2.690 kasus. Disamping itu, industri yang terpapar fraud tertinggi dari tahun ke tahunnya merupakan bank dan jasa keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah fraud setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, dan ini berarti masih banyak perusahaan yang mencoba untuk memanipulasi laporan keuangan yang dibuatnya (Sumber: <https://www.acfe.com>).

Dalam dunia perbankan, beberapa kasus kecurangan yang menarik perhatian masyarakat Indonesia juga pernah terjadi, diantaranya adalah pada tahun 2008, Bank Century mengalami kesulitan likuiditas karena nasabah besar Bank Century menarik dananya besar-besaran, sedangkan dana yang ada di bank tidak ada sehingga tidak mampu mengembalikan uang nasabah, dan sebanyak US\$56 juta dan surat-surat berharga valuta asing jatuh tempo dan gagal bayar. Karena permasalahan tak kunjung selesai Bank Century mulai menghadapi tuntutan ribuan investor Antaboga atas penggelapan dan investasi senilai Rp 1,38 triliun yang mengalir ke Robert Tantular, mantan bos bank tersebut.

Kasus selanjutnya, PT Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah masih terlilit kasus dugaan kredit fiktif yang merugikan perseroan senilai Rp548 miliar. Ternyata, kredit fiktif yang melibatkan Plt. Direktur Utama Yocie Gusman bukan satu-satunya kasus di perseroan. Berdasarkan laporan *Good Corporate Governance (GCG) 2018* yang diterbitkan perseroan, tercatat ada 4 kasus penyimpangan (*internal fraud*) yang memengaruhi kegiatan operasional bank dan kondisi keuangan secara signifikan pada tahun lalu. Dampak penyimpangan atau kerugian yang ditimbulkan akibat internal fraud ini masing-masing senilai lebih dari Rp100 juta. Hingga laporan itu dirilis, keempat kasus tersebut masih dalam proses penyelesaian di internal BJB Syariah.

Kasus Fraud pada Bank BRI juga pernah terjadi seperti dilansir detikcom, kronologi transfer fiktif ini bermula saat tim pemeriksa internal dari BRI Cabang Bangkinang, Ibukota Kabupaten Kampar melakukan pemeriksaan ke Unit BRI Tapung, ditemukan kejanggalan transaksi. Hasil pemeriksaan itu menyebutkan, adanya kejanggalan antara jumlah saldo neraca dengan kas tidak seimbang. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, adanya pembukaan setoran kas sebanyak Rp1,6 miliar. Uang sebanyak itu diketahui ditransfer dari BRI Unit Pasir Pangaraian II ke Unit BRI Tapung. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Oleh sebab itu tersangka diancam hukuman 10 tahun kurungan ditambah denda. (Sumber: <https://www.kompasiana.com>).

Dalam studinya pada tahun 1953 yang berjudul *"Other's People Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement"*, Donald R. Cressey menjelaskan fraud triangle theory, yakni tiga faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kecurangan. Faktor-faktor menurut teori ini antara lain adalah Tekanan (*pressure*), kesempatan (*Opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Tiffani & Marfuah, 2015). Teori ini kemudian berkembang dengan ditambahkannya lagi satu faktor kecurangan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wolfe dan Hermanson (2004), yang berpendapat bahwa penipuan tidak akan terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan (*capability*) yang tepat untuk melaksanakan setiap detail dari penipuan (Fuadin, 2017).

Kemudian, Crowe (2011) menambahkan satu faktor penyebab terjadinya kecurangan yaitu arogansi (*arrogance*), ia menjelaskan bahwa arogansi merupakan sifat superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa pengendalian internal dan kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya (Siddiq & Achyani, 2017). Teori yang dicetuskan oleh Crowe merupakan yang terbaru, sehingga penulis memilih untuk menganalisis pengaruh teori segi lima kecurangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Selain itu, variabel yang digunakan dalam teori kecurangan ini juga lebih lengkap dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya, yaitu segi tiga kecurangan dan segi empat kecurangan.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai teori-teori kecurangan, khususnya teori segi lima kecurangan atau *Fraud Pentagon Theory* antara lain penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2017), Agusputri dan Sofie (2019), dan Bawekes, Simanjuntak, & Daat (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini, objek penelitiannya merupakan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018, penelitian ini juga menggunakan rasio Beneish M-Score untuk mencari perusahaan yang melakukan kecurangan laporan keuangan sehingga analisis yang digunakan menggunakan regresi logistik dikarenakan penggunaan variabel dummy sebagai indikator variabel terikat.

Dalam *Statement On Auditing Standard* nomor 99, *Financial stability* merupakan suatu kondisi yang menggambarkan stabilitas keuangan perusahaan dalam posisi stabil (AICPA, 2002). Penelitian Siddiq & Achyani (2017) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara stabilitas keuangan yang diprosikan dengan perubahan total aset (ACHANGE) terhadap tindakan kecurangan. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Skousen & Twedt (2009) yang menunjukkan hasil bahwa semakin besar rasio perubahan total aset suatu perusahaan maka terdapat kemungkinan dilakukannya tindakan fraud pada laporan keuangan. Hal ini diyakini oleh Skousen *et. al.* (2009) karena, apabila stabilitas keuangan perusahaan mengalami guncangan akibat dari keadaan ekonomi, entitas yang beroperasi, dan industri, maka manajer menghadapi tekanan sehingga terdorong dalam melakukan kecurangan laporan keuangan untuk membuat kondisi keuangan perusahaannya terlihat baik-baik saja (Siddiq & Achyani, 2017).

H₁: Stabilitas Keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Menurut SAS No. 99, saat tekanan berlebihan dari pihak eksternal terjadi, maka terdapat risiko kecurangan terhadap laporan keuangan. Dalam penelitiannya, Agusputri dan Sofie (2019) menemukan pengaruh negatif yang signifikan antara leverage terhadap kecurangan laporan keuangan pada sektor industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini karena menurut Agusputri & Sofie (2019), pihak kreditur akan memberikan pengawasan yang semakin ketat dalam melihat riwayat kredit perusahaan terhadap perusahaan yang memiliki hutang dengan jumlah besar, sehingga akan sulit bagi pihak manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan.

H₂: Tekanan eksternal berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Menurut SAS No.99 (AICPA, 2002), financial target adalah risiko adanya tekanan berlebihan pada manajemen untuk mencapai target keuangan yang dipatok oleh direksi atau manajemen, termasuk tujuan-tujuan penerimaan insentif dari penjualan maupun keuntungan.

Hasil penelitian yang dilakukan Manurung & Hadian (2013), menyatakan bahwa target keuangan yang diproksikan dengan tingkat pengembalian aset (ROA) berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Menurunnya kinerja keuangan perusahaan mengartikan bahwa pihak manajemen gagal memenuhi target keuangan yang telah ditentukan. Target yang tidak tercapai akan meningkatkan kemungkinan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen, karena manajemen dicap telah gagal dalam mencapai target yang dipercayakan kepadanya.

H₃: Target keuangan berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Menurut Skousen & Twedt (2009) dalam (Nugraheni & Triatmoko, 2018), *Personal financial need* merupakan suatu kondisi ketika keuangan perusahaan turut dipengaruhi oleh kondisi keuangan para eksekutif perusahaan. Apabila Perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik maka kondisi keuangan personal para eksekutif yang mempunyai saham di perusahaan tersebut juga ikut baik. Begitu sebaliknya, apabila kinerja keuangan perusahaan itu buruk maka keadaan finansial dari personal eksekutif perusahaan juga buruk. Penelitian Saputra & Kusumaningrum (2017) menunjukkan hasil pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional yakni persentase kepemilikan saham oleh orang dalam (OSHIP) terhadap kecurangan laporan keuangan.

H₄: Kebutuhan keuangan personal berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kesempatan dalam melakukan kecurangan laporan keuangan salah satunya berasal dari sifat industri perusahaan (SAS no. 99: 2002). Penelitian Fuadin (2017) dan Sihombing & Rahardjo (2014) dengan proksi rasio perubahan dalam piutang usaha menunjukkan hasil analisis bahwa Nature of Industry terbukti berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.

H₅: Sifat Industri berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Menurut SAS No. 99 tahun 2002 dalam melakukan kecurangan di suatu perusahaan disebabkan karena kurangnya pengawasan internal perusahaan (*ineffective monitoring*) penelitian Tiffani dan Marfuah (2015) menunjukkan bahwa ketidakefektifan pengawasan memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

H₆: Ketidakefektifan pengawasan berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Menurut Rini (2012) dalam Annisya *et. al.* (2016), *rationalization* yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan fraud, atau orang-orang yang berada dilingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasikan tindakan yang telah mereka lakukan, rasionalisasi dapat diukur dengan menggunakan proksi pergantian atau perubahan kantor akuntan publik (Skousen *et. al.*, 2009 dalam Shiddiq *et. al.*, 2017). Penelitian Agusputri dan Sofie (2019) menunjukkan adanya pengaruh negatif pergantian auditor terhadap kecurangan laporan keuangan.

H₇: Pergantian auditor berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Wolfe dan Hermanson (2004) dalam Putriasih *et. al.* (2016) mengemukakan bahwa perubahan direksi akan dapat menyebabkan stress period yang berdampak pada semakin terbukanya peluang untuk melakukan fraud. Penelitian yang dilakukan oleh Putriasih *et. al.* Menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara kapabilitas dalam teori segi empat kecurangan yang dalam teori ini (segi lima kecurangan) diubah menjadi kompetensi,

terhadap kecurangan laporan keuangan, begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Kesumaningrum (2017).

H₈: Perubahan direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Arogansi adalah jumlah penggambaran seorang CEO dalam suatu perusahaan dengan menampilkan display picture ataupun profil, prestasi, foto, ataupun informasi lainnya mengenai *track of record* CEO yang dipaparkan secara berulang-ulang dalam laporan tahunan perusahaan (Crowe, 2011 dalam Shiddiq *et. al.*, 2017). Menurut Agusputri & Sofie (2019) kekuasaan yang dimilikinya dapat menimbulkan sifat arogan di dalam diri CEO tersebut, menganggap bahwa tidak ada satupun orang yang dapat menghentikan tindakannya termasuk kebijakan pengendalian internal di dalam perusahaan tersebut. Arsiandi dan Verawaati (2017) dalam penelitiannya menemukan pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.

H₉: Jumlah kemunculan foto CEO berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah: 1). Bank yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. 2). Bank yang mempublikasikan laporan tahunan lengkap yang telah diaudit oleh auditor independen per 31 Desember 2014-2018. 3). Bank tidak terindikasi melakukan manipulasi (fraud) minimal satu kali selama tahun pengamatan. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah perbankan yang melakukan manipulasi laporan keuangan adalah sebanyak 28 bank, sehingga sampel keseluruhan selama lima tahun adalah sebanyak 140 sampel.

Untuk dapat menemukan bank yang melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan mereka, penelitian ini menggunakan Beneish M-Score, yakni delapan rasio keuangan untuk mengidentifikasi apakah perbankan terindikasi untuk memanipulasi pendapatan dalam laporan keuangan (Beneish 1997, dalam Aprilia, 2017). Rasio Beneish M-Score yang digunakan adalah : 1). *Days Sales in Receivable Index* (DSRI); 2). *Gross Margin Index* (GMI); 3). *Asset Quality Index* (AQI); 4). *Sales Growth Index* (SGI); 5). *Depreciation Index* (DEPI); 6). *Sales General and Administrative Expenses Index* (SGAI); 7). *Leverage Index* (LVGI); 8). *Total Accruals to Total Assets* (TATA).

Sementara itu, proksi variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian Skousen & Twedt (2009), Tiffani & Marfiah (2015), Yulia (2018), Fuadin (2017), Siddiq & Achyani (2017). Pemilihan proksi untuk variabel dalam penelitian ini karena, proksi-proksi tersebut telah banyak digunakan dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan, sehingga lebih terpercaya. Proksi tersebut antara lain; Tekanan yang diproksikan dengan stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, dan kebutuhan keuangan personal; Kesempatan yang diproksikan dengan sifat industri dan ketidak efektifan pengawasan; Rasionalisasi yang diproksikan dengan pergantian auditor selama periode penelitian; Kompetensi yang diproksikan dengan pergantian dewan direksi selama periode penelitian; dan Arogansi yang diproksikan dengan Jumlah foto CEO pada laporan tahunan selama periode penelitian.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi logistik dengan persamaan seperti di bawah ini:

$$\text{LnFRAUD}/(1-\text{FRAUD}) = \alpha + \beta_1(\text{ACHANGE}) + \beta_2(\text{LEV}) + \beta_3(\text{ROA}) + \beta_4(\text{OSHIP}) + \beta_5(\text{RECEIVABLE}) + \beta_6(\text{IND}) + \beta_7(\text{AUDCHANGE}) + \beta_8(\text{DIRCHANGE}) + \beta_9(\text{CEOPIC}) + \varepsilon$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FRAUD	140	0	1	.32	.469
ACHANGE	140	-7.4340	.9989	.054527	.6634870
LEV	140	.0758	8.1704	.871316	.6383720
ROA	140	-.1077	.0457	.004550	.0236842
OSHIP	140	0	1	.49	.502
RECEIVABLE	140	-58.4110	58.7230	-.345419	9.0007106
IND	140	.2500	1.0000	.579050	.1342677
AUDCHANGE	140	0	1	.14	.344
DIRCHANGE	140	0	1	.65	.479
CEOPIC	140	0	33	7.21	5.912
Valid N (listwise)	140				

Sumber: Data sekunder yang diolah

Variabel kecurangan laporan keuangan (FRAUD) diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Perusahaan yang terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan diberikan nilai 1 sedangkan perusahaan yang tidak mendapat diberikan nilai 0. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel kecurangan laporan keuangan memiliki nilai maksimum sebesar 1 dan nilai minimum 0, nilai rata-rata sebesar 0,32 dan standar deviasi sebesar 0,469. Nilai rata-rata yang lebih kecil dari standar deviasinya tersebut menunjukkan kecurangan laporan keuangan dengan kode 1 lebih sedikit muncul dari 140 perusahaan sampel yang diteliti hanya 42 sampel yang terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan, sisanya sebanyak 98 sampel tidak terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa bank yang terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan menurut Beneish *M-Score* pada periode 2014-2018 di Bursa Efek Indonesia cenderung lebih sedikit, atau lebih banyak bank yang telah menyajikan laporan keuangan dan laporan tahunannya dengan jujur.

Stabilitas keuangan yang diproksikan dengan tingkat perubahan aset bank (ACHANGE) memiliki nilai minimum sebesar -7,4340, dan nilai maksimum sebesar 0,9989, nilai rata-rata sebesar 0,054527 sementara standar deviasi sebesar 0,6634870 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai perubahan aset perbankan sampel terhadap rata-rata perubahan aset dalam industri perbankan adalah 66,35%. Dari hasil analisis juga diketahui bahwa

variabel tekanan eksternal yang diproksikan dengan nilai leverage (LEV), minimumnya adalah sebesar 0,0758 yang menunjukkan bahwa nilai terendah rasio hutang terhadap total modal bank. Nilai maksimum sebesar 8,1704, sedangkan nilai rata-rata sebesar 0,871316 menunjukkan bahwa rata-rata bank memiliki hutang sebesar 0,871316 dari total modal yang dimiliki. Variabel target keuangan yang diproksikan dengan ROA memiliki nilai terkecil sebesar -0,1077 dan nilai terbesar 0,0457. Sementara itu, rata-rata tingkat pengembalian bank yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 0,00455. Artinya, rata-rata sampel penelitian memiliki tingkat pengembalian aset sebesar 0,46%, dan nilai standar deviasi 0,0236842 berarti, tingkat pengembalian asset bank sampel rata-rata sebesar 2,37% terhadap rata-rata pengembalian aset industri perbankan.

Variabel target keuangan personal yang diproksikan dengan OSHIP memiliki nilai minimum kepemilikan saham oleh orang dalam sebesar 0,000 menunjukkan bahwa manajemen tidak memiliki saham pada bank yang bersangkutan. Nilai maksimum sebesar 1 menunjukkan bahwa nilai tertinggi kepemilikan saham manajemen adalah sebesar 100%. Sedangkan nilai mean sebesar 0,49 menunjukkan bahwa rata-rata perbankan 49% sahamnya dimiliki oleh orang dalam. Tingkat perubahan piutang usaha (RECEIVABLE) yang mewakili variabel sifat industri memiliki nilai terkecil sebesar -58,4110 dan nilai terbesar 58,7230. Sementara rata-rata tingkat perubahan piutang perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini adalah sebesar -0,345419. Itu berarti bahwa rata-rata pengembalian piutang oleh bank yang dijadikan sampel sebesar 34,54%. Berdasarkan hasil analisis diketahui pula bahwa nilai minimum proporsi dewan komisaris independen (IND) sebesar 0,25 yang menunjukkan bahwa nilai terendah rasio dewan komisaris independen terhadap total jumlah dewan komisaris sebesar 25%. Nilai maksimum sebesar 1,00 menunjukkan bahwa nilai tertinggi rasio jumlah anggota dewan komisaris independen terhadap total jumlah anggota dewan komisaris adalah sebesar 100%. Nilai mean sebesar 0,579050 menunjukkan bahwa rata-rata rasio anggota dewan komisaris independen terhadap total jumlah anggota dewan komisaris adalah sebesar 57,9050%. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,1342677 menunjukkan bahwa rata-rata penyimpangan nilai proporsi dewan komisaris independen terhadap rata-rata industri adalah sebesar 13,43%. Secara umum disimpulkan bahwa emiten belum memenuhi ketentuan Peraturan Pencatatan Nomor IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris independen minimum adalah sebesar 30%.

Nilai terkecil pergantian auditor (AUDCHANGE) yang memproksikan variabel rasionalisasi adalah sebesar 0 dan nilai terbesarnya adalah 1, sementara rata-ratanya adalah 0,14. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini hanya sebesar 14% yang rata-rata melakukan pergantian auditor selama periode penelitian. Variabel kompetensi yang diproksikan dengan pergantian dewan direksi (DIRCHANGE) memiliki nilai terkecil sebesar 0 dan nilai terbesar 1. Sementara itu, sebanyak 0,65 atau 65% rata-rata bank mengganti direksinya selama periode penelitian. Variabel arogansi yang diwakili oleh CEOPIC memiliki nilai terkecil sebesar 0 dan nilai terbesar 33, sementara itu, rata-rata jumlah foto direktur utama yang dipasang oleh bank yang dijadikan sampel selama periode penelitian adalah sebanyak 7 foto.

Analisis Regresi Logistik

Langkah pertama yang dilakukan dalam melakukan regresi logistik adalah menilai kelayakan model regresi. Berdasarkan hasil uji Hosmer and Lemeshow diperoleh nilai *Chi-square* sebesar 24.139 dengan Sig. model sebesar 0,044. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu memprediksi nilai observasi karena cocok dengan data observasinya. Langkah kedua adalah menilai keseluruhan model regresi dengan membandingkan nilai *-2 Log Likelihood* Block Number = 0 dan *-2 Log Likelihood* Block Number = 1. Nilai *-2 Log Likelihood* (LL) pada awal (block number 0) sebesar 172.774 dan pada akhir (block number 1) turun menjadi sebesar 148.635. Penurunan nilai *-2 Log Likelihood* 24.139 menunjukkan bahwa model dengan memasukkan variabel independen adalah fit dengan data dan menerima H_0 . Perbandingan kedua nilai *-2 Log Likelihood* tersebut sebesar 24.139 sesuai dengan yang ditunjukkan pada tabel Omnibus Tes.

Untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat, dilakukan uji *Nagelkerke's R Square*. Hasil pengujian koefisien determinasi penelitian ini menunjukkan angka 0,225 yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. *Nagelkerke's R Square*

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	148.635 ^a	.160	.225

Sumber: Data sekunder yang diolah

Hasil pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai koefisiensi determinasi sebesar 0,225 atau sama dengan 22,5%. Angka ini berarti variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebesar 22,5%, sedangkan sisanya sebesar 77,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.

Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengaruh Stabilitas Keuangan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian stabilitas keuangan (ACHANGE) terhadap kecurangan laporan keuangan memiliki nilai koefisien regresi 2,640 dan nilai signifikansi 0,043 dimana nilai tersebut lebih kecil (<) dari $\alpha=5\%$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel stabilitas keuangan yang diprosikan dengan rasio perubahan aset secara signifikan memberikan pengaruh yang positif terhadap kecurangan laporan keuangan, maka H_1 diterima. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bawekes *et. al.* (2018), Shiddiq (2017), Saputra dan Kesumaningrum (2017), Harto (2016), Tiffani dan Marfuah (2015), Sihombing (2014), dan Skousen *et. al.* (2009) bahwa kestabilan keuangan (ACHANGE) berpengaruh terhadap *financial statement* fraud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajer menghadapi tekanan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan ketika stabilitas keuangan terancam oleh berbagai macam keadaan, diantaranya adalah faktor ekonomi, industri, dan situasi perusahaan yang beroperasi. Dengan kata lain, apabila stabilitas keuangan terancam, maka akan memicu terjadinya pelanggaran-pelanggran yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Pengaruh Tekanan Eksternal terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian variabel tekanan eksternal yang diproksikan dengan tingkat *leverage* (LEV) terhadap kecurangan laporan keuangan memiliki nilai koefisien regresi -8,1 dan nilai signifikansi 0.039 dimana nilai tersebut lebih kecil (<) dari $\alpha=5\%$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel tekanan keuangan secara signifikan memberikan pengaruh yang negatif terhadap kecurangan laporan keuangan, maka H_2 diterima. Nilai negatif yang signifikan dalam hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka akan semakin rendah kemungkinan manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan, ataupun sebaliknya. Semakin rendah *leverage* perusahaan, semakin tinggi pula kemungkinan manajemen melakukan manipulasi laporannya. Hal ini dikarenakan pihak kreditur akan memberikan pengawasan yang semakin ketat dalam melihat riwayat kredit perusahaan terhadap perusahaan yang memiliki hutang dengan jumlah besar, sehingga akan sulit bagi pihak manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil variabel tekanan eksternal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan adalah Norbarani (2012) serta Nugraheni dan Triatmoko (2017). Agusptri dan Sofie (2019) juga menemukan pengaruh negatif yang signifikan antara *leverage* terhadap kecurangan laporan keuangan pada sektor industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Daljono (2013) tidak menemukan pengaruh antara tingkat *leverage* terhadap kecurangan laporan keuangan. Di sisi lain, dalam penelitiannya, Tiffani dan Marfuah (2015) justru menemukan pengaruh yang positif dan signifikan antara *leverage* terhadap kecurangan laporan keuangan.

Pengaruh Target Keuangan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian variabel target keuangan yang diproksikan dengan rasio tingkat pengembalian aset (ROA) terhadap kecurangan laporan keuangan memiliki nilai koefisien regresi -11.156 dan nilai signifikansi 0.290 dimana nilai tersebut lebih besar (>) dari $\alpha=5\%$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel target keuangan memiliki pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Maksudnya, semakin tinggi tingkat pengembalian aset perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan manajemen melakukan kecurangan laporan keuangan. Begitupula sebaliknya, apabila ROA perusahaan semakin kecil, maka semakin besar kemungkinan manajemen melakukan kecurangan laporannya, maka H_3 ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jalaludin (2017), Fuadin (2017), dan Sihombing & Rahardjo, (2014) yang menemukan pengaruh negatif namun tidak signifikan antara target keuangan (ROA) terhadap kecurangan laporan keuangan, karena biasanya, perusahaan yang menargetkan keuangan yang tinggi akan meningkatkan mutu operasionalnya melalui suatu sistem yang lebih efektif dan efisien serta modern. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni & Triatmoko (2018), Ulfah, Nuraina, & Wijaya (2017), Tiffani dan Marfuah (2015), serta Dalyono (2013), yang menemukan pengaruh antara target keuangan (ROA) terhadap kecurangan laporan keuangan.

Pengaruh Kebutuhan Keuangan Personal terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian variabel kebutuhan keuangan personal yang diproksikan dengan presentase kepemilikan saham orang dalam (OSHIP) terhadap kecurangan laporan keuangan memiliki nilai koefisien regresi 0.618 dan nilai signifikansi 0.151 dimana nilai tersebut lebih besar ($>$) dari $\alpha=5\%$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel kebutuhan keuangan personal memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Maksudnya, semakin banyak saham yang dimiliki oleh orang dalam perusahaan, maka semakin besar juga kemungkinan kecurangan laporan keuangan terjadi, maka H_4 dalam penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bawekes, Simanjuntak, & Daat (2018), Quraini & Rimawati (2018), Tessa G. (2016) dan juga Ulfah et al. (2017), yang tidak menemukan pengaruh antara kepemilikan saham oleh orang dalam terhadap kecurangan laporan keuangan. Kepemilikan saham yang rendah mengindikasikan bahwa manajemen cenderung tidak akan melakukan kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini karena oleh tidak adanya tekanan yang cukup berat bagi pihak manajemen untuk melakukan kecurangan pada laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nugraheni & Triatmoko (2018), Hapsari (2014), dan Molida (2011), yang hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh kepemilikan saham orang dalam terhadap Fraud.

Pengaruh Sifat Industri terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil pengujian variabel sifat industri yang diproksikan dengan rasio tingkat pengembalian piutang (RECEIVABLE) terhadap kecurangan laporan keuangan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.008 dan nilai signifikansi 0.746 dimana nilai tersebut lebih besar ($>$) dari $\alpha=5\%$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel sifat industri memiliki pengaruh yang positif terhadap kecurangan laporan keuangan namun tidak signifikan. Maksudnya, semakin tinggi tingkat pengembalian piutang perusahaan, maka semakin tinggi pula kemungkinan manajemen melakukan kecurangan laporan keuangan, maka H_5 dalam penelitian ini diterima.

Peningkatan jumlah piutang perusahaan dapat menjadi suatu indikasi bahwa perputaran kas perusahaan tidak baik dan akan mengurangi jumlah kas untuk kegiatan operasionalnya. Terbatasnya kas dapat menjadi dorongan bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan. Dalam kondisi ini, maka tekanan bagi manajemen untuk menyajikan laporan keuangan yang baik demi menarik minat investor dengan cara memanipulasi laporan keuangan akan meningkat, salah satu upaya dalam mencapai tujuan tersebut yakni dengan memanipulasi jumlah piutang dagang baik dengan tanggal jatuh tempo hingga menghilangkan piutang jangka panjangnya (Subramanyam dan Wild, 2008 dalam Fuadin 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia (2018), Fuadin (2017), Nugraheni dan Triatmoko (2017), dan Tiffani & Marfuah (2015) bahwa ada pengaruh positif antara sifat industri terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun tidak dengan penelitian Agusputri dan Sofie (2019) yang menemukan pengaruh negatif dan signifikan sifat industri terhadap Fraud.

Pengaruh Ketidakefektifan Pengawasan Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil pengujian variabel ketidak efektifan pengawasan yang diproksikan dengan presentase jumlah anggota komisaris independen (IND) terhadap kecurangan laporan keuangan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.198 dan nilai signifikansi 0.909 dimana nilai tersebut lebih besar ($>$) dari $\alpha=5\%$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel ketidak efektifan pengawasan memiliki pengaruh yang positif terhadap kecurangan laporan keuangan namun tidak signifikan. Maksudnya, semakin tinggi tingkat presentase komisaris independen pada suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kemungkinan manajemen melakukan kecurangan laporan keuangan, maka H_6 ditolak. Hal ini dikarenakan lemah dan tidak efektifnya suatu sistem pengawasan suatu perusahaan akan menimbulkan potensi terjadinya tindakan kecurangan pelaporan karena manajemen akan merasa tidak diawasi secara ketat sehingga semakin leluasa mencari cara untuk memaksimalkan tujuannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agusputri dan Sofie (2019), Nindito (2018) yang menemukan pengaruh positif namun tidak signifikan dari ketidak efektifan pengawasan terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dalyono (2013) yang menemukan pengaruh negatif antara ketidak efektifan pengawasan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Pengaruh Rasionalisasi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil pengujian variabel rasionalisasi yang diproksikan dengan pergantian auditor (AUDCHANGE) terhadap kecurangan laporan keuangan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.426 dan nilai signifikansi 0.506 dimana nilai tersebut lebih besar ($>$) dari $\alpha=5\%$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel rasionalisasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap kecurangan laporan keuangan namun tidak signifikan. Maksudnya, semakin sering perusahaan melakukan pergantian KAP, maka semakin rendah kemungkinan manajemen melakukan kecurangan laporan keuangan, maka H_7 dalam penelitian ini diterima.

Hal ini dikarenakan perubahan auditor tentu akan membuat auditor baru membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari dan beradaptasi terhadap laporan keuangan dan manajemen perusahaan Hasil penelitian ini mendukung penelitian Agusputri dan Sofie (2019), Septriani dan Handayani (2018), Yulia (2018), dan Husmawati *et. al.* (2017) yang menyatakan bahwa pergantian KAP sebagai proksi variabel rasionalisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Qurainy dan Rahmawati (2018), Saputra dan Kesumaningrum (2017) dan Siddiq *et. al.* (2017), Ulfah *et. al.* (2017) yang menyatakan bahwa pergantian KAP berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Pengaruh Kompetensi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil pengujian variabel kompetensi yang diproksikan dengan pergantian dewan direksi (DIRCHANGE) terhadap kecurangan laporan keuangan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.365 dan nilai signifikansi 0.416 dimana nilai tersebut lebih besar ($>$) dari $\alpha=5\%$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel kompetensi memiliki pengaruh

yang positif terhadap kecurangan laporan keuangan namun tidak signifikan. Maksudnya, semakin sering perusahaan melakukan pergantian dewan direksi, maka semakin tinggi pula kemungkinan manajemen melakukan kecurangan laporan keuangan, maka H_8 diterima. Pergantian direktur oleh perusahaan dilakukan karena banyak sebab, salah satunya adalah agar perusahaan tersebut dapat berkembang dengan adanya direktur baru yang mungkin saja memiliki visi dan misi serta latar belakang yang sama dengan perusahaan. Selain itu, mantan direktur yang telah diganti tersebut mungkin saja dipindahkan kebagian yang lebih tinggi karena kinerja kontribusinya yang baik terhadap perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia (2018), serta Arisandi dan Verawati (2017) yang menemukan pengaruh positif pergantian dewan direksi terhadap kecurangan laporan keuangan, namun tidak signifikan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Agusputri dan Sofie (2019) bertolak belakang dengan penelitian ini karena hasilnya menunjukkan pengaruh yang negatif dari pergantian dewan direksi terhadap kecurangan laporan keuangan.

Pengaruh Arogansi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil pengujian variabel arogansi yang diprosikan dengan jumlah foto direktur utama (CEOPIC) terhadap kecurangan laporan keuangan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.004 dan nilai signifikansi 0.915 dimana nilai tersebut lebih besar ($>$) dari $\alpha=5\%$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel arogansi memiliki pengaruh yang negatif terhadap kecurangan laporan keuangan namun tidak signifikan. Maksudnya, semakin sering foto CEO muncul, maka semakin rendah kemungkinan manajemen melakukan kecurangan laporan keuangan, maka H_9 ditolak. Hal ini dikarenakan foto CEO yang terpasang dalam laporan tahunan perusahaan dimaksudkan untuk memperkenalkan pemimpin dan penanggung jawab operasional dalam perusahaan tersebut. Selain itu, tidak semua perusahaan memasang foto direktur utama mereka, sehingga frekuensi kemunculan foto CEO dalam laporan tahunan bank tidak dapat menunjukkan sikap dan sifat arogansi seorang CEO dalam suatu bank secara keseluruhan.

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Agusputri dan Sofie (2019) dan Shiddiq *et. al.* (2017) yang menemukan pengaruh negatif antara frekuensi kemunculan foto CEO terhadap kecurangan laporan keuangan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Bawekes *et. al.* (2018), Qurainy dan Rahmawati (2018), Arisandi & Verawati (2017), justru menunjukkan hasil yang berkebalikan, karena frekuensi kemunculan foto CEO berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil empiris, dapat disimpulkan bahwa stabilitas keuangan berpengaruh secara positif signifikan, dan tekanan eksternal berpengaruh secara negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada perbankan periode 2014-2018. Hal ini berarti bahwa stabilitas ekonomi yang berasal dari berbagai faktor ekonomi, industri, dan situasi perusahaan yang beroperasi, mempengaruhi perilaku perusahaan dalam melakukan kecurangan

laporannya. Tingkat perubahan aset (yang merupakan proksi stabilitas keuangan) yang tinggi sejalan dengan adanya peluang manipulasi terhadap laporan keuangan perbankan.

Sementara itu, semakin rendah tingkat leverage, dapat menjadi sinyal semakin tinggi dalam adanya kemungkinan tindak manipulasi terhadap laporan keuangan oleh pihak perbankan, karena tekanan eksternal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, Target Keuangan (ROA), Kebutuhan Keuangan Personal (OSHIP), Sifat Industri (RECEIVABLE), Ketidakefektifan Pengawasan (IND), Rasionalisasi (AUDCHANGE), Kompetensi (DIRCHANGE), dan Arogansi (CEOPIC) terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

Berdasarkan keterbatasan yang telah disampaikan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya, yaitu: 1). Penelitian yang selanjutnya disarankan untuk menggunakan jenis industri dan skala perusahaan yang lebih luas lagi sehingga dapat lebih menggambarkan lebih dalam mengenai variabel yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan; 2). Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode prediksi kecurangan laporan keuangan yang lain, seperti Fraud Score Model, Jones Modified Model, dan Red Flags; 3). Penelitian yang selanjutnya diharapkan untuk menambah rentang periode penelitian sehingga penelitian yang dilakukan akan lebih baik dan luas lagi.

PUSTAKA ACUAN

- ACFE. (2012). Report To the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2016 Global Fraud Study. *Association of Certified Fraud Examiners*, 1-74.
- ACFE. (2012). Report To the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2016 Global Fraud Study. *Association of Certified Fraud Examiners*, 1-79.
- ACFE. (2016). Report To the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2016 Global Fraud Study. *Association of Certified Fraud Examiners*, 1-92.
- ACFE. (2018). Report to the Nations 2018 Global Study on Occupational Fraud and Abuse. *ACFE Report*, 10, 80.
- Agusputri, H., & Sofie, S. (2019). Faktor - Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Fraudulent *Financial reporting* Dengan Menggunakan Analisis Fraud Pentagon. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 14(2), 105. <https://doi.org/10.25105/jipak.v14i2.5049>
- AICPA. (2002). AU Section 316 Consideration of Fraud in a Financial. *October*.
- Arief, T. (2019, April 23). Terjadi 4 Internal Fraud di BJB Syariah Selama 2018. *Finansial Bisnis*. Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20190423/90/914480/terjadi-4-internal-fraud-di-bjb-syariah-selama-2018>
- Arisandi, D., & Verawaty. (2017). Fraud Pentagon dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Keuangan dan Perbankan di Indonesia. *Seminar Nasional Global Competitive Advantage*.
- Bawekes, H. F., Simanjuntak, A. M. A., & Daat, S. C. (2018). Pengujian Teori Fraud Pentagon Terhadap Fraudulent *Financial reporting* (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar

- di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1), 114–134.
- Fuadin, A. (2017). *Analisis Fraud Diamond dan Ukuran Perusahaan Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)*.
- Jalaludin, R. (2017). *Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Lq-45*. 45.
- Journal, D., & Accounting, O. F. (2013). *PENDETEKSIAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN MELALUI FAKTOR RISIKO TEKANAN DAN PELUANG (Studi Kasus pada Perusahaan yang Mendapat Sanksi dari Bapepam Periode 2002-2006)*. 2, 700–711.
- Manurung, D. T., & Hadian, N. (2013). Detection Fraud of Financial Statement with Fraud Triangle. *Proceedings of 23rd International Business Research Conference*.
- Nugraheni, N. K., & Triatmoko, H. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA FINANCIAL STATEMENT FRAUD: PERSPEKTIF DIAMOND FRAUD THEORY (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *JURNAL AKUNTANSI DAN AUDITING*. <https://doi.org/10.14710/jaa.v14i2.19774>
- Quraini, F., & Rimawati, Y. (2018). Determinan Fraudulent *Financial reporting* Using Fraud. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting (Jaffa)*, 6(2), 105–114.
- Saputra Rizki M. A, & Kusumaningrum N. D. (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Fraudulent *Financial reporting* Dengan Perspektif Fraud Pentagon Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(2), 121–134. Retrieved from http://repository.lppm.unila.ac.id/5046/1/JAK_VOL_22_JULI_2017_-_Dewi_Sukmasari.pdf
- Siddiq, R., & Achyani, F. (2017). Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi Financial Statement. *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*.
- Skousen, C. J., & Twedt, B. J. (2009). Fraud score analysis in emerging markets. *Cross Cultural Management: An International Journal*. <https://doi.org/10.1108/13527600910977373>
- Tessa G., C. (2016). Fraudulent *Financial reporting* : Pengujian Teori Fraud Pentagon Pada Jenis Sesi Paper : Full paper. *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Tiffani, L., & Marfuah, M. (2015). Deteksi financial statement fraud dengan analisis fraud triangle pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art3>
- Ulfah, M., Nuraina, E., & Wijaya, A. L. (2017). Pengaruh Fraud Pentagon dalam Mendeteksi Fraudulent *Financial reporting* (Studi Empiris pada Perbankan di Indonesia yang Terdaftar di BEI). *The 9th Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi (FIPA)*, 5(1), 399–417.
- Yulia. (2018). Pengaruh Elemen Fraud Diamond Theory Dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud. *Naskah Publikasi Universitas Negeri Padang*, 1–16.

Penyusunan Model Pengamanan Aset Tidak Bergerak di Kabupaten Sumenep

Toton Merianto¹, Siti Musyarofah², Bambang Haryadi³

^{1,2,3}Universitas Trunojoyo Madura

²sitimusyaroifah@trunojoyo.ac.id

Abstract

The problem of management asset is one of many problems faced by local government whose material asset. The research purpose is to create security model on immovable assets in Sumenep. This research uses qualitative method with soft system methodology approach. The results showed that Sumenep district government in implementing the immovable asset security is not optimal because there is no standard reference, so immovable assets security model is needed. Administrative security model starting from demand the land assets report from the entire agencies accompanied by supporting documents. Furthermore, the report synchronized and verified directly to the assets location. If there are assets that administratively incomplete, than it must performed by legal security that starts from tracking the land assets status, if uncertified assets are found than certification is needed. Certified land assets then followed up through the physical security of land assets that used by the other party or misused by parties who violate the provisions of the land use agreement by fencing/installing a sign of ownership.

Keywords: conceptual model, immovable security, soft system methodology

Abstrak

Permasalahan aset merupakan satu dari berbagai permasalahan yang selalu terjadi pada hampir setiap instansi pemerintah daerah terutama entitas yang memiliki aset dengan jumlah yang sangat besar. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun model pengamanan aset tidak bergerak di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *soft system methodology*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkab Sumenep dalam melaksanakan pengamanan aset tidak bergerak masih belum optimal. Hal ini karena belum ada standar acuan yang jelas, sehingga diperlukan model pengamanan aset tidak bergerak. Model pengamanan administrasi dimulai dari permintaan laporan aset tanah dari seluruh OPD disertai dokumen pendukung. Selanjutnya laporan tersebut dilakukan sinkronisasi dan verifikasi langsung ke lokasi aset. Jika terdapat aset yang belum lengkap secara administrasi, selanjutnya dilakukan pengamanan hukum yang dimulai dari melacak status aset tanah, apabila ditemukan aset yang belum bersertifikat maka dilakukan pensertifikatan tanah ke BPN. Aset tanah yang bersertifikat kemudian ditindaklanjuti melalui pengamanan fisik terhadap lahan milik pemerintah daerah yang digunakan oleh pihak lain atau disalahgunakan oleh pihak yang melanggar ketentuan perjanjian penggunaan tanah milik pemerintah daerah dengan cara pemagaran/pemasangan tanda kepemilikan.

Kata Kunci: model konseptual, pengamanan aset tidak bergerak, *soft system methodology*

PENDAHULUAN

Salah satu elemen dalam neraca pemerintah daerah adalah aset. Dalam laporan neraca, informasi tentang aset menggambarkan potensi ekonomi serta kondisi kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah. Dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai kemandirian keuangan daerah tersebut serta seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Selain itu, terkait kelengkapan dan prasarana publik juga dapat memberikan dampak kenyamanan bertempat tinggal di daerah tersebut (Mulalinda and Tangkuman, 2014).

Manajemen terhadap aset dilakukan supaya aset-aset yang dimiliki oleh daerah dapat berfungsi secara maksimal serta menjadi modal awal bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah daerah. Dengan kata lain, aset daerah adalah urusan yang harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, bertanggungjawab dan adanya kepastian nilai aset daerah yang dapat berfungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah daerah. Sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu, jadi aset daerah jika tidak dikelola dengan semestinya, justru akan menjadi beban bagi pemerintah daerah.

Permasalahan tentang aset merupakan satu dari berbagai permasalahan yang selalu terjadi pada hampir setiap instansi pemerintah terutama entitas yang memiliki aset dengan jumlah yang sangat besar. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan penerimaan yang optimal, pengeluaran yang efisien serta pengelolaan kekayaan/aset daerah secara efektif, jumlah dan potensi kekayaan/aset negara yang sangat besar ini masih dirasa belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan adanya hal tersebut, akan memicu kerugian negara yang disebabkan oleh kompleksitas masalah serta pelaksanaan pengelolaan aset/barang milik daerah yang kerap tumpang tindih.

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 poin 28 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: 1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2) pengadaan; 3) penggunaan; 4) pemanfaatan; 5) pengamanan dan pemeliharaan; 6) penilaian; 7) pemindahtanganan; 8) pemusnahan; 9) penghapusan; 10) penatausahaan; dan 11) pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Aset/barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar yang pada akhirnya dapat mewujudkan pengelolaan barang atau aset yang memenuhi akuntabilitas. Aset yang dimiliki pemerintah daerah sangat bervariasi baik jenis maupun jumlahnya, sehingga berpotensi memunculkan permasalahan. Permasalahan manajemen aset/barang milik daerah tersebut biasanya disebabkan diantaranya karena belum dilakukannya inventarisasi seluruh aset daerah yang masih tersebar dan ketidakjelasan status kepemilikan atas beberapa jenis aset, seperti: tanah dan bangunan (Ratnasari, 2013).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa pengamanan barang milik daerah wajib dilaksanakan oleh pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang terhadap barang yang berada dalam penguasaannya. Pelaksanaan pengamanan barang milik daerah tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Selain itu, pengelola barang juga wajib melakukan penyimpanan terhadap bukti kepemilikan barang milik daerah dengan tertib dan aman.

Tata cara pengamanan aset/barang milik daerah terutama pengamanan terhadap aset tidak bergerak (tanah) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut: (1) Pengamanan fisik, yaitu pengamanan terhadap aset/barang milik daerah yang dilakukan dengan cara pembangunan pagar batas atau pemasangan patok penanda batas tanah, pemasangan tanda kepemilikan, melakukan penjagaan terhadap aset tanah; (2) Pengamanan administrasi, yaitu pengamanan terhadap aset yang dilakukan dengan cara menginventarisasi, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah serta dokumen pendukung lainnya secara tertib dan aman; (3) Pengamanan hukum, yaitu pengamanan terhadap aset daerah yang dilakukan dengan cara mensertifikat tanah atau melakukan balik nama atas sertifikat yang masih belum atas nama pemerintah daerah.

Masalah-masalah pada aset tetap yang sering terjadi pada Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengamanan aset tidak bergerak secara umum berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK-RI mulai tahun 2008 sampai dengan 2015 diantaranya yaitu : (1) Masih banyak aset tanah dan bangunan tidak didukung dengan bukti hak atas tanah yang sah (belum bersertifikat) atau belum dibaliknamakan atas nama Pemda sehingga hak atas tanah tersebut lemah dan rawan dikuasai pihak lain; (2) Aset tanah dikuasai pihak ketiga tanpa perjanjian yang jelas sehingga menyulitkan pada saat akan mengambil alih kembali; (3) Hasil pengadaan tanah belum dipasang batas-batas tanah, sehingga pengakuan kepemilikan atas tanah secara hukum masih lemah dan memberikan peluang timbulnya pengambilalihan atau penggunaan atas tanah tersebut oleh pihak lain; (4) Aset tanah dan bangunan tidak tercatat dalam neraca sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain dari ikhtisar hasil pemeriksaan BPK-RI, permasalahan mengenai pengamanan aset daerah, terutama aset tidak bergerak dapat diketahui melalui penelitian-penelitian sebelumnya. Dari penelitian-penelitian tersebut diketahui bahwa aset daerah terutama aset tidak bergerak dapat mengakibatkan beberapa permasalahan apabila manajemen aset tidak dilaksanakan dengan baik.

Penelitian Krisindarto (2012) menemukan bahwa terdapat dua permasalahan terkait belum optimalnya pengelolaan aset tanah di Kota Semarang. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain Pemerintah Kota Semarang belum melakukan review terhadap siklus pengelolaan aset tanah eksisting dan belum melakukan penyusunan rencana strategis optimasi aset dengan cara menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang strategi dan optimasi aset daerah. Sedangkan penelitian Wulandari (2017) menunjukkan bahwa aset tanah merupakan salah satu aset daerah yang paling sulit dalam pengamanan dan pemeliharannya. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya pemahaman pengelola aset

mengenai peraturan perundangan terkait, kepemilikan aset tanah tidak didukung bukti hak atas tanah yang sah, administrasi bukti kepemilikan aset tidak tertib serta aset tanah yang belum diserahkan status penggunaannya kepada Pemerintah Kota Pontianak.

Selain di Indonesia, permasalahan mengenai aset tidak bergerak juga terjadi di Malaysia. Penelitian Berahim, Jaafar and Zainudin (2015) menunjukkan bahwa dalam laporan umum auditor mengenai kegiatan Departemen Pemerintahan dan Instansi Pemerintah Malaysia dari tahun 2011 sampai 2013, pemborosan anggaran pemerintah disebabkan oleh kegagalan pemanfaatan dan pengelolaan tanah milik pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menetapkan strategi serta melakukan perbaikan administrasi dan manajemen terutama pada aset tak bergerak sehingga dapat mengurangi masalah anggaran pemerintah daerah di Malaysia. Selain itu, Abdullah et al. (2011) juga mengungkapkan bahwa terdapat lima masalah utama manajemen dalam pengelolaan aset tanah milik pemerintah Malaysia. Permasalahan tersebut antara lain kurangnya unit/departemen yang tepat dalam mengurus pertanahan pada kementerian, kurangnya keahlian, kurangnya strategi yang tepat, kurangnya prosedur manajemen yang tepat dan kurangnya penggunaan IT.

Kerekes and Williamson (2010) secara khusus menganalisis dampak sertifikasi tanah pemerintah sebagai metode pengamanan lahan di pedesaan Peru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi tanah tidak mencapai manfaat yang positif terkait pengamanan lahan. Selain itu ditemukan juga bahwa individu lebih menyukai metode yang dilakukan swasta dalam pengamanan lahan untuk kepentingan publik. Penelitian Acharya (2008) menemukan bahwa di Nepal banyak terjadi pelanggaran batas lahan pemerintah oleh penduduk yang bermigrasi dari pegunungan ke daratan dan dari pedesaan ke perkotaan. Kurangnya kebijakan tanah yang komprehensif, aksi pengamanan tanah terpadu, dan duplikasi tanggungjawab merupakan kelemahan dari sistem manajemen aset pada Ministry of Land Reform and Management.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif baik bersifat deskriptif maupun studi kasus. Penelitian ini mencoba mengurai permasalahan manajemen aset daerah menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan pisau analisis yaitu Soft System Methodology (SSM) dengan mengambil objek studi di Kabupaten Sumenep.

Tercatat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun terakhir (2008-2016), Pemerintah Kabupaten Sumenep selalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Salah satu permasalahan yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Sumenep memperoleh opini WDP karena belum memaksimalkan aset tetap (tanah dan bangunan) milik pemerintah Kabupaten Sumenep. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kendala terutama masalah inventarisasi aset sebagaimana hingga sekarang belum ada data yang baku tentang jumlah luas tanah milik pemerintah Kabupaten Sumenep, termasuk masalah legal audit sebagaimana data dari BPPKAD Kabupaten Sumenep tentang Rekapitulasi Aset Tanah per 31 Desember 2016 yaitu sebanyak 1.440 bidang tanah, yang baru bersertifikat 484 bidang (33,61%) dan sisanya 956 bidang (66,39%) tidak memiliki status hukum yang jelas. Permasalahan

aset tersebut yang menjadi kendala Kabupaten Sumenep untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini menimbulkan adanya anggapan bahwa kegiatan inventarisasi aset tetap terutama yang berkaitan dengan pengamanan aset tidak bergerak masih menemukan permasalahan yang mana dalam pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang benar. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang yang kurang termanfaatkan dengan baik dalam mendukung pelaksanaan inventarisasi aset pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini tentu saja turut mempengaruhi penilaian BPK secara khusus terhadap kinerja pengelolaan aset daerah serta kinerja keuangan Kabupaten Sumenep secara umum.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan memperhatikan opini BPK-RI terhadap pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dan hubungannya dengan permasalahan-permasalahan terkait aset tidak bergerak, maka penting rasanya untuk dapat mengetahui lebih lanjut berbagai permasalahan atas aset tidak bergerak yang terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. Penelitian ini bukan hanya untuk mengetahui berbagai permasalahan mengenai aset tidak bergerak seperti pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, namun akan dicari juga bagaimana solusi dari permasalahan tersebut.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menyusun model manajemen aset daerah melalui pengamanan barang milik daerah pada aset tidak bergerak yang efektif di Kabupaten Sumenep.

METODE

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Sedangkan alat analisis yang digunakan yaitu dengan pendekatan *soft system methodology* (SSM). Menurut Checkland and Scholes (1990) *soft system methodology* merupakan pendekatan yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Esensinya adalah membangun model sistem melalui pemaknaan serta pemahaman secara mendalam mengenai situasi masalah sesuai fenomena yang dihadapi (Williams, 2005).

Menurut Mingers (2000), Jackson (2001), dan Luckett, Ngubane and Memela (2001), SSM berparadigma interpretative sehingga teknik penerapannya di lapangan sangat tergantung pada situasi permasalahan, konteks penelitian, kemampuan pengguna serta perilaku aktor-aktor. SSM juga merupakan metodologi yang digunakan untuk mendukung strukturisasi pemikiran dalam masalah organisasi dan komunitas yang kompleks. Oleh karena itu, SSM dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengidentifikasi, merumuskan akar permasalahan dan pemecahannya, menemukan dan mempertemukan pendapat para pihak yang terlibat seperti pelaksana, pengambil keputusan, pengguna, dan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan pandangan umum masyarakat/politik/sosial budaya.

Soft system methodology didasarkan pada 7 tahapan proses yang dimulai dari pengklarifikasian situasi masalah yang tidak terstruktur melalui perancangan sistem aktivitas manusia yang diharapkan membantu memperbaiki situasi model konseptual ini kemudian

dibandingkan dengan situasi masalah dalam rangka mengidentifikasi perubahan yang layak. Tujuh tahapan *soft system methodology* sebagaimana juga disampaikan oleh Checkland and Scholes (1990), antara lain : (1) *Enter situation considered problematical* (memahami situasi permasalahan); (2) *Express the problem situation* (mengungkapkan situasi permasalahan); (3) *Formulate root definitions of relevant systems of purposeful activity* (pembuatan definisi akar permasalahan yang mencakup pandangan tertentu terhadap situasi masalah sesuai dengan perspektif yang relevan); (4) *Build conceptual models of the systems named in the root definitions* (membangun model konseptual berdasarkan akar permasalahan untuk setiap elemen yang didefinisikan); (5) *Compare models with real world action* (membandingkan model konseptual dengan realitas/dunia nyata); (6) *Define possible changes which are both desirable and feasible* (menetapkan perubahan model yang diinginkan); (7) *Take action to improve the problem situation* (melakukan tindakan perbaikan untuk memperbaiki situasi masalah).

Checkland and Poulter (2006) menegaskan bahwa SSM merupakan suatu proses berlanjut namun tahapan-tahapan dalam SSM tidak bersifat kaku sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dalam pelaksanaannya. Biasanya dalam penggunaannya tidak terpaku bahwa proses itu harus sekuensial maju, namun gerakan setiap tahapan dalam SSM bisa maju atau mundur ke setiap tahapan (Brocklesby, 1995).

Penelitian ini berfokus pada Manajemen Aset Daerah melalui Pengamanan Barang Milik Daerah pada Aset Tidak Bergerak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam peraturan tersebut proses pengamanan aset/barang milik daerah terutama pengamanan terhadap aset tidak bergerak (tanah) terbagi menjadi 3 yaitu pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.

Dalam penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah Bidang Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep dengan asumsi karena Bidang Aset pada BPPKAD merupakan pusat informasi dimana hal-hal yang berkaitan dengan manajemen aset daerah serta pelaksanaan pengelolaan aset daerah. Selain itu peneliti telah sering berkomunikasi dengan staf-staf yang ada pada lokasi penelitian sehingga memudahkan dalam proses penelitian dan diharapkan mampu memberikan masukan, saran dan poin tersendiri kepada peneliti atau sebaliknya.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang menyangkut sumber-sumber informasi yang dapat memperkaya dan memperluas informasi tentang permasalahan yang diteliti. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder berupa kebijakan atau aturan pemerintah.

Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, observasi atau pengamatan langsung ke lapangan dengan mengikuti rapat-rapat mengenai penertiban aset, serta analisis dokumen.

Peneliti menentukan lima orang informan yang dianggap paling mengetahui mengenai masalah penelitian yang akan dilakukan. Lima orang tersebut yaitu Kepala Bidang Aset

pada BPPKAD Kabupaten Sumenep berinisial "MR", Kasubbid Akuntansi Aset Daerah pada Bidang Aset BPPKAD Kabupaten Sumenep berinisial "EM", Kasubbag Administrasi Wilayah Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumenep berinisial "J", dua orang Pengurus Barang pada SKPD berinisial "ES" dan "MNI".

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Situation Considered Problematical

Tahap pertama dalam *soft system methodology* (SSM) adalah *situation considered problematical* atau memahami situasi permasalahan yang tidak terstruktur, begitu kompleks dan banyak kekacauan serta memiliki banyak perspektif. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu mengumpulkan beragam informasi yang berkaitan dengan permasalahan sesuai dengan fenomena yang diteliti. Kegiatan ini dilakukan melalui observasi, pengumpulan data sekunder, dan yang tidak kalah penting adalah melakukan wawancara secara informal.

Permasalahan serta fenomena yang terjadi berkaitan dengan manajemen aset tidak bergerak yaitu seperti yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun terakhir (2008-2016), Pemerintah Kabupaten Sumenep selalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut LHP atas LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2016, terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan Kabupaten Sumenep mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu masalah aset daerah dan penyertaan modal ke BUMD. Permasalahan aset yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Sumenep memperoleh opini WDP karena belum memaksimalkan aset tetap (tanah dan bangunan) milik pemerintah Kabupaten Sumenep.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan informan "J" bahwa selama tahun 2016–2017 telah banyak melakukan rapat-rapat membahas permasalahan aset daerah. Permasalahan aset tersebut terutama berkaitan dengan aset tidak bergerak antara lain pengaduan tanah hak waris di Desa Bilis-bilis Kec. Arjasa yang di klaim Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep, permasalahan Telaga Kermata Saronggi yang dikelola pihak ke 3 (tiga) atas nama karang taruna yang bekerjasama dengan desa belum ada dokumen lingkungan UKL/UPL, persoalan tanah yang akan dihibahkan untuk Akademi Komunitas Negeri Sumenep (AKNS) akan tetapi pada lahan tersebut telah berdiri bangunan yang terdiri dari 1 (satu) Lembaga SDN Pamolokan I (satu) dan 21 (dua puluh satu) Rumah Dinas Guru, permasalahan tanah Ex Pembantu Bupati/Bekas Terminal Lama Desa Pamolokan yang ditempati Balai Desa Pamolokan, tanah Workshop PU. Bina Marga yang digunakan oleh masyarakat setempat tanpa ijin dan pemberitahuan kepada pihak Pemda, tanah Tajamara/Ex Terminal Lama Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep yang direncanakan akan dijadikan rest area akan tetapi masih ditempati oleh 21 pedagang kaki lima (PKL), permasalahan tanah Pasar Ternak/Pasar Peluk Desa Pamolokan hasil tukar guling belum diketahui, pengaduan masyarakat tentang ganti rugi tanah yang telah dibangun Puskesmas Pembantu di Desa Kombang Kecamatan Talango dan sampai saat ini belum ada kejelasan.

Dari beberapa contoh permasalahan tanah Pemkab diatas, maka jelaslah bahwa pengelolaan aset terutama aset berupa tanah oleh Pemkab masih belum optimal. Sesuai data dari BPPKAD tentang Daftar Aktiva Tetap Tanah Per 31 Desember 2016 bahwa aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep senilai Rp. 330.259.830.553,00 atau sebanyak 1.440 bidang tanah. Dari total jumlah tanah tersebut yang bersertifikat sebanyak 484 bidang atau senilai Rp. 112.376.265.044,00 atau sebesar 33,61% dari total bidang aset tanah. Sedangkan jumlah tanah yang belum bersertifikat yaitu sebanyak 956 bidang atau senilai Rp. 217.883.565.509,00 atau sebesar 66,39% dari total bidang aset tanah.

Menurut informan "MR" dan "EM" bahwa dari total aset tanah yang belum bersertifikat, paling banyak terdapat pada OPD Dinas Pendidikan. Dalam Daftar Aktiva Tetap per 31 Desember 2016 Dinas Pendidikan, aset tanah yang dimiliki senilai Rp. 80.477.242.686,00 atau sebanyak 845 bidang. Dari total aset tanah yang dimiliki, tanah yang sudah bersertifikat senilai Rp. 33.027.977.054,00 atau sebanyak 135 bidang (15,98%), sedangkan yang belum bersertifikat senilai Rp. 47.449.265.632,00 atau sebanyak 710 bidang (84,02%).

Problem Situation Expressed

Pengungkapan situasi masalah (*problem situation expressed*) merupakan tahapan yang berada dalam siklus kedua dari keseluruhan proses *Soft System Methodology* (SSM). Tujuan dari tahap kedua ini adalah memaparkan dengan jelas masalah yang ada di dalam *real world*. *Real world* menurut Checkland merupakan ungkapan atas gelombang atau fluktuasi interaksi dari peristiwa dan ide alami sebagai kehidupan sehari-hari Checkland and Scholes (1990). Dalam tahap ini akan digambarkan tiga langkah tata cara pengamanan aset tidak bergerak, yaitu pengamanan terhadap fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan secara hukum.

Sesuai dengan pernyataan dari informan "MR" dan "EM" bahwa pengelolaan aset di Kabupaten Sumenep mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Permendagri tersebut pada Pasal 299 ayat (1) diterangkan bahwa pengamanan fisik pada aset tidak bergerak terutama tanah dilakukan dengan tiga cara, yaitu memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah, dan melakukan penjagaan.

Menurut informan "J" bahwa sebelum melaksanakan pemasangan tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, maka pertama-tama dilaksanakan rapat yang membahas mengenai kejelasan status tanah tersebut dengan mengundang beberapa pihak terkait yang tergabung dalam tim khusus penertiban aset daerah Kabupaten Sumenep. Tim khusus yang menangani permasalahan tanah tersebut dibentuk melalui Keputusan Bupati Sumenep. Dalam surat Keputusan tersebut, tim penertiban aset bertugas untuk melakukan inventarisasi dan penertiban aset milik Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sumenep.

Tahap selanjutnya dalam proses *soft system methodology* (SSM) adalah menyangkut pembuatan definisi mendasar tentang sistem permasalahan (*root definition*) dengan cara menggali permasalahan secara mendalam dari stakeholder dan pandangan idealnya tentang apa sebaiknya suatu sistem yang relevan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Tujuannya menggambarkan keterkaitan antara situasi permasalahan dengan esensi pemecahan masalah yang perlu dikerjakan. Dengan mendefinisikan sistem permasalahan akan terungkap mengenai apa yang dikerjakan, mengapa dikerjakan, siapa yang mengerjakan, siapa yang diuntungkan dengan pekerjaan tersebut, dan apakah lingkungan yang membatasi tindakan yang dilakukan.

Checkland and Scholes (1990) merumuskan pembuatan definisi mendasar (*root definition*) dengan sebutan unsur CATWOE (*customers, actors, transformation process, world view, owners, environmental constraints*). Secara singkat unsur CATWOE pada pengamanan aset tidak bergerak di Kabupaten Sumenep dapat dijabarkan seperti dalam tabel 1.

Tabel 1. Unsur CATWOE Pada Pengamanan Aset Tidak Bergerak

No	Komponen Definisi Sistem Permasalahan (CATWOE)	Hasil Definisi Sistem Permasalahan
1	Pihak-pihak yang diuntungkan atau dirugikan (<i>Customers</i>)	Pemerintah Kabupaten Sumenep
2	Pihak-pihak yang melaksanakan pemecahan masalah (<i>Actors</i>)	Anggota tim penertiban aset Pemkab Sumenep yang terdiri dari BPPKAD, Bagian Pemerintahan Umum Setda, Bagian Hukum Setda, Kantor Pertanahan, Camat pada lokasi aset, serta tokoh masyarakat.
3	Aktivitas yang merubah masukan jadi keluaran (<i>Transformation Process</i>)	Forum SKPD seperti rapat penertiban aset, Kebijakan pemkab seperti pembuatan regulasi atau Perda mengenai pengelolaan aset daerah
4	Pemahaman mendalam dari berbagai pihak tentang situasi permasalahan (<i>World-view</i>)	Temuan BPK RI terhadap permasalahan aset daerah, pengaduan masyarakat
5	Pihak yang dapat menghentikan aktivitas (<i>Owners</i>)	Kepala Daerah dan DPRD
6	Hambatan lingkungan yang tidak dapat dihindari (<i>Environmental constrains</i>)	<i>Political will</i> pemerintahan daerah melakukan perubahan, ketidakpuasan masyarakat atas keputusan mengenai aset yang bermasalah

Sumber: data yang diolah (2018)

Model Konseptual

Tahap ke empat dalam menerapkan *soft system methodology* adalah membangun model konseptual (*building conceptual model*) artinya menggambarkan situasi permasalahan yang terjadi dalam realitas dan upaya pemecahannya dengan membuat tiruannya dalam model konseptual. Model konseptual adalah proses transformasi dari *root definition*. Model konseptual ini dibangun menggunakan konsep sistem formal (*formal system concept*) tentang permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya dengan menggunakan kerangka berpikir sistem (*other system thinking*).

Sesuai dengan fakta di lapangan, bahwa harapan terkait pelaksanaan pengamanan aset di Kabupaten Sumenep secara umum yaitu adanya peraturan daerah Kabupaten Sumenep mengenai pengelolaan barang milik daerah. Secara khusus agar pelaksanaan pengamanan aset tidak bergerak di Kabupaten Sumenep dapat terlaksana dengan baik yaitu dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Aset Tidak Bergerak.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa kegiatan yang memerlukan SOP harus memenuhi kriteria antara lain kegiatannya dilaksanakan secara rutin atau berulang-ulang, menghasilkan output tertentu, dan kegiatannya melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang/pihak. Selain itu penyusunan SOP juga dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, ditulis dengan jelas, rinci, dan benar, memperhatikan SOP lainnya, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep bahwa SOP disusun oleh pelaksana pekerjaan pada masing-masing SKPD dan unit kerja SKPD melalui tahapan persiapan, identifikasi kebutuhan, analisis kebutuhan, penulisan SOP, verifikasi dan ujicoba, pelaksanaan, sosialisasi, pelatihan dan pemahaman, serta monitoring dan evaluasi. Pasal 11 Perbup tersebut juga menegaskan bahwa penyusunan SOP dapat dilakukan lintas SKPD dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pada penelitian ini digambarkan model pengamanan aset tidak bergerak di Kabupaten Sumenep yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu model pengamanan fisik aset tidak bergerak, model pengamanan administrasi aset tidak bergerak, dan model pengamanan hukum aset tidak bergerak. Model pengamanan aset tidak bergerak tersebut hanya sebagai masukan atau draft konsep dalam penyusunan SOP yang akan disampaikan kepada pelaksana kegiatan pengamanan aset tidak bergerak di Kabupaten Sumenep yaitu pada Sub Bagian Program dan Perencanaan pada Sekretariat BPPKAD Kabupaten Sumenep.

Model Pengamanan Administrasi Aset Tidak Bergerak

Pengamanan aset tak bergerak di Pemerintah Daerah dimulai dengan pengamanan administrasi. Tanpa adanya administrasi yang baik dan lengkap, mustahil pengamanan dalam pengelolaan aset tak bergerak dapat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan keterangan yang didapat dari informan "MR" bahwa pelaksanaan pengamanan aset tidak bergerak di Kabupaten Sumenep harus dimulai dari kegiatan administratif. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh informan "EM" melalui wawancara secara terpisah yang menyatakan bahwa kegiatan pengamanan aset harus dimulai secara administrasi terlebih dahulu.

Menurut kedua informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pengamanan aset tak bergerak seharusnya dimulai dari proses pengamanan administrasi melalui tertib administrasi. Kenyataannya, selama ini untuk proses pengadministrasian aset tersebut

masih belum berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan masih tersendatnya laporan tentang aset dari OPD-OPD.

Fakta yang terjadi di lapangan juga memperkuat pernyataan kedua informan tersebut. Menurut Buku II LHP atas LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2016 bahwa untuk pencatatan aset tetap tanah serta gedung dan bangunan belum sepenuhnya tertib dan dokumen kepemilikan atas beberapa bidang tanah tidak berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Sumenep disamping itu dalam melakukan pencatatan aset daerah belum sepenuhnya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) dengan demikian nilai aset yang disajikan di neraca merupakan hasil pencatatan secara manual dan terdapat aset yang dicatat tidak berdasarkan nilai wajar atau harga perolehan, kemudian mengenai kepemilikan dokumen atas beberapa bidang tanah ada yang hilang dan ada yang hanya berupa fotocopy saja.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 pasal 26 ayat (1) pengguna/kuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan, ayat (2) pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah. Dan Pasal 46 ayat (1) barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah, ayat (3) barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep masih belum melaksanakan pengamanan administrasi secara optimal dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan pernyataan informan "EM" bahwa selama ini Bidang Aset BPPKAD melaksanakan pengamanan administrasi pada aset tidak bergerak hanya dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali bersamaan dengan permintaan laporan mutasi barang dari Pengurus Barang Pengguna seluruh OPD. Dari laporan mutasi barang dapat diketahui perubahan aset tanah masing-masing OPD, bisa bertambah atau bisa berkurang. Bertambah karena adanya pengadaan atau mutasi kepemilikan tanah dari OPD lain, sedangkan berkurang karena mutasi kepemilikan aset tanah ke OPD lain atau adanya penghapusan aset tanah.

Selain laporan mutasi barang, Bidang Aset BPPKAD juga melakukan sinkronisasi terhadap laporan mutasi barang tersebut. Hal itu dilakukan dengan membandingkan data yang ada pada OPD dengan data yang ada pada Bidang Aset BPPKAD. Apabila data dari OPD cocok dengan data BPPKAD, maka dianggap telah sinkron, namun apabila belum maka akan dicek dari hasil pengadaan.

Analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang tindakan yang telah dilakukan dalam pengamanan administrasi, menyimpulkan bahwa model pengamanan aset yang ada saat ini masih belum optimal, karena sinkronisasi yang dilakukan hanya sebatas mencocokkan data-data yang ada. Seharusnya untuk lebih optimalnya sinkronisasi juga dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti sertifikat atau surat perjanjian jual beli tanah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pengamanan administrasi tanah salah satunya dilakukan dengan melengkapi bukti kepemilikan dan/

atau menyimpan sertifikat tanah. Selain itu untuk meyakinkan bahwa aset tanah tersebut sesuai dengan data yang telah ada, maka harus dilakukan pengecekan lapangan dengan cara verifikasi langsung ke lokasi aset tanah tersebut.

Berdasarkan data dan fakta yang didapatkan oleh peneliti tentang kondisi pengamanan aset tidak bergerak di Kab. Sumenep, selanjutnya peneliti melakukan analisis untuk mendapatkan model pengamanan aset tak bergerak yang dapat diterapkan Kab. Sumenep. Berdasarkan analisis tersebut maka peneliti mengusulkan model pengamanan yang efektif yaitu dimulai dengan menginstruksikan seluruh OPD untuk melakukan inventarisasi terhadap tanah dalam penguasaannya. Kemudian hasil inventarisasi tersebut oleh seluruh OPD dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah. Selanjutnya KIB tersebut dihimpun menjadi satu dalam Laporan Mutasi Barang yang kemudian diserahkan ke Bidang Aset BPPKAD.

Bidang Aset BPPKAD kemudian menghimpun Laporan Mutasi Barang dari seluruh OPD untuk dilakukan verifikasi dan sinkronisasi terhadap data aset tanah yang sudah ada di BPPKAD. Data yang disinkronisasi dan diverifikasi yaitu data-data mengenai lokasi tanah, luas tanah, kondisi tanah, dan lain-lain. Apabila terdapat data dari OPD yang belum sesuai dengan data pada BPPKAD, maka OPD beserta BPPKAD mencari dan mencocokkan dengan dokumen-dokumen pendukung berupa sertifikat tanah atau surat perjanjian jual beli tanah.

Apabila data yang belum sesuai tersebut masih belum ada dokumen pendukung atau sertifikatnya, maka langkah selanjutnya melalui proses pengamanan hukum. Namun apabila sertifikat atau dokumen pendukung sudah ada, maka dilakukan sinkronisasi terhadap data pada laporan terhadap sertifikat tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui kebenaran dari data pada laporan harus dilakukan survey lapangan. Survey lapangan dilakukan oleh OPD yang bersangkutan bersama-sama dengan Bidang Aset BPPKAD. Saat melakukan survey lapangan, Bidang Aset BPPKAD dapat mengundang pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep untuk sekaligus melakukan pengukuran ulang terhadap aset tanah tersebut. Dari hasil pengukuran ulang, apabila sudah sesuai dengan sertifikat, maka Bidang Aset BPPKAD menghimbau kepada OPD terkait agar melakukan pengamanan fisik untuk mencegah aset tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Namun apabila aset tersebut masih menjadi sengketa atau dalam penguasaan pihak lain yang tidak berhak, maka perlu melakukan tindakan hukum.

Dari pemaparan mengenai langkah-langkah yang harus diambil Pemkab dalam pengamanan administrasi terhadap aset tidak bergerak, dapat digambarkan seperti pada Tabel 2.

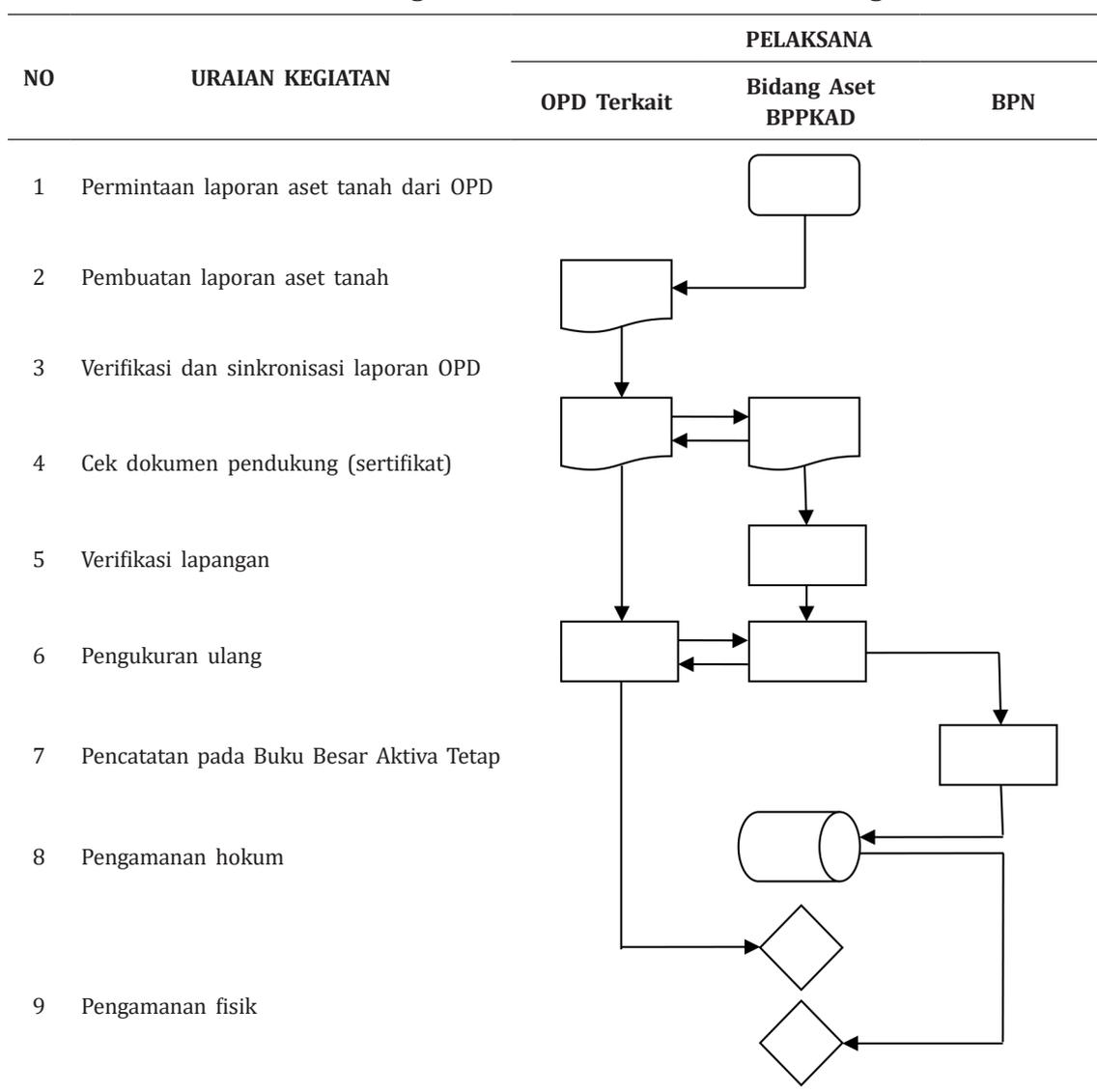
Model Pengamanan Hukum Aset Tidak Bergerak

Pengamanan hukum atau tindakan hukum terhadap aset tidak bergerak terutama aset tanah seperti yang dijelaskan sebelumnya pada proses pengamanan administrasi dilakukan terhadap aset tanah yang belum memiliki status jelas yaitu belum memiliki sertifikat. Menurut data dari BPPKAD tentang Daftar Aktiva Tetap Tanah Per 31 Desember

2016 bahwa aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebanyak 1.440 bidang tanah. Dari total jumlah tanah tersebut yang bersertifikat sebanyak 484 bidang atau sebesar 33,61% dari total bidang aset tanah. Sedangkan jumlah tanah yang belum bersertifikat yaitu sebanyak 956 bidang atau sebesar 66,39% dari total bidang aset tanah.

Tindakan melalui proses hukum juga bisa dilakukan oleh Pemkab atas aset tanah yang sedang menjadi sengketa atau masih dalam penguasaan pihak lain yang tidak berhak. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan “EM” menyatakan bahwa tindakan pengamanan hukum ini dilakukan setelah laporan mutasi barang dari OPD yang memuat data-data mengenai aset tanah milik Pemkab sudah diverifikasi dan disinkronisasi oleh BPPKAD. Setelah itu terhadap aset tanah yang belum memiliki sertifikat, dipilah dan diprioritaskan mana yang lebih dahulu akan dilakukan sertifikasi.

Tabel 2. Model Pengamanan Administrasi Aset Tidak Bergerak



Sumber: data yang diolah (2018)

Sebagaimana rapat koordinasi yang pernah dihadiri oleh peneliti di Asisten Pemerintahan Sekda pada tanggal 20 Juli 2017 yang membahas permasalahan tanah milik Pemkab Sumenep, menghasilkan simpulan antara lain bahwa terhadap aset tanah yang belum bersertifikat, sebagian sudah diajukan ke BPN akan tetapi sertifikat yang diproses tersebut masih belum selesai. Selain itu juga progres penyelesaian pensertifikatan tanah masih minim, hal ini dikarenakan OPD belum memprioritaskan pensertifikatan tanah dalam anggarannya.

Sesuai dengan hasil rapat tersebut, maka disimpulkan bahwa biaya untuk kegiatan pensertifikatan tanah dianggarkan oleh masing-masing OPD, sehingga proses pensertifikatan tanah mulai dari pengajuan ke BPN diserahkan kepada masing-masing OPD. Hal ini juga ditegaskan oleh informan "EM" bahwa anggaran untuk pensertifikatan tanah berada pada OPD masing-masing.

Berdasarkan keterangan dari para informan yang didapatkan melalui wawancara, dapat disimpulkan bahwa model pengamanan hukum aset tak bergerak yang selama ini diterapkan sudah bagus namun perlu penyempurnaan lagi agar hasilnya lebih optimal. Menurut analisis peneliti, model yang diterapkan selama ini mempunyai kelemahan yaitu tentang peran BPPKAD dalam mengawasi proses penyertifikatan aset tanah yang dilakukan oleh OPD. Peran BPPKAD belum maksimal dalam melakukan pengawasan karena belum adanya mekanisme kontrol mengenai kelanjutan pelaksanaan proses tersebut di OPD-OPD, sehingga keberlanjutan proses penyertifikatan tersebut tidak terpantau secara akurat dan real time.

Selanjutnya, berdasarkan analisis peneliti tentang kondisi pengamanan hukum aset tanah, maka peneliti menawarkan sebuah model untuk pengamanan hukum aset tanah di Kabupaten Sumenep. Pada aset tanah yang belum memiliki sertifikat, sebelum melakukan proses pensertifikatan terlebih dahulu melacak kejelasan status tanah dengan mengumpulkan bukti-bukti dokumen berupa surat perjanjian jual beli tanah atau langsung melakukan pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep. Setelah melakukan pengecekan ke Kantor BPN, apabila diketahui bahwa tanah tersebut bermasalah atau terdapat duplikasi sertifikat, maka langkah selanjutnya pihak Pemkab melakukan mediasi. Proses mediasi difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan Umum dengan mengundang beberapa pihak antara lain Bidang Aset BPPKAD, BPN Kabupaten Sumenep, OPD terkait, Camat, Kepala Desa serta tokoh masyarakat pada lokasi tanah sengketa dalam rapat sengketa tanah Pemkab. Rapat tersebut untuk menegaskan pemilik sah dari lahan yang menjadi sengketa dengan mengajukan bukti-bukti kepemilikan. Apabila dalam rapat tersebut diputuskan bahwa status lahan tersebut adalah benar-benar milik Pemkab, maka bisa dilanjutkan dengan proses pensertifikatan. Namun apabila proses mediasi belum berhasil maka bisa dilanjutkan ke proses pengadilan.

Apabila status tanah tersebut sudah jelas milik Pemkab atau tidak ada duplikasi kepemilikan terhadap status tanah tersebut, maka selanjutnya mengajukan ke BPN untuk proses pembuatan sertifikat. Dalam wawancara terhadap informan "EM"

menjelaskan bahwa proses pensertifikatan aset tanah milik Pemkab dilakukan oleh OPD masing-masing, kecuali aset tersebut merupakan aset umum Pemkab dan bukan dalam penguasaan OPD.

Dalam hal pensertifikatan tanah, biaya yang dikeluarkan dapat dianggarkan dalam DPA masing-masing OPD. Namun sebelum OPD menganggarkan pensertifikatan tanah, Bidang Aset BPPKAD menentukan aset-aset mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, seperti aset yang sedang menjadi sengketa atau aset yang sedang dikuasai pihak lain. Sertifikat yang sudah terbit atas nama Pemkab kemudian disimpan oleh Bidang Aset BPPKAD dan dicatat dalam Buku Besar Aktiva Tetap.

Pada aset tanah yang dikuasai pihak lain, maka Bagian Pemerintahan Umum selaku fasilitator permasalahan penertiban aset Pemkab mengundang pihak-pihak terkait untuk mengadakan rapat membahas kejelasan penggunaan lahan tersebut. Dalam rapat tersebut, diberikan tiga opsi bagi pihak yang sudah menggunakan lahan milik Pemkab yaitu pinjam pakai, sewa, atau bagi hasil. Apabila pihak pengguna lahan menyetujui salah satu opsi tersebut, maka Bidang Aset BPPKAD dan pihak pengguna lahan menandatangani surat perjanjian pinjam pakai atau sewa atau bagi hasil. Berdasarkan surat perjanjian tersebut maka status lahan pada Buku Besar Aktiva Tetap diubah.

Apabila pihak pengguna lahan tidak sepakat terhadap opsi-opsi yang diberikan, maka pihak Pemkab memberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali untuk melakukan pengosongan lahan tersebut. Kemudian apabila masih belum ada tanggapan, maka dibuatkan surat pernyataan. Langkah terakhir yang harus dilakukan Pemkab apabila masih belum juga ada tanggapan dari pihak yang menyengketakan, maka dilakukan tindakan pemindahan paksa atau mengadukan ke pengadilan dengan tuduhan penyerobotan tanah milik Pemkab.

Langkah-langkah pengamanan hukum seperti yang telah dijelaskan dapat digambarkan seperti pada Tabel 3.

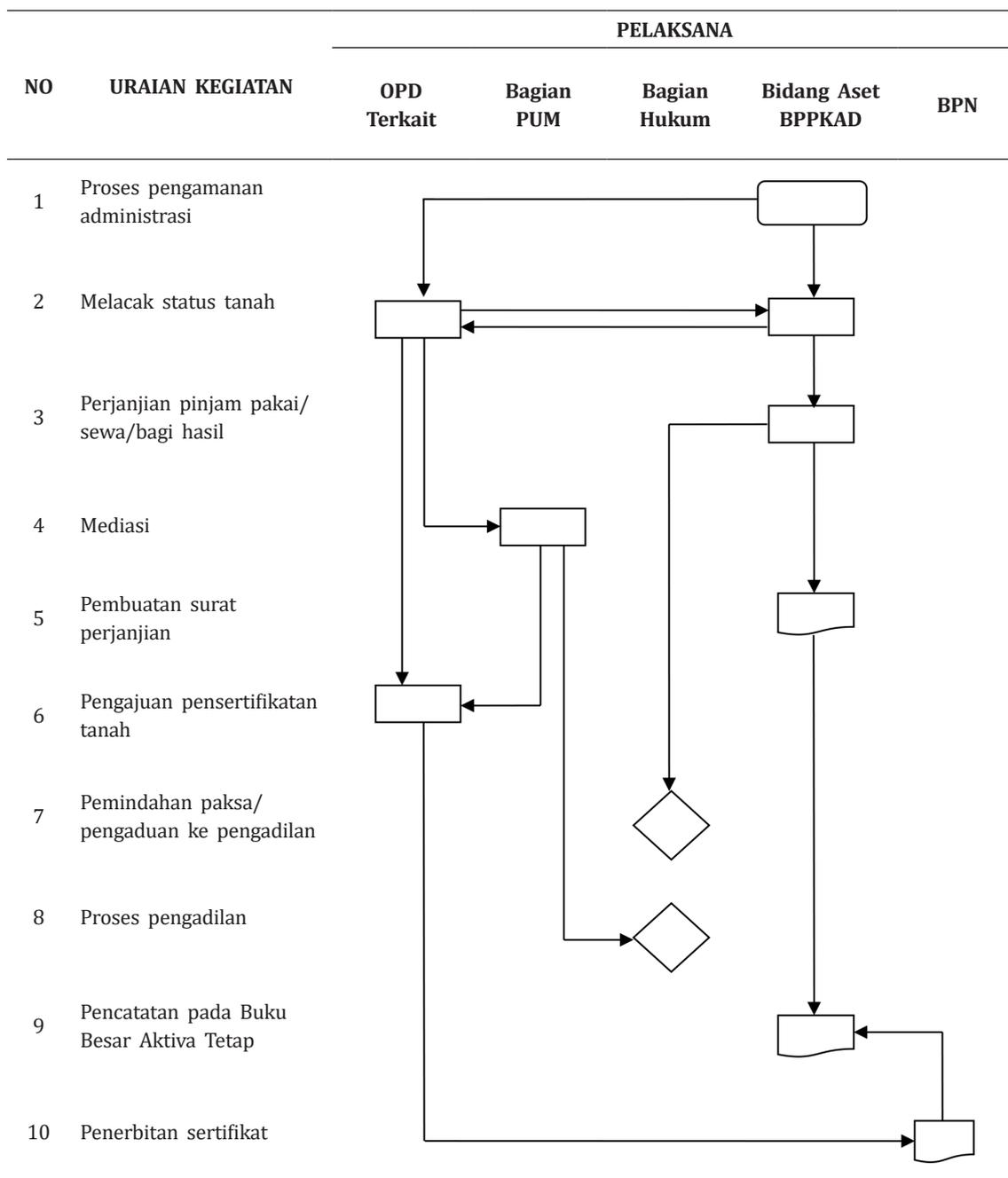
Model Pengamanan Fisik Aset Tidak Bergerak

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa pengamanan hukum untuk aset tak bergerak akan menghasilkan input berupa sertifikat hak milik atas tanah sebagai tanda bahwa tanah tersebut telah sah menjadi milik pemerintah Kabupaten Sumenep. Selanjutnya, setelah pengamanan hukum maka dilanjutkan dengan pengamanan fisik terhadap aset tidak bergerak tersebut. Pengamanan fisik tersebut dapat berupa patok maupun pagar.

Menurut keterangan informan "EM" bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam hal ini melalui BPPKAD maupun OPD telah melakukan pengamanan aset tak bergerak melalui pematokan aset tersebut. Pemasangan patok tersebut dilakukan pada aset tanah yang sudah bersertifikat. Namun hal tersebut selama ini, menurut analisis peneliti, memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya dikarenakan hal tersebut tidak mempunyai standar acuan yang jelas semisal model maupun SOP untuk penyelesaian pengamanan fisik, sehingga tidak ada acuan yang jelas dalam melakukan kegiatan pengamanan fisik

terhadap aset tak bergerak. Selain itu juga, model pengamanan fisik yang ada selama ini belum mencakup tentang proses tindak lanjut atas adanya aduan masyarakat maupun temuan dari OPD/BPPKAD tentang aset tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Sumenep yang digunakan oleh pihak lain tanpa adanya perjanjian sewa/pinjam.

Tabel 3. Model Pengamanan Hukum Aset Tidak Bergerak



Sumber: data yang diolah (2018)

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menawarkan model pengamanan fisik aset tak bergerak di Kabupaten Sumenep agar pengamanan fisik aset tak bergerak dapat optimal. Pelaksanaan pengamanan fisik aset tidak bergerak dimulai ketika ada aduan masyarakat terhadap adanya lahan/tanah milik pemerintah daerah yang digunakan oleh pihak lain atau disalahgunakan oleh pihak yang melanggar ketentuan perjanjian penggunaan tanah milik pemerintah daerah. Aduan tersebut disampaikan kepada Bupati Sumenep melalui Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah selaku fasilitator penertiban aset daerah Kabupaten Sumenep. Selain itu pengamanan fisik aset tanah juga dilakukan atas inisiatif Tim Penertiban Aset Kabupaten Sumenep terhadap tanah yang dikhawatirkan akan disalahgunakan pihak lain, atas dasar aset tersebut sudah memiliki status yang jelas kepemilikannya oleh Pemkab atau sudah bersertifikat atas nama Pemkab.

Setelah ditentukan aset tanah yang akan dilakukan pengamanan fisiknya, selanjutnya Bagian Pemerintahan Umum Setda mengundang tim penertiban aset daerah serta pihak-pihak yang bersangkutan terkait permasalahan tanah tersebut untuk mengadakan rapat penyelesaian permasalahan tanah.

Dalam rapat tersebut dibahas mengenai kejelasan status tanah, kondisi terbaru setelah dilakukan survey lapangan, apakah di atas tanah tersebut terdapat bangunan atau tidak. Survey lapangan dilakukan oleh Bidang Aset BPPKAD, OPD penanggungjawab aset tanah tersebut, Camat pada lokasi aset serta pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep.

Setelah diketahui bahwa status tanah tersebut jelas merupakan milik pemerintah daerah, maka dilaksanakan pengukuran ulang terhadap aset tanah tersebut yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep. Proses selanjutnya yaitu dengan memasang tanda letak tanah berupa patok atau pagar batas. Untuk tanah yang sudah ditempati pihak ketiga dengan surat perjanjian baik perjanjian sewa, pinjam pakai atau bagi hasil, dipasang tanda kepemilikan Pemkab berupa papan bertuliskan "Tanah ini milik Pemkab".

Dari penjelasan tersebut, maka langkah-langkah pengamanan fisik aset tidak bergerak di Kabupaten Sumenep dapat digambarkan seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Model Pengamanan Fisik Aset Tidak Bergerak

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA	
		OPD Terkait	Bidang Aset BPPKAD
1	Tanah dengan status hukum jelas		
2	Pembuatan surat perjanjian sewa/pinjam pakai/ bagi hasil		
3	Pencatatan pada Buku Besar Aktiva Tetap		
4	Pemasangan tanda kepemilikan		
5	Pemasangan patok batas/pemagaran		

Sumber: data yang diolah (2018)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka model *Soft system methodology* (SSM) yang digunakan dapat memberikan bukti empiric bahwa SSM mampu mengurai dan menyelesaikan permasalahan manajemen aset di Pemkab Sumenep. Secara umum dapat diidentifikasi dengan jelas dengan menentukan *rich picture* pada penelitian ini yaitu belum adanya standar operasional prosedur dalam melaksanakan proses pengamanan aset tidak bergerak. Melalui SSM juga dapat ditentukan model pengamanan aset melalui tiga perumusan SOP yaitu pengamanan administrasi, pengamanan hukum dan pengamanan fisik. Esensinya adalah membangun model sistem melalui pemaknaan serta pemahaman secara mendalam mengenai situasi masalah sesuai fenomena yang dihadapi (Williams, 2005).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, model pengamanan administrasi yang dimulai dari permintaan laporan aset tanah dari masing-masing OPD disertai bukti-bukti pendukung semisal sertifikat. Selanjutnya laporan tersebut dilakukan verifikasi dan sinkronisasi oleh Bidang Aset BPPKAD untuk kemudian dituangkan dalam Buku Besar Aktiva Tetap. Jika terdapat aset yang belum lengkap secara administrasi, selanjutnya dilakukan pengamanan hukum. Selanjutnya model pengamanan hukum yang ditawarkan dimulai dari melacak status aset tanah, apabila ditemukan aset yang belum bersertifikat maka dilakukan pensertifikatan tanah ke BPN. Aset tanah yang sudah dilakukan pengamanan hukum dan sudah jelas statusnya kemudian perlu ditindaklanjuti melalui pengamanan fisik yang mencakup lahan/ tanah milik pemerintah daerah yang digunakan oleh pihak lain atau disalahgunakan oleh pihak yang melanggar ketentuan perjanjian penggunaan tanah milik pemerintah daerah dengan cara pemagaran atau pemasangan tanda kepemilikan.

Model pengamanan aset tidak bergerak tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pengamanan aset tidak bergerak di Kabupaten Sumenep. Selain dengan adanya SOP, disarankan juga Pemerintah Kabupaten Sumenep membuat Peraturan Daerah terkait pengelolaan aset daerah sehingga pelaksanaan pengelolaan aset di Kabupaten Sumenep dapat terlaksana dengan baik dan dapat mengangkat opini BPK terhadap Kabupaten Sumenep menjadi Wajar Tanpa Pengecualian.

PUSTAKA ACUAN

- Abdullah, S. *et al.* (2011) 'Managing Government Property Assets : The Main Issues From The Malaysian Perspective', *Journal of Techno-Social*, 3(1), pp. 35-52.
- Acharya, B. R. (2008) 'Government and Public Land Management in Nepal', pp. 1-7.
- Berahim, N., Jaafar, M. N. and Zainudin, A. Z. (2015) 'An Audit Remark on Malaysian Local Authorities Immovable Asset Management', *Journal of Management Research*, 7(2), p. 218. doi: 10.5296/jmr.v7i2.6948.
- Brocklesby, J. (1995) 'Using Soft Systems Methodology to Identify Competence Requirements in HRM', *International Journal of Manpower*, 16(5), pp. 70-84.
- Checkland, P. and Poulter, J. (2006) *Learning For Action: A Short Definitive Account of Soft System Methodology and Its Use For Practitioners, Teachers and Students*. Chichester: John Wiley and Sons, Ltd.
- Checkland, P. and Scholes, J. (1990) *Soft System Methodology in Action*. England: John Wiley and Sons, Ltd.
- Jackson, M. C. (2001) 'Critical Systems Thinking and Practice', *European Journal of Operational Research*, 128(2), pp. 233-244.
- Kerekes, C. B. and Williamson, C. R. (2010) 'Propertyless in Peru , Even with a Government Land Title', *American Journal of Economics and Sociology*, 69(3), pp. 1011-1033.
- Krisindarto, A. (2012) 'Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang', *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8(4), pp. 403-411.
- Luckett, S., Ngubane, S. and Memela, B. (2001) 'Designing A Management System for A Rural Community Development Organization Using A Systemic Action Research Process', *Systemic Practice and Action Research*, 14(4), pp. 517-542.
- Mingers, J. (2000) 'An Idea Ahead of Its Time : The History and Development of Soft Systems Methodology', *Systemic Practice and Action Research*, 13(6).
- Mulalinda, V. and Tangkuman, S. J. (2014) 'Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situro', *Jurnal EMBA*, 2(17), pp. 521-531.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- Ratnasari, D. (2013) 'Manajemen Aset Daerah melalui Pengamanan Barang Milik Daerah pada Aset Tidak Bergerak di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya', *E-Journal UNESA*, 3(5).
- Williams, B. (2005) 'Soft Systems Methodology', *The Kellogg Foundation*, (December), pp. 1-20.
- Wulandari, S. (2017) 'Optimalisasi Dalam Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tanah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat', *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 3(1), pp. 1-27.

Pengaruh *Debt Covenant*, Profitabilitas, *Exchange Rate*, Mekanisme Bonus pada *Transfer Pricing*

Hepi Prayudiawan¹, Jodie Dwi Pamungkas²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

¹hepi@uinjkt.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of Debt Covenant, Profitability, Exchange Rate, and Bonus Mechanisms on the company's decision to do Transfer Pricing. The independent variable in this study is transfer pricing which is proxied by the sale of related parties. The independent variables in this study are Debt Covenant, Profitability, Exchange Rate, and Bonus Mechanisms. This study used data from financial statements or annual reports of companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The population of this study are all companies listed on the Indonesia Stock Exchange except for finance sector in 2016-2018. The results of the analysis of this study indicated that the Profitability variable influences the company's decision to do Transfer Pricing, while Debt Covenant, Exchange Rate and Bonus Mechanism indicated that the variable did not affect the company's decision to do Transfer Pricing.

Keywords: Debt Covenant, Profitability, Exchange Rate, Bonus Mechanisms, Transfer Pricing

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Debt Covenant*, Profitabilitas, *Exchange Rate*, dan Mekanisme Bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Transfer Pricing* yang diproksikan dengan adanya penjualan kepada pihak berelasi/mempunyai hubungan istimewa. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah *Debt Covenant*, Profitabilitas, *Exchange Rate*, dan Mekanisme Bonus. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*, sedangkan *Debt Covenant*, *Exchange Rate*, dan Mekanisme Bonus menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*.

Kata Kunci: *Debt Covenant*, Profitabilitas, *Exchange Rate*, Mekanisme Bonus, *Transfer Pricing*

PENDAHULUAN

Transfer pricing yang dilakukan perusahaan multinasional didorong oleh alasan pajak maupun non pajak. Praktik *transfer pricing* sering kali dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang mesti dibayar. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban pajak tersebut. *Transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) (Chandraningrum, 2014). Hal tersebut telah menyebabkan kerugian yang besar bagi negara berkembang termasuk Indonesia, karena pajak merupakan salah satu sumber APBN bagi negara.

Google Inggris yang pada tahun 2011 berhasil mencatat pendapatan sebesar £398 juta tetapi hanya membayar pajak sebesar £6 juta. Hal yang sama terjadi di Amazon Inggris, di mana mereka berhasil melakukan penjualan di Inggris sebesar £3,35 miliar selama tahun 2011 tetapi hanya membayar pajak sebesar £1,5 juta. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan multinasional tersebut menggunakan praktik *transfer pricing* untuk tujuan yang salah yaitu meminimalkan pembayaran pajak mereka. Hal yang sama juga terjadi di negara-negara lain termasuk di Amerika Serikat. Bahkan saat ini Amazon sedang berhadapan dengan pihak otoritas pajak Amerika Serikat (IRS) juga untuk kasus *transfer pricing* dengan nilai \$234 juta (Setiawan, 2014).

Dengan demikian, manipulasi *transfer pricing* terjadi dengan cara menetapkan harga transfer menjadi “terlalu besar atau terlalu kecil” dengan maksud untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Karena dengan memperkecil jumlah pajak yang terutang, keuntungan yang diterima oleh perusahaan multinasional akan semakin besar (Fitri et al., 2019). Penelitian ini membahas variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia kecuali sektor *finance*. Variabel-variabel yang akan dianalisis adalah *debt covenant*, profitabilitas, *exchange rate*, dan mekanisme bonus. Peneliti menguji apakah terdapat hubungan antara keempat variabel tersebut terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Penelitian mengenai *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pun telah dilakukan oleh (Rosa et al., 2017) Kontrak hutang jangka panjang (*Debt Covenant*) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti pembagian dividen yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas berada dibawah tingkat yang telah ditentukan. Perjanjian ini membatasi segala aktivitas perusahaan yang dapat merusak nilai pinjaman. Dengan adanya batasan-batasan ini dapat memicu pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan karena tidak mampu bergerak bebas. Untuk menghindari pelanggaran tersebut maka kecenderungan salah satu praktek yang dilakukan perusahaan laba adalah dengan melakukan *transfer pricing*. Sesuai dengan *The Debt Covenant Hypotesis* dalam teori akuntansi positif, semakin cenderung suatu perusahaan untuk melanggar perjanjian hutang maka manajer akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat mentransfer laba periode mendatang ke periode berjalan.

Berdasarkan teori akuntansi positif, *debt covenant* akan mendorong para pemegang saham mayoritas untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian terkait tentang *debt covenant* telah dilakukan oleh Rosa et al., (2017) yang menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berikutnya yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, profitabilitas sendiri diukur kinerjanya menggunakan *return of asset* (ROA). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan cenderung untuk melakukan *transfer pricing* untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Ini sesuai dengan hasil penelitian dari Richardson et al., (2013) dan Kusuma dan Wijaya (2017). Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Kustiani (2017) dan Waworuntu dan Hadisaputra (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Selain itu, yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* ialah nilai tukar kurs (*exchange rate*). *Exchange rate* sangat berhubungan erat dengan perdagangan internasional, karena arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu (fluktuatif). *Exchange rate* yang berbeda-beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional (Marfuah dan Azizah, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Akhadya dan Ariefiara (2019) dan Cahyadi dan Noviani (2018) menyatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian dari Marfuah dan Azizah (2014) dan Cahyadi dan Kurniawan (2018) menunjukkan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Mekanisme Bonus juga berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Mengingat mekanisme bonus pada hakekatnya berdasarkan pada besarnya laba yang di peroleh oleh perusahaan. Dimana sistem dalam pemberian kompensasi bonus ini akan memberikan pengaruh terhadap manajemen dalam hal merekayasa laba (Fitri et al., 2019). Sesuai dengan *bonus plan hypothesis* manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai untuk menggunakan metode akuntansi yang menaikkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima (Indrasti, 2016). Penelitian dari Saifudin dan Putri (2018), Rachmat (2019) dan Santosa dan Suzan (2018) menunjukkan yaitu mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan penelitian dari Indrasti (2016) menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Penelitian bertujuan menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan harga transfer. Hal tersebut karena praktek *transfer pricing* ini tidak hanya terjadi pada perusahaan manufaktur (*Miscellaneous Industry, Basic Industry and Chemicals, & Consumer Goods Industry*), namun juga terjadi pada sektor-sektor lain seperti *Mining*

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian Cahyadi dan Noviani (2018). Peneliti menggunakan variabel independen yang sama yaitu profitabilitas, *exchange rate* dan variabel

dependen yaitu keputusan *transfer pricing*. Persamaan lain juga dalam objek ini adalah menggunakan menggunakan populasi perusahaan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah mengganti variabel independen pajak dan leverage menjadi *debt covenant* dan mekanisme bonus, populasi perusahaan dari seluruh sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia kecuali sektor *finance* yang tadinya menggunakan manufaktur (*Miscellaneous Industry, Basic Industry and Chemicals, & Consumer Goods Industry*), kemudian penelitian ini meneliti periode 2016-2018.

Perusahaan yang mempunyai rasio leverage (*debt/equity*) yang besar akan lebih suka memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan pelaporan laba untuk periode mendatang ke periode sekarang. Dengan memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan pengakuan laba untuk periode mendatang ke periode sekarang maka perusahaan akan mempunyai rasio *leverage* yang kecil (Watts dan Zimmerman, 1986). Alasannya adalah laba yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian. Indrasti (2016) menemukan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosa et al., (2017).

H_1 : *Debt Covenant* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer Pricing decision*

Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan menyebabkan kewajiban pada sektor perpajakan juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Noviyari (2018), menyatakan bahwa Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar insentif perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Richardson, et al., (2013) namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anh et al., (2018), Ramadhan dan Kustiani (2017). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing Decision*

Exchange rate mempengaruhi laba perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan multinasional menggunakan *transfer pricing* untuk mengurangi risiko nilai tukar (*exchange rate*) dengan mentransfer dana ke mata uang yang kuat (Chan et al., 2002). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cravens dan Shearon (1996) yang menyatakan bahwa untuk mengendalikan risiko dari keuntungan maupun kerugian transaksi perusahaan dapat menggunakan *transfer pricing* sebagai pagar pelindung untuk menghadapi perubahan nilai tukar. *Transfer pricing* dapat digunakan untuk mengurangi eksposur transaksi perusahaan

multinasional terhadap risiko perubahan nilai tukar dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat.

Penelitian dari Sarifah et al., (2019) yang menunjukkan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun penelitian dari Cahyadi dan Noviari (2018) dan Marfuah dan Azizah (2013) menunjukkan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₃ : *Exchange Rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer Pricing decision*

Refgia (2017) menyatakan bahwa Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan untuk memperoleh bonus dalam mengelola perusahaan. Oleh sebab itu, direksi mampu mengangkat laba pada tahun yang diharapkan yaitu dengan menjual persediaan kepada antarperusahaan satu grup dalam perusahaan multinasional dengan harga dibawah pasar. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan perusahaan dan meningkatkan laba pada tahun tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri et al., (2019), Santosa dan Suzan (2018) dan Melmusi (2016) menunjukkan bahwa mekanisme bonus memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sarifah et al., (2019), Rosa et al., (2017), dan Marisa (2017) menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut terdapat inkonsistensi mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* sehingga perlu diuji kembali. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₄ : Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer Pricing decision*

METODE

Populasi penelitian ini adalah perusahaan seluruh sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) kecuali sektor *finance* periode 2016-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Peneliti menentukan sampel sebagai objek penelitian dengan kriteria sebagai berikut: 1). Seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesai (BEI) kecuali sektor *Finance* pada periode 2016-2018. 2). Perusahaan sampel dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan 20% atau lebih. 3). Data laporan keuangan perusahaan sampel selalu tersedia untuk tahun pelaporan 2016-2018. 4). Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan. 5). Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tahunan dalam satu jenis mata uang yaitu rupiah. 6). Perusahaan sampel mempunyai data laba/rugi selisih kurs.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik dengan melihat pengaruh *debt covenant*, profitabilitas, *exchange rate*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Model regresi adalah:

$$\ln = \left(\frac{p}{1-p}\right) = TP = \alpha + \beta_1 DC + \beta_2 PROFIT + \beta_3 EC + \beta_4 MB + \varepsilon$$

Keterangan:

TP : *Transfer Pricing*, 1 untuk perusahaan yang melakukan Penjualan ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa, 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan penjualan ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$: Koefisien variabel independen

DC : *Debt Covenant*

PROFIT: Profitabilitas

ER : *Exchange Rate*

BONUS : Mekanisme Bonus

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis maka digunakan pengujian data dengan menggunakan model regresi *binary logistic*. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model fit dengan data baik sebelum maupun sesudah variabel bebas dimasukkan ke dalam model. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LL) pada awal (Block Number =0) dengan nilai -2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir (Block Number =1). Adanya pengurangan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LL) awal dengan -2 Log Likelihood (-2LL) akhir menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data. Berikut ini disajikan data hasil pengujian kesesuaian keseluruhan model:

Tabel 1. Hasil Uji Kesesuaian Keseluruhan Model

Keterangan	-2 Log Likelihood
Block Number = 0	171.222
Block Number = 1	153.579

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai *Block Number* = 0 (nilai awal) model yang hanya memasukan konstanta mempunyai nilai -2LL sebesar 171.222 Sedangkan pada *Block Number* = 1 (nilai akhir) mengalami penurunan setelah masuknya beberapa variabel independen dalam penelitian, nilai -2LL menjadi 153.579. Penurunan ini menunjukkan bahwa model regresi yang baik dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data, artinya penambahan variabel independen yaitu *debt covenant*, profitabilitas, *exchange rate* dan mekanisme bonus akan memperbaiki model fit penelitian ini.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas dari variabel-variabel independen dapat memperjelas variabilitas variabel independen. Koefisien determinasi pada regresi logistik dapat dilihat pada nilai *Nagelkerke R Square*. Berikut hasil pengujian koefisien determinasi:

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	153.579 ^a	.120	.169

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *Nagelkerke R Square* adalah 0,169 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen seperti *debt covenant*, profitabilitas, *exchange rate* dan mekanisme bonus adalah sebesar 16.9% dan sisanya sebesar 83,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain seperti pajak (Refgia, 2017), kepemilikan asing (Fitri et. al, 2019), *intangible asset* (Anh et al., 2018), ukuran perusahaan (Merle et al., 2019), *tunneling incentive* (Santosa dan Suzan, 2018), *leverage* (Cahyadi dan Noviani, 2018), *Good Corporate Governance* (Rosa et al., 2017), *Multinationality* (Waworuntu dan Hadisaputra, 2016), *Tax Haven Utilitsation* (Anh et al., 2018), serta variabel variabel lain yang berada di luar model penelitian.

Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test digunakan untuk menilai kelayakan model regresi yang digunakan. Model ini untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit (Ghozali, 2018). Berikut ini disajikan data hasil pengujian kelayakan model regresi:

Tabel 3. Hasil Uji Kelayakan Model Regresi

Step	Chi-square	df	Sig.
1	7.865	8	.447

Berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai *Chi-Square* sebesar 7,865 dengan signifikansi (p) sebesar 0,447. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa model telah mampu memprediksi nilai observasinya karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan membuat keputusan *transfer pricing*. Tabel klasifikasinya menghitung estimasi yang benar (*correct*) dan salah (*incorrect*). Hasil uji matriks klasifikasi ditunjukkan pada berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Matriks Klasifikasi

	Observed	Predicted		Percentage Correct	
		TP			
		.00	1.00		
Step 1	TP	.00	8	35	18.6
		1.00	8	87	91.6
Overall Percentage				68.8	

Tabel 4 menunjukkan bahwa kekuatan model regresi dalam memprediksi tingkat prediksi model adalah sebesar 68.8% dimana 18.6% tidak ada *transfer pricing* dan 91,6% ada transaksi *transfer pricing* telah mampu diprediksi oleh model. Artinya kemampuan prediksi dari model dengan variabel *debt covenant*, profitabilitas, *exchange rate*, dan mekanisme bonus secara statistik memprediksi sebesar 91,6%.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas (*sig*). Apabila angka signifikansi menunjukkan angka yang lebih kecil terlihat 0,05 maka koefisien regresi adalah signifikan pada tingkat 5%. Hal tersebut berarti H0 ditolak dan H1 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel dependen. Hasil pengujian memberikan model regresi logistik yang terbentuk yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik

	Variabel	B	Sig.
Step 1 ^a	DC (<i>Debt Covenant</i>)	.650	.125
	PROFIT (Profitabilitas)	16.406	.001
	ER (<i>Exchange Rate</i>)	.045	.903
	MB (Mekanisme Bonus)	-.002	.825
	Constant	-.731	.482

Berdasarkan hasil uji regresi logistik pada tabel 5, dapat diketahui tingkat signifikansi yang berada diatas 0,05 yaitu sebesar 0.125 ($0.125 > 0.05$). Artinya adalah *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Oleh karena itu hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Indrasti (2016) yang menyatakan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* bahwa dimana pada perusahaan besar sistem pengontrolan dan pengawasannya lebih ketat, dikarenakan laporan keuangannya akan dipublikasikan dan Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam perusahaan yang dijadikan sampel, tidak melakukan *transfer pricing* yang ditujukan untuk menaikkan laba guna mengendurkan batas perjanjian atau peraturan kredit yang tercantum dalam *debt covenant*.

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Rosa et al., (2017) yang menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung teori akuntansi positif yang mengusulkan hipotesis perjanjian hutang bahwa makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan hutang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini.

Berdasarkan hasil uji regresi logistik pada tabel 5, juga diketahui tingkat signifikansi di bawah 0,05 (5%) yaitu sebesar 0,001. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0.001 < 0.05$). artinya adalah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. maka hipotesis kedua (H_1) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* diterima.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Sari dan Mubarak, (2017), dan Cahyadi dan Noviari, (2018) hal ini berarti bahwa perusahaan dengan keuntungan sebelum pajak yang tinggi memiliki kecenderungan untuk menghindari pendapatan yang dapat dikenai pajak penghasilan. Konsekuensinya, perusahaan yang pendapatannya tinggi akan meningkatkan keuntungan ke perusahaan berelasi yang tarif pajaknya rendah untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan dan meningkatkan laba setelah pajak yang dihasilkan (Waworuntu dan Hadisaputra, 2016).

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Anh et al., (2018) dan Ramadhan dan Kustiani (2017) yang menyebutkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. hal ini berarti bahwa baik perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi maupun tingkat profitabilitas rendah memiliki kemungkinan yang sama untuk melakukan *transfer pricing*, dan ahli pajak juga memperhatikan bahwa sebagian besar perusahaan multinasional di Vietnam belum mendapatkan keuntungan sejak mengawali bisnisnya di negara tersebut. Namun mereka tetap mengembangkan bisnis dan produksi (Anh et al., 2018).

Hasil uji regresi logistik di tabel 5 juga menunjukkan variabel *exchange rate* memiliki tingkat signifikansi di atas 0,05 (5%) yaitu sebesar 0,903. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ maka hipotesis ketiga (H_3) ditolak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Akhadya dan Arieftiara (2019) dan Cahyadi dan Kurniawan (2018), yang menyebutkan *Exchange rate* tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Hal ini berarti bahwa fluktuasi *exchange rate* tidak mempengaruhi pertimbangan perusahaan apakah perusahaan akan memilih untuk melakukan keputusan *transfer pricing* atau tidak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chan et al., (2002) yang menyebutkan *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing* yang menemukan bahwa untuk mengurangi risiko nilai tukar (*exchange rate*) perusahaan multinasional mungkin mencoba memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Ditolaknya hipotesis ketiga ini kemungkinan disebabkan karena dalam laporan keuangan sampel perusahaan, banyak terdapat kerugian pada laba atau rugi selisih mata uang asing sehingga *exchange rate* tidak menjadi sorotan pokok dalam kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing*.

Hasil uji regresi logistik di tabel 5, juga menunjukkan tingkat signifikansi variabel bonus yang berada di atas 0,05 yaitu sebesar 0.825. Oleh karena itu hipotesis keempat (H_4) yang berarti hipotesis keempat yang menyatakan bahwa mekanisme bonus

berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan ditolak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Santosa dan Suzan (2018) dan Marisa (2017), yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, karena bonus yang dijanjikan pemilik perusahaan terhadap direksi dengan harapan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan tidak membuat mereka termotivasi melakukan tindakan *transfer pricing*.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Rachmat (2019) dan Saifudin dan Putri (2018), artinya bonus yang direncanakan terhadap direksi jika mampu meningkatkan laba perusahaan, justru memicu direksi untuk meningkatkan laba dari tahun ke tahun dengan cara yang paling mudah yaitu *transfer pricing* karena dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) kecuali sector *finance* tahun 2016-2018 dapat diambil simpulan *Debt Covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing decision*. Profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing decision*. *Exchange Rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing decision*. Mekanisme Bonus *Rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing decision*. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan tambahan kontribusi berupa informasi terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* pada perusahaan. Adapun faktor yang mempengaruhi *transfer pricing decision* perusahaan pada penelitian ini adalah profitabilitas.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi para eksekutif perusahaan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong kebijakan manajemen dalam mengambil keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai pengembangan penelitian baru terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

PUSTAKA ACUAN

- Akhadya, Dwi Puspita, and Dianwicakasih Arieftiara. 3 (2019), Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Unesa* 6, no.: 1–20.
- Anh, N. H., Hieu, N. T., & Nga, D. T. (2018). Determinants Of Transfer Pricing Aggressiveness: A Case Of Vietnam. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 16(5), 104–112.
- Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(2), 1441–1473.

- Chan, C., Landry, S. P., & Jalbert, T. (2002). Effects of Exchange Rates On International Transfer Pricing Decisions. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 3(3), 35–48.
- Chandraningrum, T. M. (2014). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Perencanaan Pajak Bagi Perusahaan Multinasional. Universitas Negeri Surabaya, 1–20.
- Fitri, D., Hidayat, N., & Arsono, T. (2019). The Effect Of Tax Management, Bonus Mechanism And Foreign Ownership On Transfer Pricing Decision (Studi Pada Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 36–48.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indrasti, A. W. (2016). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). *Anita Wahyu Indrasti*, 9(3), 348–371.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Marfuah, & Azizah, A. P. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *JAAI*, 18(1), 156–165.
- Marisa, R. (2017). Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling Incentive, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. Universitas Negeri Surabaya.
- Melmusi, Z. (2016). Pengaruh Pajak , Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2016. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi* , 5(2), 1–12.
- Merle, R., Al-Gamrh, B., & Ahsan, T. (2019). Tax havens and transfer pricing intensity: Evidence from the French CAC-40 listed firms. *Cogent Business & Management*, 6(1), 1–12.
- Ramadhan, Muhammad Rheza, and Nur Aisyah Kustiani. (2017). Faktor Penentu Agresivitas Transfer Pricing. *Politeknik Keuangan Negara-STAN*,
- Refgia, T. (2016). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 543–555.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Journal of Contemporary Accounting & Economics Determinants of transfer pricing aggressiveness : Empirical evidence from Australian firms. *Journal Of Contemporary Accounting And Economics*, 9(2), 136–150.
- Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Insentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Transaksi Transfer Pricing. *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Pandanaran Semarang*.
- Saifudin, L. S. P. (2018). Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Emiten BEI. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 32–43.

- Santosa, S. J. D., & Suzan, L. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Kajian Akuntansi*, 76–83.
- Sari, Eling Pamungkas, and Abdullah Mubarok. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing." *Seminar Nasional I Universitas Pamulang*, Hal 1-6.
- Sarifah, D. A., Probowulan, D., & Maharani, A. (2019). Dampak Effective Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 215–228.
- Watts, R. L. (2003). *Conservatism in Accounting*. University of Rochester
- Watts, Ross L dan Zimmerman J.L, (1986) "Positive Accounting Theory", Prentice-Hall, London
- Waworuntu, S.R., and R. Hadisaputra. (2016) "Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness in Indonesia." *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum.* 24: 95–110.
- Yuniasih, N. W., Rasmini, N. K., & Wirakusuma, M. G. (2013). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 1–23.

Determinan Kinerja Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah

Syukriy Abdullah¹, Afrah Junita²

¹Universitas Syiah Kuala, ²Universitas Samudra

¹syukriyabdullah@unsyiah.ac.id

Abstract

Budget performance is the basis for evaluating and assessing the quality of financial management and budgeting in government organizations, especially in local government's agencies. The purpose of this study is to examine the effect of budget size (TB), budget change (PB), and previous year budget variance (VS) on budget performance (KA) at agencies of Gayo Lues Regency. The sample in this study amounted to 44 work units of regional apparatus (SKPD) for fiscal year 2016-2017. Data analysis using multiple linear regression model. The results show that PB has no effect on KA, while TB and VS have negative effect on KA.

Keywords: budget variance, budget changes, prior-year budget balance, budget performance, local government agencies

Abstrak

Kinerja anggaran (KA) merupakan dasar yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai kualitas pengelolaan keuangan dan penganggaran pada organisasi pemerintahan, terutama pada pemerintahan daerah dan unit kerja yang berada di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Total Belanja (TB), Perubahan Belanja (PB), dan Varian Belanja Tahun Sebelumnya (VS) terhadap Kinerja Anggaran (KA) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Gayo Lues. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 44 SKPD untuk tahun anggaran 2016-2017. Analisis data menggunakan model regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa TB dan VS berpengaruh negatif terhadap KA, sedangkan PB tidak berpengaruh terhadap KA.

Kata Kunci: varian anggaran, perilaku oportunistik, peyesuaian anggaran, kinerja anggaran, satuan kerja perangkat daerah

PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja anggaran organisasi perangkat daerah (OPD)¹ dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk menilai kemampuan organisasi ini mencapai target yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tujuan RPJMD sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan dan penggunaan dana publik secara ekonomis, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan di SKPD harus dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan partisipatif, diawali dengan penyusunan anggaran dan diakhiri dengan pertanggungjawaban serta diiringi dengan pengawasan. Semua aspek pengelolaan ini dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah daerah (Pemda) (Abdullah & Junita, 2016), namun kinerja keuangan SKPD sendiri belum banyak dikaji secara empiris.

Kinerja anggaran seharusnya disampaikan kepada publik dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengambilan keputusan anggaran dilaksanakan secara utuh dalam semua tahapan penganggaran, sejalan dengan penerapan prinsip partisipatif, yang membuka ruang untuk terjadinya berbagai persoalan keagenan (*agency problems*) dalam penyusunan, pembahasan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (Fozzard, 2001; Halim & Abdullah, 2006). Hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pengusul (OPD/SKPD), tim anggaran Pemda (TAPD), kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Abdullah, 2012; Junita & Abdullah, 2016). Anggaran yang dikelola secara akuntabel dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan meminimalkan praktik korupsi (Ott, et al., 2018).

Usulan anggaran yang diajukan OPD menjadi bahan untuk penyusunan draf anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan setelah ditetapkan akan menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja anggaran OPD bersangkutan. Anggaran juga merupakan alat untuk mengalokasikan sumberdaya dalam rangka memenuhi kebutuhan publik yang dilaksanakan dalam bentuk tindakan berupa layanan oleh OPD, serta untuk memprediksi pendapatan dan pengeluaran di masa depan (Joyce, 2001; Williams & Calabrese, 2016). Sebagai *agent*, OPD memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan usulan anggaran belanjanya, sehingga terjadi *mark-up*, yang merupakan *slack* dalam anggaran.

Ketidakakuratan dalam memprediksi, baik dalam bentuk *mark-down* pendapatan maupun *mark-up* belanja, dapat menyebabkan terjadi varian anggaran (*budget variances*), yakni selisih antara target yang ditetapkan dengan yang terealisasi, yang bermuara pada surplus/defisit ril dan sisa anggaran pada akhir tahun. Varian anggaran ini merupakan salah satu ukuran dalam penilaian kinerja anggaran pemerintahan daerah (Mayper, et al., 1991; Abdullah & Nazry, 2014), yang terkait erat dengan *budgetary slack* dalam penganggaran partisipatif (Abdullah, 2008). Kinerja anggaran menjadi fenomena yang dikaji dan didiskusikan oleh politisi, birokrat, dan pembuat kebijakan, terutama pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah (Rezeki &

¹ OPD sama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, yang dalam tulisan ini digunakan bergantian dengan tidak ada perbedaan makna.

Hasanuddin, 2017; Negara, et al., 2018; Abdullah, et al., 2019). Pada beberapa negara, kinerja anggaran menjadi pertimbangan dalam memilih *incumbent* untuk menjabat kembali pada periode berikutnya melalui pemilihan umum (Yuliati, et al., 2017; Darmastuti & Setyaningrum, 2019).

Pengukuran kinerja anggaran merupakan topik diskusi yang sangat penting dalam mengevaluasi dan menilai kualitas pengelolaan keuangan pada organisasi pemerintahan, terutama pada pemerintah daerah dan OPD yang berada di dalamnya. Fenomena politik anggaran di daerah menunjukkan adanya kompetisi dalam pengalokasian sumberdaya di antara OPD, yang kadangkala melibatkan DPRD (Abdullah, 2012). Praktik desentralisasi fungsional dalam penyusunan anggaran melalui partisipasi OPD berimplikasi pada terjadinya senjangan anggaran (Widanaputra & Mimba, 2014), yang merupakan bentuk bias dalam penganggaran (Lukka, 1988) yang mengandung masalah keagenan (Abdullah & Halim, 2006). Senjangan anggaran memiliki pengaruh terhadap perubahan anggaran (Forrester, 1993; Forrester & Mullins, 1992) dan varian anggaran (Abdullah, et al., 2019), sehingga berdampak pada sisa anggaran di akhir tahun yang akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya (Darma, et al., 2015; Abdullah & Mutia, 2017).

Pemerintah daerah melaksanakan fungsinya berdasarkan anggaran yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya fungsi pendidikan, kesehatan, dan sosial (Afridzal, et al., 2019). Anggaran tersebut merupakan akumulasi dari kebutuhan belanja seluruh SKPD (yang memiliki besaran anggaran berbeda), yang mencerminkan beban kerja SKPD bersangkutan, baik untuk penyelenggaraan operasional maupun pelayanan publik. Pertanggungjawaban anggaran disampaikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA), yakni laporan keuangan yang menggunakan basis kas dengan akun-akun bernama pendapatan, belanja, dan pembiayaan. LRA menyajikan informasi tentang anggaran, realisasi, dan selisih di antara keduanya. Oleh karena itu, dari LRA dapat diketahui capaian kinerja anggaran dan/atau varian anggaran, yang menunjukkan keakurasian dalam penyusunan anggaran, cerminan kualitas penganggaran pada pemerintah daerah.

Adanya senjangan dalam penyusunan anggaran, yang berimplikasi pada terjadinya varian anggaran, menunjukkan adanya masalah keagenan dalam proses penyusunan anggaran (Smith & Bertozzi, 1998; Halim & Abdullah, 2006; Abdullah & Nazry, 2015; Junita, 2018) dan kekuatan politik yang terlibat di dalamnya (Weingast, et al., 1981; Abdullah, 2012;) sehingga terjadi bias dalam perumusannya (Larkey & Smith, 1989). Birokrat juga memiliki kecenderungan *moral hazard* dalam penganggaran (McGuire, 1981; Blais & Dion, 1991; Fozzard, 2001). Masalah keagenan dapat menyebabkan pengguna informasi anggaran membuat kesalahan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan (Gorina, et al., 2019).

Studi terdahulu telah menemukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja atau serapan anggaran Pemda, namun dengan hasil beragam dan konteks berbeda. *Pertama*, besaran anggaran (*budget size*), yang mengindikasikan beban kerja dan lingkup tanggungjawab organisasi pemerintah. Hasil penelitian Puspitasari (2013) menunjukkan bahwa besaran anggaran berkaitan dengan serapan anggaran, berbeda dengan temuan

Ruhmaini, et al. (2018) yang menyatakan bahwa besaran anggaran tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja langsung.

Kedua, perubahan anggaran. Lestari, et al. (2014) menemukan bahwa serapan anggaran berhubungan positif dengan perubahan anggaran. Zakiati (2016) menyatakan bahwa penambahan alokasi belanja pada SKPD di Kota Sabang menjadi kendala bagi SKPD dalam merealisasikan anggarannya. Lebih spesifik, temuan Ruhmaini, et al. (2018) menunjukkan bahwa perubahan anggaran berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran belanja langsung di SKPD. Perubahan dalam komponen anggaran belanja sendiri memiliki korelasi satu sama lain, misalnya perubahan belanja tidak langsung berkorelasi positif dengan belanja langsung (Nikmawati, et al., 2016).

Ketiga, sisa anggaran tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran (Darma, et al., 2015). Studi terdahulu menemukan bahwa sisa anggaran tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran belanja langsung SKPD (Ruhmaini, et al., 2018) dan pendidikan (Afridzal, et al., 2019). Namun, secara kasuistik, beberapa SKPD di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2015 yang mengalami peningkatan jumlah sisa anggaran tahun sebelumnya, justru memiliki serapan anggaran yang tinggi pada tahun bersangkutan (Abdullah, 2020). Hal ini kemungkinan disebabkan adanya pemrioritasan sisa anggaran tahun sebelumnya dalam merealisasikan anggaran dan anggaran kas dilaksanakan dengan baik.

Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk menguji pengaruh besaran anggaran belanja, perubahan anggaran belanja, dan varian anggaran tahun sebelumnya terhadap kinerja anggaran OPD (diukur dengan varian belanja tahun berjalan) pada pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan anggaran dan sisa anggaran tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran SKPD, sedangkan besaran anggaran tidak memiliki pengaruh. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan terkait dengan upaya untuk mengurangi sisa anggaran pada akhir tahun, misalnya dengan memperketat evaluasi usulan anggaran OPD, baik dalam anggaran awal maupun anggaran perubahan. Masalah keagenan eksis karena ketidakmampuan pemerintah daerah dalam pengendalian anggaran secara komprehensif.

METODE

Sampel dan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gayo Lues untuk tahun anggaran 2016-2017. Data tersebut diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Populasi penelitian ini adalah SKPD pada pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebanyak 50 SKPD. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria: tidak mengalami perubahan struktur/organisasi dan memiliki anggaran dan perubahan anggaran relatif besar, yakni lebih besar dari Rp1.000.000.000. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 44 SKPD selama tahun 2016-2017 (Lihat Tabel 1).

Tabel 1. Sampel Penelitian

No.	Nama SKPD	No.	Nama SKPD
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	23.	Satuan Polisi Pamong Praja dan WH
2.	Dinas Kesehatan	24.	Sekretariat MAA
3.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian	25.	Sekretariat MPU
4.	Dinas Pekerjaan Umum	26.	Sekretariat MPD
5.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan UKM	27.	Sekretariat Baitul Mal
6.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	28.	Sekretariat DPRK
7.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	29.	Sekretariat Daerah
8.	Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota	30.	Rumah Sakit Umum Daerah
9.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	31.	Sekretariat KORPRI
10.	Dinas Syariat Islam	32.	Dinas Perpustakaan
11.	Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)	33.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
12.	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	34.	Kecamatan Blangkejeren
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35.	Kecamatan Kutapanjang
14.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36.	Kecamatan Rikit Gaib
15.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	37.	Kecamatan Terangun
16.	Bappeda	37.	Kecamatan Dabun Gelang
17.	BKPP	39.	Kecamatan Pining
18.	Kantor Perpustakaan dan Arsip	40.	Kecamatan Pantan Cuaca
19.	Kantor Lingkungan Hidup	41.	Kecamatan Tripe Jaya
20.	KPPTSP	42.	Kecamatan Blangpegayon
21.	Kantor PP dan KB	43.	Kecamatan Blangjerango
22.	Inspektorat Daerah	44.	Kecamatan Puteri Betung

Operasionalisasi Variabel

Model regresi dalam penelitian ini menggunakan satu variabel terikat bernama Kinerja Anggaran (KA), dan tiga variabel bebas, yakni: Total Belanja (TB), Perubahan Belanja (PB), dan Varian Belanja Tahun Sebelumnya (VS). Definisi dan pengukuran variabel-variabel ini adalah sebagai berikut:

- *Kinerja Anggaran* didefinisikan sebagai sisa anggaran belanja SKPD yang tidak terserap sampai akhir tahun anggaran, yang menggambarkan kinerja anggaran SKPD selama satu tahun anggaran. Pengukuran variabel KA menggunakan selisih antara anggaran belanja setelah perubahan dengan realisasi belanja.
- *Total Belanja (TB)* adalah variabel yang menggambarkan besaran tanggungjawab suatu SKPD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Semakin besar anggaran belanja suatu SKPD, maka semakin berat beban yang harus dilaksanakannya. Variabel ini diukur dengan menggunakan angka jumlah anggaran belanja SKPD dalam APBD murni/sebelum dilakukan perubahan selama tahun berjalan.
- *Perubahan Anggaran Belanja (PB)* mencerminkan penyesuaian anggaran belanja SKPD

dengan kebutuhan dan kebijakan lain selama tahun berjalan. Besaran PB mencerminkan kualitas penganggaran SKPD yang ditetapkan pada akhir tahun anggaran sebelumnya. Variabel ini diukur dengan menggunakan angka berupa selisih antara anggaran belanja SKPD setelah perubahan dengan jumlah anggaran belanja murni/sebelum perubahan.

- *Varian Belanja Tahun Sebelumnya (VS)* mencerminkan kinerja anggaran belanja tahun lalu yang menambah beban SKPD selama tahun berjalan. Pengukuran variabel ini menggunakan angka selisih antara anggaran belanja setelah perubahan dengan realisasinya, keduanya menggunakan data tahun lalu.

Model Analisis

Model analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda menggunakan persamaan: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$, dengan Y adalah Kinerja Anggaran (KA), a adalah konstanta, b_{1-3} adalah koefisien regresi, X_1 adalah Total Belanja (TB), X_2 adalah perubahan anggaran belanja (PB), X_3 adalah Varian Belanja Tahun Sebelumnya (VS), dan e adalah *error terms* atau variabel lain yang mempengaruhi variabel Y, yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Model ini digunakan untuk memprediksi perubahan variabel KA dengan prediktor berupa variabel TB, PB, dan VS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Secara ringkas, statistik deskriptif data penelitian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

No.	Nama Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-Rata
1.	Kinerja Anggaran (KA)	-40462822	28.222.310.503	1.832.069.678
2.	Total Belanja (TB)	1.363.500.000	190.863.347.257	21.312.714.821
3.	Perubahan Anggaran Belanja (PB)	-31.411.285.462	28.470.563.130	299.638.238
4.	Varian Belanja Tahun Sebelumnya (VS)	-21.974.694.381	26.144.825.935	98.842.609

Sumber: Data Penelitian, 2019 (Diolah)

Variabel Kinerja Anggaran (KA) memiliki nilai rata-rata Rp1.832.069.678, dengan nilai terendah sebesar minus Rp40.462.822 dan tertinggi sebesar Rp28.222.310.503. Artinya, varian belanja SKPD, yang dihitung dengan mengurangkan anggaran belanja SKPD dengan realisasi belanja SKPD bersangkutan, relatif besar. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan Total Anggaran Belanja (TB), yang rata-rata sebesar Rp21.312.714.821, dengan nilai terendah dan tertinggi masing-masing Rp1.363.500.000 dan Rp190.863.347.257. Jika dibandingkan antara rata-rata KA dengan rata-rata TB, diperoleh angka 0,08596 atau 8,6%. Hal ini bermakna bahwa terjadi varian anggaran atau ketidak-akuratan dalam memprediksi anggaran sebesar 8,6% pada SKPD Kabupaten Gayo Lues selama tahun 2016-2017.

Variabel perubahan belanja (PB) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp299.638.238, dengan nilai terendah sebesar minus Rp31.411.285.462 dan tertinggi sebesar Rp28.470.563.130. Nilai terendah adalah perubahan terbesar berupa penurunan, sedangkan nilai tertinggi adalah jumlah terbesar penambahan anggaran belanja. Secara rata-rata, perubahan anggaran adalah 1,41 persen dari jumlah anggaran belanja di awal tahun (murni).

Variabel varian anggaran tahun sebelumnya (VS), sebagai pengukur kinerja anggaran tahun lalu, memiliki nilai rata-rata sebesar Rp98.842.609, lebih rendah dari tahun ke-*n* yang sebesar Rp1.832.069.678. Hal ini bermakna bahwa akurasi anggaran semakin membaik dari tahun 2016 ke tahun 2017.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengolahan data dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

KA = 264680636,973 + 0,071TB + 0,061PB + 0,259VS + e				
t-value	0,480	5,681	0,746	2,637
Sig. value	0,632	0,000*	0,458	0,010*
F-Value/Sig.	15,112/0,000			
R/R ² /Adj.R ²	0,592/0,351/0,327			

Catatan: * signifikan pada $\alpha = 5\%$.

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2018.

Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi ditunjukkan pada Tabel 3. Secara bersama-sama, semua variabel bebas, yakni TB, PB, dan VS berpengaruh terhadap KA (secara statistik signifikan pada $\alpha=5\%$ dengan nilai F sebesar 15,112 dan nilai sig. sebesar 0,000). Ketiga variabel tersebut memberikan pengaruh sebesar 35,10 persen terhadap Kinerja Anggaran untuk data SKPD Kabupaten Gayo Lues tahun 2016-2017.

Beberapa determinan Kinerja Anggaran (varian belanja) telah ditemukan sebelumnya, misalnya oleh Lestari, et al. (2014), Darma, et al. (2015), Rahmah, et al. (2017), Ruhmaini, et al. (2018), dan Abdullah, et al. (2019). Mereka menyatakan bahwa Besaran Anggaran, Perubahan Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya secara bersama-sama membawa dampak terhadap Serapan Anggaran. Hal yang sama dinyatakan oleh Darma, et al. (2015), bahwa serapan anggaran (kebalikan dari varian anggaran) tidak dapat dipisahkan dari peranan perubahan anggaran dan sisa anggaran tahun sebelumnya. Variabel lain yang mungkin berpengaruh adalah politik yang menyebabkan keterlambatan dalam pengesahan anggaran (Hanif & Suparno, 2017; Rezeki & Hasanuddin, 2017), serta perencanaan, pelaksanaan anggaran dan koordinasi dengan instansi lain (Nugroho & Alfarisi, 2017).

Pengaruh Total Belanja terhadap Kinerja Anggaran

Hasil regresi menunjukkan nilai koefisien regresi variabel TB sebesar 0,071, nilai t sebesar 5,681 dan nilai $sig.$ sebesar 0,000. Artinya, secara statistik variabel TB berpengaruh signifikansi positif terhadap Kinerja Anggaran (KA). Hasil ini menunjukkan bahwa Kinerja Anggaran SKPD pada Pemda Kabupaten Gayo Lues dipengaruhi oleh besaran beban yang ditanggung oleh SKPD bersangkutan. Peningkatan atau penurunan variabel total belanja sejalan dengan peningkatan atau penurunan kinerja anggaran SKPD sebesar 0,071 satuan.

Hasil ini mendukung temuan Rahmah, et al. (2017). Ia mengungkapkan bahwa Besaran Anggaran berpengaruh terhadap Serapan Anggaran. Peningkatan Besaran Anggaran membawa dampak pada meningkatnya beban SKPD, sehingga semakin sulit untuk merealisasikan anggaran tersebut. Hal ini terjadi jika diasumsikan tidak terjadi peningkatan kapasitas SKPD dalam pelaksanaan anggaran dan proses penyusunan anggaran tidak berkualitas. Namun, hal ini berbeda dengan temuan Abdullah, et al. (2019) yang menggunakan data Kota Banda Aceh, dimana tidak ada pengaruh besaran anggaran belanja terhadap serapan anggaran belanja SKPD.

Rendahnya kualitas penyusunan anggaran kemungkinan menjadi penyebab mengapa besaran anggaran berpengaruh terhadap serapan atau kinerja anggaran. Ada beberapa hal yang menandai ini, diantaranya: (1) tidak adanya standar belanja dan/atau kegiatan yang menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan RKA-SKPD; (2) penentuan pagu anggaran untuk setiap SKPD tidak didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan SKPD dalam merealisasikannya; dan (3) adanya "intervensi" dari politisi untuk memasukkan kegiatan dalam anggaran SKPD, meskipun tidak sejalan dengan prioritas pembangunan pada tahun bersangkutan.

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa jumlah alokasi belanja SKPD yang besar menjadi alasan bagi SKPD untuk berkinerja buruk dalam pelaksanaan anggarannya. Praktik bahwa SKPD mengusulkan anggaran sendiri namun tidak selalu diakomodir oleh TAPD dan/atau DPRD, menjadi paradoks. Kecenderungan DPRD memotong anggaran yang diusulkan oleh SKPD justru mendorong SKPD melakukan penggelembungan atas usulan belanjanya (*mark-up*). Hal ini kadang menjadi *boomerang*, karena ternyata pemotongan anggaran oleh DPRD tidak terjadi. Semakin besar alokasi anggaran belanja untuk SKPD, maka semakin tinggi kinerja anggaran menunjukkan adanya komitmen SKPD untuk merealisasikan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Pengaruh Perubahan Anggaran Belanja terhadap Kinerja Anggaran

Nilai koefisien variabel Perubahan Anggaran Belanja (PB) bertanda positif dengan nilai sebesar 0,062 memiliki makna bahwa setiap terjadi kenaikan anggaran belanja dalam perubahan anggaran sebesar 1 kali atau 100%, maka realisasi belanja SKPD akan meningkat sebesar 0,061 kali atau 6,1%. Nilai $sig.$ variabel PB sebesar 0,458 menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap varian anggaran SKPD. Artinya, varian belanja SKPD tidak terkait dengan perubahan anggaran belanja pada periode bersangkutan.

Kecenderungan penambahan alokasi belanja pada saat perubahan anggaran ternyata tidak berdampak pada penurunan varian anggaran, begitu juga sebaliknya. Meskipun sebagian penambahan alokasi belanja bersumber dari sisa anggaran riil (kenaikan dalam

anggaran untuk sisa anggaran tahun sebelumnya setelah audit oleh auditor independen selesai), ternyata tidak tidak terkait dengan varian anggaran atau serapan anggaran. Menurut Anessi-Pessina, et al. (2012), perubahan anggaran justru digunakan untuk memperbaiki kinerja anggaran, dimana varian anggaran belanja semakin kecil.

Temuan ini menarik. Artinya, perubahan anggaran pada SKPD di Pemda Kabupaten Gayo Lues tidak sejalan dengan konsep yang menyatakan bahwa perubahan atau penyesuaian anggaran adalah untuk memperbaiki kinerja (Forrester & Mullins, 1992; Anessi-Pessina, et al., 2012). Berdasarkan data beberapa SKPD, perubahan anggaran belanja langsung relatif tinggi, terutama berupa penurunan alokasi belanja. Namun, model regresi ternyata tidak menemukan adanya kaitan antara perubahan anggaran dengan varian anggaran, yang merupakan indikator dari kinerja anggaran (Abdullah, et al., 2019).

Varian anggaran merupakan indikasi adanya ketidak-akuratan dalam penganggaran, sekaligus sebagai dampak dari adanya senjangan anggaran (Abdullah, et al., 2019). Secara teknis, bagi sebagian besar birokrat daerah, perubahan anggaran sering dipandang sebagai perluasan dari proses anggaran (Forrester & Mullins, 1992). Hanya saja, proses perubahan anggaran (*rebudgeting*) relatif tidak terbuka dan cenderung sangat teknis, sehingga memberi peran lebih besar kepada administratif, bukan pada publik dan legislatif (Anessi-Pessina, et al., 2012). Menurut Forrester & Mullins (1992), *rebudgeting* memiliki dampak berbeda untuk fungsi pelayanan yang berbeda. Temuan Lestari, et al. (2014) dan Darma, et al. (2014) menunjukkan adanya pengaruh positif perubahan anggaran terhadap serapan anggaran pada pemerintah daerah, sementara temuan Ruhmaini, et al. (2018) menunjukkan hasil sebaliknya, yakni perubahan anggaran berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran. Hasil-hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian di Kabupaten Gayo Lues, yang tidak menemukan adanya pengaruh PB terhadap KA.

Pengaruh Varian Belanja Tahun Sebelumnya terhadap Kinerja Anggaran

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel Varian Belanja Tahun Sebelumnya (VS) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,259. Artinya, setiap kenaikan variabel VS sebesar satu kali atau 100%, maka realisasi belanja SKPK akan menurun (atau varian tahun berjalan naik) sebesar 25,90%. Nilai signifikansi (*p-value*) variabel VS sebesar 0,010, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, menunjukkan bahwa secara statistika, variabel VS berpengaruh positif terhadap KA pada SKPD pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

Penurunan Kinerja Anggaran SKPD (atau varian belanja meningkat) sebagai akibat dari kenaikan VS menunjukkan bahwa “warisan” dana anggaran yang berasal dari tahun lalu akan mengurangi kemampuan SKPD dalam menyelesaikan seluruh alokasi anggaran yang menjadi kewajibannya selama tahu berjalan. Varian belanja tahun sebelumnya secara empiris terbukti akan membebani anggaran tahun berikutnya karena harus diprioritaskan pelaksanaannya di awal tahun anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran tahun lalu berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran tahun berjalan. Hasil penelitian ini relevan dengan temuan Darma, et al. (2015), Syahputra (2016), Rahmah, et al. (2017), dan Ruhmaini, et al. (2018) yang menyatakan bahwa serapan anggaran dipengaruhi oleh sisa anggaran tahun sebelumnya.

Varian belanja tahun sebelumnya pada suatu SKPD mencerminkan ketidakmampuan SKPD merealisasikan seluruh anggaran belanja yang sudah ditetapkan untuk SKPD tersebut pada tahun lalu. Varian belanja tahun lalu memiliki kaitan logis dengan tahun berjalan. Fenomena menarik di lapangan adalah seringnya keputusan politik dalam penganggaran untuk perubahan tahun lalu yang “membebani” anggaran pada tahun berikutnya sebagai kegiatan luncuran atau lanjutan. Keputusan politik dimaksud adalah mengalokasikan sumberdaya untuk suatu kegiatan pada saat perubahan anggaran dilakukan, meskipun sampai akhir tahun anggaran bersangkutan diyakini tidak dapat diselesaikan, dengan harapan akan ada “proyek luncuran” yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Praktik ini merupakan bentuk perilaku oportunistik pengambil keputusan anggaran sebagai *agent*, yang membuat keputusan untuk keuntungan pribadi (*self-interest*) dengan mengorbankan kepentingan sebagian *principal*-nya, yakni masyarakat pembayar pajak. Masyarakat dirugikan karena akan ada kegiatan tahun berjalan yang tidak tercapai targetnya sebagai implikasi dari pemrioritasan “proyek luncuran” yang lahir sebagai akibat adanya sisa anggaran tahun lalu ini.

Kegiatan yang tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran akan dilanjutkan pelaksanaan kegiatannya pada tahun anggaran berikutnya, tanpa perlu menunggu persetujuan DPRD untuk menyetujui penetapan Perda tentang APBD tahun berikutnya. Sisa anggaran dari tahun lalu untuk penyelesaian proyek yang sudah ditetapkan dapat digunakan langsung, meskipun APBD belum ditetapkan dalam bentuk Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari sisa anggaran tahun lalu akan diprioritaskan oleh SKPD, meskipun kegiatan dan anggaran yang baru untuk tahun berjalan telah ditetapkan.

Kegiatan lanjutan yang dananya telah tersedia dengan pasti akan dilaksanakan terlebih dahulu, sementara kegiatan baru untuk tahun anggaran berkenaan harus melalui proses administrasi dan *tendering* sebelum dilaksanakan. Adakalanya terjadi masalah atau ada kendala dalam pelelangan dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan sehingga sampai akhir tahun anggaran belum terealisasi sepenuhnya, yang berakibat pada serapan anggaran yang lebih rendah (Sukadi, 2012). Ketika kegiatan lanjutan sudah “cukup” untuk memenuhi “preferensi gizi SKPD”, maka pelaksanaan kegiatan murni tahun berjalan bukanlah prioritas yang menjadi kewajiban untuk diselesaikan selama tahun berjalan. Sangat mungkin kegiatan tahun berjalan sengaja tidak diselesaikan agar bisa menjadi “tabungan” untuk awal tahun berikutnya melalui media SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) pada akhir tahun.

Implikasi Hasil Penelitian

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah, yakni: *pertama*, perlunya memperhatikan alasan perubahan anggaran terkait dengan sisa anggaran yang dapat terjadi sebagai akibat dari perubahan tersebut. Fenomena di SKPD menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam menyusun rencana belanja secara baik, sehingga melakukan “revisi” pada saat perubahan anggaran di tahun berjalan. Adakalanya “revisi” ini sudah direncanakan sejak awal, misalnya dengan cara menggelembungkan anggaran, terutama untuk kegiatan yang selesai dilaksanakan sebelum perubahan anggaran, untuk kemudian “digeser” ke kegiatan lain yang anggarannya dianggap kurang.

Kedua, realisasi anggaran belanja harus direncanakan dengan baik agar tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Pelaksanaan kegiatan biasanya mulai dilaksanakan di triwulan kedua karena di triwulan pertama pemerintah daerah masih disibukkan dengan urusan administrasi keuangan dan proses pengadaan barang dan jasa (*tendering*). Namun, ada beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan sejak awal, terutama yang bersifat rutin dan kegiatan yang tidak membutuhkan proses pelelangan (boleh penunjukan langsung).

Ketiga, memberikan insentif kepada SKPD yang dapat merealisasikan anggarannya secara efektif dan efisien, sehingga serapan anggaran tetap tinggi. Serapan anggaran pada suatu kegiatan yang tidak mencapai seratus persen sering terjadi karena adanya efisiensi dalam pelaksanaannya, sehingga perlu mendapat apresiasi dari pimpinan daerah. Efisiensi ini bisa menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan standar belanja kegiatan pada periode berikutnya. Bentuk insentif yang dapat diberikan kepada SKPD atau pejabat di SKPD tersebut adalah alokasi anggaran untuk kegiatan yang bisa membuat mereka berkembang, seperti mengikuti pelatihan, workshop, atau seminar di luar daerah, yang relevan dengan fungsi dan tugas mereka. Selain alokasi anggaran, mereka juga dapat diberikan piagam penghargaan atau nominasi sebagai SKPD terbaik dengan mendapat hadiah sejumlah uang.

Keempat, melakukan analisis tentang penyebab terjadinya penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran dan melibatkan *stakeholders* dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan. Proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa sering bertele-tele dan kolusif, sehingga tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan keterlambatan dalam penyelesaian administrasi oleh staf yang tidak berkompeten, sehingga pelaksanaan kegiatan dan pembayarannya baru dapat dilakukan menjelang akhir tahun anggaran (triwulan ketiga dan keempat). Penggunaan teknologi informasi dapat mengefisienkan proses administrasi ini.

Implikasi untuk penelitian selanjutnya adalah: *pertama*, menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) dalam mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran. Artinya, kombinasi data kuantitatif perlu dilengkapi dengan data kualitatif, sehingga penjelasan tentang determinan serapan anggaran bisa lebih lengkap dan komprehensif. Aspek keperilakuan dan politik kadang sulit dijelaskan dengan data kuantitatif, padahal sangat penting dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Kedua, perlunya menambah beberapa variabel bebas dan pemoderasi, mengingat praktik perubahan anggaran terkait dengan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sebagai contoh adalah budaya organisasi, politik anggaran, kebijakan anggaran pemerintah pusat/provinsi, pemilihan umum kepala daerah/legislatif, dan adanya krisis ekonomi.

Ketiga, membandingkan hasil penelitian yang menggunakan data pada pemerintah daerah yang menerapkan status otonomi khusus dengan yang tidak berstatus otonomi khusus. Hal ini terkait dengan ketergantungan fiskal atau kemandirian daerah sebagai akibat dari adanya dana otonomi khusus yang menjadi sumber pendanaan penting bagi pemerintah daerah yang berstatus otonomi khusus.

Terakhir, melakukan kajian lebih mendalam tentang urusan atau sektor yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik, sehingga dapat dipahami perilaku belanja

secara lebih komprehensif. Kebijakan anggaran untuk SKPD yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan (Dinas Kesehatan) berbeda dengan SKPD yang melaksanakan fungsi penyediaan infrastruktur (Dinas Pekerjaan Umum), begitu juga dengan fungsi social (Dinas Sosial) dan pertanian (Dinas Pertanian). Hal ini sejalan dengan pernyataan Forrester & Mullins (1992) yang menyatakan bahwa *rebudgeting* memiliki dampak berbeda untuk fungsi pelayanan yang berbeda.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa total belanja dan varian belanja tahun sebelumnya berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada SKPD di pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues, sedangkan perubahan belanja yang tidak berpengaruh. Persentase varian belanja SKPD adalah sebesar 8,6% dari total belanja SKPD bersangkutan. Hasil ini memberi bukti tambahan terkait faktor-faktor yang dapat dikaitkan dengan kinerja anggaran institusi pemerintahan daerah, seperti telah diteliti sebelumnya oleh Sukadi (2012), Priatno & Khusaini (2013), Lestari, et al. (2014), Darma, et al. (2015), Syahputra (2016), Zakiati (2016), Rahmah, et al. (2017), dan Ruhmaini, et al. (2018).

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, di antaranya: penggunaan sampel kecil dan hanya pada satu pemerintah daerah, menggunakan data sekunder terbatas untuk dua tahun, dan menggunakan regresi linier berganda biasa, tanpa pemoderasi dan/atau pemediasi. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan berbeda (termasuk *mixed method*) dan menggali determinan lain untuk tujuan mendalami isu kinerja anggaran untuk OPD dan Pemda ini, terutama dengan menggunakan perspektif keagenan (*agency theory*).

PUSTAKA ACUAN

- Abdullah, Syukriy. 2008. Penganggaran Partisipatif di Pemerintahan dan Bisnis: Perbedaan dan Isu-isu Penelitian. Desember 25. <https://syukriy.wordpress.com/2008/12/25/penganggaran-partisipatif-di-pemerintahan-dan-bisnis-perbedaan-dan-isu-isu-penelitian/> (5/3/2020).
- _____. 2012. Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. *Disertasi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
- _____. 2013. *Perubahan APBD*. <https://syukriy.wordpress.com/2013/04/22/perubahan-apbd/> (Akses 2/2/2020).
- _____. 2016. *Varians Anggaran Pendapatan dan Varians Belanja Daerah: Sebuah Pengantar*. <https://syukriy.wordpress.com/2016/11/26/analisis-varian-anggaran-pemerintah-daerah-penjelasan-empiris-dari-perspektif-keagenan/> (Akses 2/2/2020).
- _____. 2020. Analisis Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues, 2017-2018. *Kertas Kerja*. Banda Aceh: FEB Universitas Syiah Kuala.
- _____ & Afrah Junita. 2016. Bukti Empiris tentang Pengaruh Budget Ratcheting terhadap Hubungan antara Pendapatan Sendiri dan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh. *MODUS* 28 (2): 185-201.
- _____ & Ramadhaniatun Nazry. 2015. Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah:

- Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 6(2): 272-283.
- _____ & Riza Rona. 2014. Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. *Iqtishadia* 7(1): 179-202. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v7i1.1106>
- _____, Muhtar Muhtar, Marwan Marwan, & Aliamin Aliamin. 2019. Serapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah: Bukti Empiris dari Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi Publik* 2(1): 66-83. <https://jap.fdas.org>.
- _____, Mulia Saputra, Dara Fazella, Hasnawati, & Aulia Afridzal. 2019. Determinan Kinerja Anggaran Belanja Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 19(2): 149-166. DOI: <http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v19i2.3253>
- Andalia, Dian, Darwanis, & Syukriy Abdullah. 2012. Pengaruh Varian Pendapatan dan Varian Belanja terhadap Sisa Anggaran Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota se-Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 2(1): 41-52.
- Anessi-Pessina, Eugenio, Mariafrancesca Sicilia, & Ileana Steccolini. 2012. Budgeting & Rebudgeting in Local Governments: Siamese Twins. *Public Administration Review*. 72(6): 875-884. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02590.x>
- Blais, André & Stéphane Dion. 1990. Are Bureaucrats Budget Maximizers? The Niskanen Model & Its Critics. *Polity* 22(4): 655-674. <https://doi.org/10.2307/3234823>
- BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). 2011. Misteri Penyerapan Anggaran. *Paris Review* 3(6): 1-56.
- Darma, Romaidon, Hasan Basri, & Syukriy Abdullah. 2015. Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya, dan Perubahan Anggaran terhadap Serapan Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. 4(2): 18-25. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4463>
- Darmastuti, Dewi & Dyah Setyaningrum. 2019. The Effect of Discretionary Spending on Incumbent Victories in Elections. *Humanities & Social Sciences Reviews* 7(4): 685-693. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7488>.
- Forrester, John P. 1993. The Rebudgeting Process in State Government: The Case of Missouri. *American Review of Public Administration* 23(2): 155-178. <https://doi.org/10.1177/027507409302300205>
- _____ & Daniel R. Mullins. 1992. Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Processes. *Public Administration Review* 52(5): 467-473. <https://www.jstor.org/stable/976806>
- Fozzard, Adrian. 2001. The Basic Budgeting Problem: Approaches to Resource Allocation in the Public Sector and Their Implications for Pro-Poor Budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). *Working paper 147*. <https://www.odi.org/publications/1395-basic-budgeting-problem-approaches-resource-allocation-public-sector-and-their-implications-pro-poor>
- Gorina, Evgenia, Craig Maher, & Sungho Park. 2019. Toward a Theory of Fiscal Slack. *Public Budgeting & Finance* (Summer): 1-27. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pbaf.12240>

- Hanif, Imam & Suparno Suparno. 2017. Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran dan Fiscal Stress terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 2(4): 107-115. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/5218>
- Joyce, Philip G. 2001. What's So Magical about Five Percent? A Nationwide Look at Factors that Influence the Optimal Size of State Rainy Day Funds. *Public Budgeting & Finance* (Summer): 62-87. DOI: 10.1111/0275-1100.00050.
- Junita, Afrah. 2018. Determinan Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah dengan Perubahan Anggaran sebagai Pemeditasi dan Teknologi Informasi Sebagai Pemoderasi: Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Aceh. *Disertasi*. Medan: Program Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- _____ & Syukriy Abdullah. 2016. Pengaruh Fiscal Stress dan Legislature Size terhadap Expenditure Change pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi* 20(3): 477-478. <https://www.neliti.com/publications/77408/pengaruh-fiscal-stress-dan-legislature-size-terhadap-expenditure-change-pada-kab>
- Larkey, P.D. & R.A. Smith. 1989. Bias in the Formulation of Local Government Budget Problems. *Policy Sciences* 22(2): 123-166. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF00141382>
- Lestari, Soraya, Syukriy Abdullah, & Hasan Basri. 2014. Pengaruh Alokasi Belanja Murni dan Alokasi Belanja Perubahan terhadap Serapan Anggaran Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 3(3): 80-89. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4437>
- Lukka, K. 1988. Budgetary Biasing in Organization: Theoretical and Empirical Evidence. *Accounting Organization and Society* 13(3): 281-301. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0361368288900050>
- Mayper, Alan G., Michael Granof & Gary Giroux. 1991. An Analysis of Municipal Budget Variances. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 4(1): 29-50. DOI: <http://dx.doi.org/10.1108/09513579110003358>.
- McGuire, Thomas. 1981. Budget-Maximizing Governmental Agencies: An Empirical Test. *Public Choice* 36: 313-322. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF00123787>
- Meridiana, Darwanis, & Syukriy Abdullah. 2017. Pengaruh Sisa Anggaran Sebelumnya, Perubahan Anggaran Tahun Lalu dan Besaran Anggaran terhadap Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) pada Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 6(2): 86-96. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/7745>
- Miliasih, Retno. 2012. Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekan Baru. *Tesis*. Jakarta: FEUI. <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20289958&lokasi=lokal#parentHorizontalTab2>
- Negara, Perdana Kusuma, Handajani, & Lukman Effendy. 2018. Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 19(1): 76-91. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/2658>

- Nikmawati, Syukriy Abdullah, & Heru Fahlevi. 2016. Analisis Korelasi Belanja Daerah dalam Perubahan APBK Kabupaten/Kota: Studi di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 5(3): 39-49. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4524>
- Nugroho, Rahadi & Salman Alfarisi. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). *Jurnal BPPK* 10(1): 22-37. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/view/23>
- Ott, Katarina, Velibor Mačkić, & Mihaela Bronić. 2018. Budget Transparency of Local Governments: The Political Economy of City and Municipality Budgets in Croatia. *Drustvena Istrazivanja* 27(4): 629-647. <https://doi.org/10.5559/di.27.4.03>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Priatno, Prasetyo Adi & M. Khusaini. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. *Jurnal Ilmiah*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/603>
- Puspitasari, Ratna. 2013. Studi Penganggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta. *Jejaring Administrasi Publik* 5(2): 356-369. <http://journal.unair.ac.id/ADMP@studi-penganggaran-berbasis-kinerja-pada-pemerintah-provinsi-jawa-timur-jawa-barat-dan-dki-jakarta-article-9239-media-81-category-8.html>
- Rahmah, Rahmah, Zuraida Zuraida, & Syukriy Abdullah. 2017. Analisis Kinerja Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 3(2): 213-222. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/view/8232>
- Rezeki, Nofa Sapitri & Hasanuddin Hasanuddin. 2017. Desentralisasi Fiskal: Studi Tentang Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014. *JOM FISIP* 4(1): 1-17. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/13847>
- Robbins, Donijo. 2005. Administrative Discretion: Its Use in Budgetary Analysis. *Public Administration Quarterly* 29(1/2): 186-200. <https://spaef.org/article/720/Administrative-Discretion:-Its-Use-in-Budgetary-Analysis>
- Rubin, Irene. 1996. Budgeting for Accountability: Municipal Budgeting for 1990s. *Public Budgeting & Finance* (Summer): 112-132. <https://doi.org/10.1111/1540-5850.01071>.
- Ruhmaini, Ruhmaini, Syukriy Abdullah, & Darwanis. 2018. Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 4(1): 31-43. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/view/10912/8575>
- Ruwaida, Ruwaida, Darwanis Darwanis, & Syukriy Abdullah. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Belanja Pendidikan di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi Program Pascasarjana Unsyiah* 4(4): 101-110. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4493>

- Schick, Allen. 2003. The Role of Fiscal Rules in Budgeting. *OECD Journal on Budgeting* 3(3): 7-34. https://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-role-of-fiscal-rules-in-budgeting_budget-v3-art14-en
- Smith, Robert W. & Mark Bertozzi. 1998. Principals and Agents: An Explanatory Model for Public Budgeting. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 10(3): 325-353. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-10-03-1998-B001>
- Steccolini, Ileana. 2004. Is the Annual Report an Accountability Medium? An Empirical Investigation into Italian Local Governments. *Financial Accountability & Management* 20(3): 327-350. <https://doi.org/10.1111/j.0267-4424.2004.00389.x>
- Sukadi, Sukadi. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja pada Akhir Tahun Anggaran. *Abstrak Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Laman: http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=55894&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html
- Syahputra, Ari. 2016. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran dengan Perubahan Anggaran sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Tesis*. Medan: Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/13776>
- Weingast, Barry R., Kenneth A. Shepsle, & Christopher Johnsen. 1981. The Political Economy of Benefits and Costs: A Neo-classical Approach to Distributive Politics. *Journal of Political Economy* 89 (August): 642-64. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/260997>
- Widanaputra, A.A. & N.P.S.H. Mimba. 2014. The Influence of Participative Budgeting on Budgetary Slack in Composing Local Governments' Budget in Bali Province. *International Conference on Accounting Studies (ICAS) 2014*. Kuala Lumpur, Malaysia, 18-19 August. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814059138/pdf?md5=ed4f01101d13c829b2efdd2d385a1eed&pid=1-s2.0-S1877042814059138-main.pdf>
- Williams, D. W. & T. D. Calabrese. 2016. The Status of Budget Forecasting. *Journal of Public and Nonprofit Affairs* 2(2): 127-160. DOI: <https://doi.org/10.20899/jpna.2.2.127-160>
- Yuhertiana, Indrawati, Soeparlan Pranoto, & Hero Priono. 2015. Perilaku Disfungsional pada Siklus Penganggaran Pemerintah: Tahap Perencanaan Anggaran. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 19(1): 25-38. DOI: <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art3>
- Yuliati, Retno, Soemarso Slamet Raharjo, & Dodik Siswantoro. 2017. Accountability and Incumbent Re-election in *Indonesian Local Government*. *International Research Journal of Business Studies* 9(3): 157-168.
- Zakiati, Mulia. 2016. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Politik Penganggaran terhadap Perubahan Anggaran serta Dampaknya terhadap Serapan Anggaran Belanja pada SKPK Pemerintah Kota Sabang. *Tesis*. Banda Aceh: Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22011
- Zarinah, Monik, Darwanis, & Syukriy Abdullah. 2016. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualias Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 5(1): 90-97. www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4502/3878

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Sistem Informasi Keuangan

Lesi Hertati¹, Irlan Fery², Otniel Safkaur³

^{1,2}STIE Rahmadiyah, ³Universitas Cendrawasih

¹hertatilesi@yahoo.co.id

Abstract

The complexity of the financial information system process requires obeying the Indonesian financial accounting standard regulatory procedures in carrying out financial information, as well as demanding that individuals implementing financial information systems have strong working power that is safe and sustainable in order to run a good financial information system process. The purpose of this study is to determine the effect of organizational commitment to financial information systems, on state-owned enterprises in South Sumatra. This research is a quantitative method research with a total sample of 48 BUMN spread across South Sumatra. The analytical tool used is multiple regression with SPSS version 24. The results show that organizational commitment influences financial information systems.

Keywords: Organizational Commitment, Financial Information Systems

Abstrak

Kompleksitas proses sistem informasi keuangan mengharuskan taat pada prosedur peraturan standar akuntansi keuangan Indonesia dalam menjalankan informasi keuangan, serta menuntut individu-individu pelaksana sistem informasi keuangan memiliki daya bekerja yang kuat skill yang mempunyai dan berkesinambungan guna menjalankan proses sistem informasi keuangan yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap sistem informasi keuangan, pada badan usaha milik negara di Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif dengan total sampel sebanyak 48 BUMN yang tersebar di Sumatera Selatan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan alat bantu SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap sistem informasi keuangan.

Kata Kunci: Komitmen Organisasi, Sistem Informasi Keuangan

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara berdiri memiliki peran strategis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ada lima faktor yang menjadi latar belakang pendirian BUMN, yaitu: (1) Sebagai pelopor atau perintis usaha dimana swasta tidak tertarik untuk memasukinya; (2) Sebagai pengelola bidang usaha strategis dan pelaksana pelayanan publik; (3) Sebagai penyeimbang bagi kekuatan swasta besar; (4) Sebagai sumber pendapatan negara; dan (5) Sebagai hasil nasionalisasi Perusahaan Belanda. Tujuan BUMN adalah: (1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya; (2) Mengejar keuntungan; (3) Menyelenggarakan kebermanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (4) Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan (5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Pengelola bidang usaha strategis baik atau buruknya BUMN sebagai sumber pendapatan negara bekerja melayani kebutuhan public dapat dilihat dari laporan keuangan yang menyediakan informasi keuangan perusahaan dan bermanfaat bagi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan (Hertati, 2019).

Fokus utama para pengguna laporan keuangan adalah informasi tentang kinerja perusahaan yang diukur oleh laba dan komponen-komponennya. Para investor dan kreditor sebagai pengguna laporan keuangan menggunakan informasi laba masa lalu untuk membantu menilai prospek perusahaan. Laba yang dilaporkan perusahaan mengandung ketidakjelasan atau ketidaktransparanan antara laba akuntansi yang dapat diobservasi dan laba ekonomi yang tidak dapat diobservasi, disebut *earning opacity*. Laba yang dilaporkan perusahaan mungkin menjadi tidak jelas karena adanya interaksi yang kompleks antara, motivasi manajerial, standar akuntansi, dan pelaksanaan standar akuntansi. Para manajer memiliki dorongan untuk mengelola laporan laba perusahaan dengan menggunakan kebijakan akrual yang diijinkan oleh standar akuntansi dengan tujuan untuk menutupi kinerja perusahaan yang sebenarnya, misalnya melaporkan laba lebih tinggi dan menyembunyikan realisasi laba yang tidak menguntungkan (kerugian) yang dapat memicu campur tangan pihak lain.

Sebagai agen pembangunan (*agent of development*) telah terjadi kemajuan dalam pengelolaan BUMN di Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Sofyan Djalil (2008) mengatakan bahwa dalam kurun waktu 2004 sampai tahun 2007 terjadi pertumbuhan signifikan pada penjualan (pendapatan) dan aset BUMN. Pada tahun 2004 total penjualan (pendapatan) seluruh BUMN berjumlah Rp 520 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 654 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp 763 triliun pada tahun 2006, dan menjadi Rp 889 pada tahun 2007. Begitu juga dengan total aset, pada tahun 2004 total aset seluruh BUMN berjumlah Rp 1.247 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 1.366 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp 1.506 pada tahun 2006, dan menjadi Rp 1.719 pada tahun 2007.

PT. Telkom Tbk. dan PT. Aneka Tambang Tbk. Lebih lanjut Sri Mulyani (2010) mengatakan bahwa setiap tahun Departemen Keuangan memberikan penghargaan kepada BUMN yang memiliki prestasi dalam penyusunan laporan keuangan, namun yang mendapat

penghargaan dari tahun ke tahun hanya BUMN tertentu saja, sementara ada ratusan BUMN lain di Indonesia yang tidak mengalami perbaikan dari tahun ke tahun dalam proses pembuatan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Laporan keuangan BUMN juga menunjukkan angka-angka yang tidak akurat dan diragukan kebenarannya. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008 yang memuat laporan keuangan seluruh BUMN di Indonesia, terlihat ada 11 BUMN yang melaporkan saldo ekuitas bernilai negatif. Ekuitas merupakan sisa bagian pemilik atas klaim aset yang secara teknis dihitung dengan mengurangkan antara aset dan kewajiban. Secara teori saldo ekuitas tidak mungkin bernilai negatif karena hal itu berarti bahwa modal perusahaan sudah tidak ada lagi dan secara teknis perusahaan harus dibubarkan. Bila di lihat dari proses sistem informasi akuntansi, ekuitas bersaldo negatif dapat disebabkan oleh sistem informasi akuntansi yang tidak akurat dalam pencatatan transaksi akuntansi keuangan BUMN yang memiliki saldo ekuitas negatif pada Laporan Keuangan Tahun 2008.

Laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku adalah mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan dihasilkan oleh sebuah proses sistem informasi keuangan yang baik sistem informasi keuangan adalah sebuah sistem yang informasi untuk tujuan pengambilan keputusan. Sistem Informasi keuangan merupakan sub sistem dari sistem informasi manajemen, yang mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan dibidang keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan bagian terpenting dari sistem informasi manajemen, dan merupakan integrasi dari berbagai sistem pengolahan transaksi yang bekerja di berbagai fungsi operasional organisasi (Romney and Steinbart, 2009; Susanto, 2014; Gelinas et.al, 1993).

Sebagai sebuah sistem yang tersusun oleh banyak komponen seperti orang, aktivitas, data, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan, sistem informasi keuangan dalam penerapannya rentan terhadap masalah dan kegagalan. Keberhasilan penerapan sistem informasi keuangan di perusahaan tidaklah mudah untuk dicapai dan seringkali menimbulkan masalah karena dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: (1) Keterlibatan pemakai; (2) Dukungan pimpinan; (3) Pelatihan dan pendidikan pemakai; (4) Faktor kelompok kerja dalam organisasi; dan (5) Faktor organisasi lainnya seperti ukuran organisasi, karakteristik tugas, dan lain-lain. Disamping faktor organisasi seperti kompleksitas tugas, ukuran organisasi, faktor kepemimpinan, dan lain-lain, faktor individual seperti motivasi, kepuasan, dan kebermanfaatan bagi pemakai sangat menentukan keberhasilan penerapan sistem informasi keuangan. Keberhasilan penerapan informasi keuangan adalah masalah krusial diperusahaan, karena ditentukan oleh faktor situasi dan kondisi dimana sistem informasi keuangan tersebut diterapkan, antara lain berkaitan erat dengan: (1) Faktor lingkungan perusahaan; (2) Isi (*content*) sistem informasi keuangan yang digunakan, seperti tugas, struktur, teknologi, dan orang; dan (3) Proses penerapan sistem informasi keuangan (Choe, 1996; Burton, et.al, 1992; Kaye, 2001; Hertati, 2015).

Masalah keagenan terjadi antara *principals* dan *agents* yang menyebabkan kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principals*. Untuk mengurangi tindakan manajemen yang tidak sesuai dengan harapan prinsipal diperlukan komitmen organisasi dengan meningkatkan sistem informasi keuangan yang berperan sebagai transparan dalam pelaporan keuangan. Peran komitmen manajemen sebagai keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja seperti seorang yang bekerja keras akan mendapatkan kinerja yang baik, dengan asumsi bahwa seorang tersebut: (1) Memiliki sumber daya yang cukup; (2) Memiliki keahlian (*skill*) yang mendukung pekerjaan; dan (3) Ada dukungan (*support*) dalam melakukan pekerjaan. Keyakinan apabila seseorang melakukan sesuatu dengan baik atau memiliki kinerja yang baik maka akan mendapatkan *value outcome* yang baik pula, seperti bila seorang bekerja dengan baik maka akan mendapatkan kebaikan bagi dirinya, dengan asumsi bahwa: (1) Ada pemahaman tentang hubungan antara kinerja dan hasil (*reward system*); (2) Ada keyakinan bahwa ketika suatu keputusan diambil akan diperoleh hasil atas keputusan tersebut; dan (3) Ada transparansi proses antara apa yang didapat dan apa yang dihasilkan. Valensi adalah harapan seseorang atas sebuah dampak hasil (*outcome*), seperti seseorang yang memiliki harapan untuk mendapatkan sejumlah uang atau penghargaan lainnya.

Komitmen organisasi merupakan keadaan emosi karyawan untuk mengidentifikasi dan terlibat dengan organisasi. Komitmen organisasi melibatkan tiga sikap, yaitu: (1) Adanya identifikasi seseorang terhadap tujuan organisasi; (2) Adanya keterlibatan dalam tugas-tugas organisasi; dan (3) Adanya loyalitas terhadap organisasi. penelitian ini defenisi komitmen organisasional merujuk kepada komitmen organisasional adalah sikap identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas seorang karyawan terhadap perusahaan (Mowday, et.al, 1982; McShane and Von Glinow, 2000; Gibson, et. al, 1994; Hertati, 2015). Dimensi yang mendominasi operasionalisasi konsep komitmen organisasi meliputi tiga hal: 1). Identifikasi (*identification*), yaitu kepercayaan yang kuat dan penerimaan karyawan atas tujuan dan nilai organisasi; 2). Keterlibatan (*involvement*), yaitu kemauan karyawan untuk memberikan usaha demi kepentingan organisasi; 3). Loyalitas (*loyalty*), yaitu keinginan dan hasrat yang kuat karyawan untuk selalu menjaga keanggotaan organisasi.

Komitmen organisasi berhubungan dengan sistem informasi direpresentasi yaitu: (1) *system characteristic* (F1); (2) *Quality* (F2); (3) *Outcome* (F3 & F5); dan (4) *User Requirement* (F4). *System characteristic* (F1) mencerminkan tiga fungsi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem yaitu penyimpanan (*storage*), proses (*processing*), dan komunikasi (*communications*), dan biaya (*cost*) yang dikeluarkan sistem untuk tiga fungsi ini adalah representasi dari karakteristik sistem. *Quality* (F2) adalah kualitas dari sebuah sistem yang digunakan. Sementara itu *Outcome* terbagi atas *internal outcome* (F3) dan *external outcome* (F5). Sebuah sistem informasi secara *Internal outcome* (F3) diharapkan menghasilkan informasi yang akurat dan lengkap tentang sebuah transaksi, sedangkan sistem informasi secara *external outcome* dapat meningkatkan image perusahaan dan layanan terhadap pelanggan. Sedangkan *User requirement* (F4) adalah terfokus kepada keterlibatan dan partisipasi pemakai terhadap sistem informasi (Hertati, 2016; Choe, 1996; Burton, et.al, 1992; Kaye, 2001; Lee, J.J., and Kim, S.H., 1992; Livari, J., 2005). Sistem informasi keuangan

dapat dikelompokkan atas tiga aspek utama, yaitu: 1) Kualitas sistem, 2) Pengguna sistem; 3) Pengguna informasi.

METODE

Lokasi penelitian ini bertempat di Sumatera Selatan populasi yaitu unit-unit fungsional pada BUMN di Sumatera Selatan. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 45 Sampel diambil dengan menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 5% dengan jumlah sampel sebanyak 200 responden. Dari kuesioner yang disebar sebanyak 200, yang kembali adalah sebanyak 105 dan yang dapat diproses sebanyak 102 kuesioner, sebanyak 3 responden mengisi tidak lengkap. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis regresi berganda. Skala yang digunakan menggunakan skala likert lima poin. Variabel independen dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi (X_1), dan sistem informasi keuangan (Y) sebagai variabel dependennya. Hubungan variabel-variabel tersebut dapat digambarkan secara sistematis sebagai berikut:

$$Y = f(X_1)$$

Tabel berikut menunjukkan variabel dimensi dan indikator dalam penelitian ini:

Tabel 1. Variabel Dimensi dan Indikator

No.	Definisi Konseptual	Dimensi	Indikator
1.	Komitmen Organisasi: Keadaan dimana seseorang karyawan memihak kepada organisasi tertentu dengan tujuan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi Gibson, et.al, (1994)	Identifikasi	a. Menggambarkan b. Merasakan c. Menggunakan
		Keterlibatan	a. Faktor pribadi b. Faktor produk c. Faktor situasi
		Loyalitas	a. Nyaman b. Memiliki integritas c. Memberikan pujian d. Menjadi teladan e. Kritis yang membangun
2.	Sistem Informasi keuangan: sistem informasi yang memberikan informasi kepada kelompok orang baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan mengenai arus uang bagi para pemakai diseluruh perusahaan Burton, et.al, (1992)	Kualitas sistem	a. Akurat b. Tepat waktu c. Relevan
		Komponen Informasi	a. Relevance b. Timeliness c. Accurate
		Pengguna sistem	a. Kolektif b. Penegas

Sumber: Hasil dan Pembahasan Variabel Dimensi dan Indikator; 2020

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Nilai r	Signifikansi	Keterangan
Komitmen Organisasi	X1	.624**	.000	Valid
	X2	.806**	.000	Valid
	X3	.754**	.000	Valid
	X4	.833**	.000	Valid
	X5	.731**	.000	Valid
	X6	.787**	.000	Valid
	X7	.815**	.000	Valid
	X8	.765**	.000	Valid
	X9	.880**	.000	Valid
	X10	.804**	.000	Valid
	X11	.788**	.000	Valid
	X12	.860**	.000	Valid
Sistem Informasi Keuangan	X13	.865**	.000	Valid
	X14	.853**	.000	Valid
	X15	.749**	.000	Valid
	X16	.855**	.000	Valid
	X17	.968**	.000	Valid
	X18	.849**	.000	Valid
	X19	.619**	.000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel Laten	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Identifikasi	.943	Reliabel
2	Keterlibatan	.847	Reliabel
3	Loyalitas	.861	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan data pada tabel 2 dan tabel 3 menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner penelitian ini adalah valid dan reliabel.

Sementara itu, hasil uji t dan uji F ditunjukkan pada tabel 4 dan tabel 5:

Tabel 4. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.575	4.744		2.440	.000
Komitmen Organisasi	1.239	4.162	.182	4.010	.000
Sistem Informasi Keuangan	1.186	.230	.635	4.154	.000

Nilai r square: 0,636

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 5. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	16358.509	2	8179.255	83.133	.000 ^a
1 Residual	9346.838	95	98.388		
Total	25705.347	97			

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel 4, diketahui bahwa nilai hitung variabel t hitung variabel komitmen organisasi > nilai t tabel, yaitu $4,010 > 1,985$, hasil ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh pada sistem informasi keuangan BUMN di Sumatera Selatan. Nilai R square diperoleh 0,636 atau 63,6% yang mengartikan persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 63,6%. Hasil uji F pada Tabel 5 menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini sudah *fit*.

Untuk mengetahui hubungan antar dimensi dari masing-masing variabel, dibuat perhitungan korelasi antar dimensi. Korelasi antar dimensi dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Korelasi Antar Dimensi

Dimensi	Y1.1	Y1.2	Y1.3
X1.1 Identifikasi	.684**	.681**	.711**
X1.2 Keterlibatan	.637**	.657**	.679**
X1.3 Loyalitas	.760**	.763**	.792**
Y1.1 Kualitas sistem	1	.792**	.940**
Y1.2 Pengguna Sistem	.792**	1	.986**
Y1.3 Pengguna informasi	.840**	.986**	1

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa masing-masing variabel antar dimensi memiliki hubungan yang cukup kuat. Tabel 6 memperlihatkan bahwa korelasi antara dimensi keterlibatan memiliki hubungan yang paling kuat dengan dimensi faktor utama dalam bekerja, serta dimensi loyalitas memiliki hubungan yang paling kuat dengan dimensi

yang sama, yakni faktor utama dalam bekerja. Serta Dimensi penggunaan sistem memiliki hubungan yang kuat dengan dimensi kualitas sistem yakni factor penggunaan informasi.

Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Etty Murwaningsari (2008) dan Torkzadeh & Doll (1998) melakukan penelitian tentang hubungan antara interaksi keterlibatan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja tugas. Dari hasil survei terhadap 532 orang akademisi dan tenaga teknik pada empat perusahaan penelitian dan pengembangan (R&D), disimpulkan bahwa ada hubungan interaksi antara keterlibatan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja tugas. Lee and Kim (1992) dan (Shirani, et.al. 1994) melakukan penelitian tentang hubungan antara komitmen organisasi, terhadap sistem informasi keuangan. Dari hasil survei terhadap 929 karyawan dari 57 perusahaan jasa dan manufaktur kecil dan menengah di Cina, Livari (2005) menemukan bahwa komitmen organisasi berhubungan signifikan dengan sistem informasi keuangan. Clercq and Rius (2007) dan Shirani, et.al. (1994) melakukan penelitian tentang hubungan antara komitmen organisasi, dan usaha (*effort*). Dari hasil survei terhadap 863 karyawan dari berbagai perusahaan kecil dan menengah di Meksiko, Clercq and Rius (2007) menyimpulkan bahwa komitmen organisasi berhubungan secara signifikan terhadap usaha (*effort*). Kemudian Etty (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh moderasi komitmen organisasi dan keadilan prosedural, terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. Dari hasil survei terhadap 32 manajer berbagai perusahaan di Indonesia, disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah variabel pemoderasi yang memperkuat hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial.

Penelitian Burton et.al. (1992) dan Yuksel (2004) secara intrinsik berdasarkan teori ekspektasi seorang pengguna sistem informasi akuntansi akan selalu mengevaluasi dampak dari penggunaan sistem informasi akuntansi, seperti peningkatan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan, frekwensi ketepatan dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan pemahaman atas pekerjaan. Evaluasi intrinsik atas dampak penggunaan sistem informasi akuntansi selanjutnya akan menjadi sumber motivasi bagi pengguna sistem informasi akuntansi. Penelitian Burton, et.al. (1992) dan Zhang, (2005) disamping faktor organisasi seperti kompleksitas tugas, ukuran organisasi, faktor kepemimpinan, dan lain-lain, faktor individual seperti motivasi, kepuasan, dan kebermanfaatan bagi pemakai sangat menentukan keberhasilan penerapan sistem informasi keuangan. Penelitian Kaye (2001), keberhasilan penerapan sistem informasi keuangan adalah masalah krusial diperusahaan, karena ditentukan oleh faktor situasi dan kondisi dimana sistem informasi keuangan tersebut diterapkan, antara lain berkaitan erat dengan: (1) Faktor lingkungan perusahaan; (2) Isi (*content*) sistem informasi keuangan yang digunakan, seperti tugas, struktur, teknologi, dan orang; dan (3) Proses penerapan sistem informasi keuangan.

Chen, et.al (2002), menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah ikatan psikologi seorang karyawan terhadap perusahaan yang mendorong karyawan tersebut bekerja keras mencapai tujuan perusahaan. Mowday, et.al. (1982) memberikan arti yang lebih orisinil tentang komitmen organisasional, bahwa komitmen organisasional memiliki tiga komponen utama: (1) Penerimaan atas nilai dan tujuan perusahaan; (2) Mendahulukan kepentingan perusahaan; dan (3) Keinginan untuk tetap menjadi karyawan dari sebuah

perusahaan. Kemudian Haar Spell (2004) menjelaskan bahwa komitmen organisasional secara konseptual merupakan pola perilaku, intensitas, motivasi, dan sikap yang ada dalam diri seseorang. Tingkat komitmen organisasi yang di miliki manajer dan karyawan dapat mendorong keberhasilan penerapan sistem informasi keuangan di perusahaan, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Livari (2005) dan Zhang (2007a) bahwa dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem informasi keuangan, komitmen organisasi adalah faktor utama dan sangat penting, karena inti dari komitmen organisasi adalah keterikatan dan loyalitas seorang karyawan kepada perusahaan yang akan mendorong mereka untuk selalu bekerja dalam berbagai situasi di perusahaan. Kemudian Penelitian Thong (1996) dan Zhang (2007b) mengatakan bahwa komitmen organisasi sebagai faktor organisasi yang sangat penting untuk keberhasilan penerapan sistem informasi keuangan disamping faktor lain seperti: integrasi SIK dengan perencanaan perusahaan, kualitas output SIK, efisiensi operasi SIK, sikap pemakai/manajemen.

Penelitian Cerullo (1997) dan Neely (1995) komitmen organisasi mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem informasi keuangan antara lain melalui: (1) Penetapan tujuan dan penilaian objektif perusahaan dalam penerapan sistem informasi keuangan; (2) Evaluasi proposal proyek sistem informasi keuangan yang objektif; (3) Pendefinisian informasi dan proses yang dibutuhkan; dan (4) Review program dan rencana untuk pengembangan sistem informasi keuangan. Penelitian Lee and Kim (1992) dan Saunders, & Jones (1992) mengatakan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem informasi keuangan melalui upaya formalisasi pengembangan sistem informasi keuangan di perusahaan. Dengan formalisasi pengembangan sistem informasi keuangan kelemahan dalam pengalaman dan pembelajaran personal pengguna menjadi dapat diatasi.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap sistem informasi keuangan. Penelitian ini membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap sistem informasi keuangan telah sesuai dengan teori keagenan, dimana perusahaan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan managerial pengaruh komitmen organisasi terhadap sistem informasi keuangan baik secara parsial maupun simultan. Keberhasilan sistem informasi keuangan dapat dicapai dengan optimalisasi dengan meningkatkan komitmen organisasi. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap sistem informasi keuangan secara simultan berdampak positif diduga karena: (1) Sangat kompleksnya faktor yang mempengaruhi informasi Keuangan (ROE); dan (2) informasi keuangan sebagai alat bantu untuk menghasilkan informasi keuangan melalui faktor-faktor lain seperti proses pengambilan keputusan, kualitas keputusan, dinamisasi individu dalam organisasi, efisiensi dan efektivitas, dan lain-lain. Sistem Informasi keuangan perusahaan adalah tingkat prestasi atau keberhasilan keuangan yang dicapai oleh suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Tingkat prestasi atau keberhasilan keuangan biasanya dikaitkan dengan tingkat laba yang diperoleh oleh perusahaan. sistem Informasi keuangan datanya bersumber dari laporan keuangan, karena menyajikan data masa lalu dan tidak berorientasi ke depan sehingga dianggap kurang relevan dengan keadaan saat ini.

Atas dasar pemikiran ini maka lahirlah konsep pengukuran kinerja non tradisional, yang dikenal dengan pengukuran kinerja menggunakan ukuran keuangan sebagaimana halnya dalam sistem pengukuran kinerja tradisional, pengukuran kinerja *balanced scorecard* juga menggunakan perspektif non keuangan, seperti: perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis intern, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Informasi keuangan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Ukuran kinerja keuangan yang dipakai adalah profitabilitas, yang diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Adapun alasan menggunakan ukuran kinerja profitabilitas adalah: (1) Profitabilitas merupakan ukuran kinerja keuangan penting dan sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan secara keseluruhan dan dapat mengukur tingkat efisiensi dalam pengelolaan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan tergantung pada tingkat keuntungan yang diperoleh dan penerimaan dividen dimasa yang akan datang.

PUSTAKA ACUAN

- Burton, F. G., Chen, Y., Grover, V., and Steward, K.A. 1992. An Application of Expectancy Theory for Assessing User Motivation to Utilize an Expert System. *Journal of Management Information System*. 9 (3): 183-198.
- Cerullo, M.J. 1997. Information Systems Success Factors. *Journal of Systems Management*. 31(12): 10-19.
- Cho, D.Y., and Kwon, D. 2005. Self-Directing Learning Readiness as an Antecedent of Organizational Commitmen: a Korean Study. *International Journal of Training and Development*. 9(2): 140-152.
- Choe, J.M. 1996. The Relationship Among Performance of Accounting Information System, Influence Factors, and Evolution Level of Information System. *Journal of Management Information System*. 12(4): 215-239.
- Clercq, D.D., and Dimov, D. 2008. Internal Knowlwdge Development and External Knowledge Access in Venture Capital Investment Performance. *Journal of Management Studies*. 45(3): 585-612.
- Chen, Z.X., Tsui, A.S., and Farh, J.L. 2002. Loyalty to Supervisors vs. Organizational Commitment: Relationships to Employee performance in China. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*. 75: 339-356.
- Clercq, D.D., and Rius, I.B. 2007. Organizational Commitment in Mexican Small and Medium-Sized Firms: The Role of Work Status, Organizational Climate, and Entrepreneurial Orientation. *Journal of Small Business Management*. 10(2): 185-210.
- Gelinas, J.U., Allan, O.E., and William, W.P. 1993. *Accounting Information System*. Second Edition, Cincinnati, Ohio: South-Western Publishing Co.
- Essex, P.A., Magal, S.R. and Mateller, D.E. 1998. Determinan of Information Center Success. *Journal of Management Information System*. 15(2): 95-117.
- Etty Murwaningsari. 2008. The Role of Organizational Commitment and Procedural Justice in Moderating the Relationship Between Budgetary Participation and Managerial Performance. *Gadjah Mada International Journal of Business*. 10(2): 185-210.

- Faisal Basri. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Gibson, C.H. 1992. *Financial Statement Analysis Using Financial Accounting Information*. Fifth Edition. USA: South-Western Publishing Company.
- Gibson, J.L., Inancevich, J.M., and Donnelly, J.M. 1994. *Organization Behavior: Structure and Process*. Seventh Edition, Boston: Homewood, Richard D. Irwin.
- Haar, J.M., and Spell, C.S. 2004. Programme Knowledge and Value of Work-Family Practices and Organizational Commitment. *The International Journal of Human Resource Management*. 15(6): 1040-1055
- Hair, F., Joseph, R.E., Anderson, Ronald, L.T., and William C.B. 2014. *Multivariate Data Analysis*. 9th Edition. Prentice Hall International Inc.
- Hertati.L. 2015. Total Quality Management As Technics on Strategic Management Accounting. *International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research* Vol. 02, Issue 11, pp.0942-0949, November, 2015
- Hertati, L.2015. Internal Control And Ethics Of Quality Management Accounting Information Systems And Implications On The Quality Of Accounting Information Management: Proposing A Research Framework. *International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom* Vol. III, Issue 6, June 2015 Licensed under Creative Common Page 902 <http://ijecm.co.uk/> ISSN 2348 0386
- Hertati.L. 2016. Just In Time, Value Chain, Total Quality Management, Part Of Technical Strategic Management Accounting. *International Journal of Scientific & Technology Research* Volume 5, Issue 04, April 2016 Issn 2277-8616
- Hertati, and Sumantri 2016. Just In Time, Value Chain, Total Quality Management, Part Of Technical Strategic Management Accounting. *International Journal Of Scientific & Technology Research* Volume 5, Issue 04, April 2016 Issn 2277-8616.
- Hertati.L. et, all 2019. The Effect of Human Resource Ethics on Financial Reporting Implications for Good Government Governance (Survey of Related Sub-units in State-owned Enterprises in SUMSEL). *International Journal of Economics and Financial Issues* ISSN: 2146-4138 available at <http://www.econjournals.com> *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2019, 9(4), 267-276
- Imam Ghozali, dan Fuad. 2005. *Struktural Equation Modeling, Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Program Lisrel 8.54*. Semarang: Penerbit Undip
- Kaplan, R.S., and Norton, D.P. 1996. *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.
- Kaye, G.R. 1990. Information System Successes and Failures: Research Finding from the Compunding Industry. *Jurnal of Information Technology*. 5: 73-83.
- Larsen, K.R.T. 2003. A Taxonomy of Antecedents of Information Systems Implementation: Variable Analysis Studies. *Journal of Management Information Systems*. 20(2): 169-246.
- Lee, J.J., and Kim, S.H. 1992. The Relationship Between Procedural Formalization in MIS Development and MIS Success. *Information and Management*, 22(2): 89-111.
- Livari, J. 2005. An Empirical Test of The Delone-McLean Model of Information System

- Success. *Database for Advance in Information System (DFA)*. ISSN: 1532-0936. Volume 36. ProQuest Company.
- Mcshane, Steven L., and Von Glinow, M.A. 2000. *Organizational Behavior*. USA: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Mowday, R.T., Porter, L.W., and Steers, R.M. 1982. *Employee-Organization Linkages*. New York: Academic Press.
- Neely, A., Gregory, M.J., and Platts, K.W. 1995. Performance Measurement System Design – A Literature Review and Research Agenda. *International Journal of Operation and Production Management*. 14(3): 140-152.
- Rayner, R.K., and Watson, H.J. 1995. The Keys to Executive Information System Success. *Journal of Management Information System*. 12(2): 83-98.
- Romney, B.M., and Steinbart, J.P. 2009. *Accounting Information System*. Eleventh Edition. USA: Pearson Prentice Hall.
- Saunders, C.S., and Jones, J.W. 1992. Measuring Performance of the Information Systems Function. *Journal of Management Information System*. 8(4): 63-82.
- Sabherwal, R., Jeyaraj, A., and Chowa C. 2006. Information System Success: Individual and Organizational Determinants. *Management Science*. 52(12): 1849-1864
- Shirani, et.al. 1994. A Model of User Information Satisfaction. *Data Base*. 25(4): 17–23.
- Susanto,A.2014. Sistem informasi Akuntansi: Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan. Edisi Perdana. Bandung: Lingga Jaya.
- Sofyan Djalil. 2008. Peranan BUMN Untuk Menggerakkan Sektor Riil Dalam Situasi Krisis Global. Melalui <<http://www.bumn.go.id>> [22/09/09].
- Straub, et.al. 1995. Measuring System Usage: Implications for IS Theory Testing. *Management Science*, 41(8): 1328–1342.
- Thong, J.Y.T., and Yap, C. 1996. Information Systems Effectiveness: A User Satisfaction Approach. *Information Processing & Management*. 32(5): 601–610
- Torkzadeh G., and Doll, W.J. 1998. The Test-Retest Reliability of User Involvement Instruments. *Information and Management*. 26(1): 21-31.
- Mulyani.S 2010. Menkeu Kritik Laporan Keuangan BUMN. Melalui <<http://www.republika.co.id>> [10/07/10].
- Yuksel, H. 2004. An Empirical Evaluation of Problem in Performance Measurement System of Big Sized Firms in Turkey. *Working paper. Second World Conference on POM and 15th Annual POM Conference*. Caucun Mexico April 30-May 3.
- Zhang, M.J. 2005. Information Systems, Strategic Flexibility and Firm Performance: An Empirical Investigation. *Journal of Engineering and Technology Management*. 22: 163-184.
- Zhang. 2007a. Information Systems (IS) Connectivity as a Moderator of the Effects of IS Support for Information Interpretation on Firm Performance: An Empirical Study. *International Journal of Management*. 24(2): 263-275.
- Zhang. 2007b. Assessing the Performance Impact of Information System from the Resource-Based Perspective: An Emperical Test of the Indirect Effect of IS. *Journal of Business Strategies*, 24(2): 141-164.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH BERKALA ILMIAH AKUNTABILITAS

1. Tulisan merupakan karya orisinal penulis (bukan plagiasi) dan belum pernah dipublikasikan atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah berupa artikel hasil penelitian;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia dan Inggris;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam bidang ilmu akuntansi;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dan email;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris antara 100- 150 kata;
 - d. Sistematika penulisan
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi kelembagaan penulis, dan *e-mail*;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, antara 100-150 kata. Abstrak berisi mengenai selintas tentang latar belakang studi, tujuan penelitian, metode, hasil umum yang didapat, dan implikasi hasil;
 - 4) Kata kunci, antara 2-5 konsep;
 - 5) Pendahuluan: berisi latar belakang mengenai topik yang akan diangkat. Sehingga, pendahuluan harus secara jelas menunjukkan apa yang menjadi kesenjangan penelitian (*research gap*), kebaruan (*novelty*), dan tujuan penelitian;
 - 6) Metode. Pada bagian ini membahas mengenai data dan teknik analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian ini;
 - 7) Hasil dan Pembahasan. Bagian ini menampilkan hasil empiris dari penelitian, serta analisis yang ditunjang oleh perbandingan antara temuan penelitian dengan studi-studi terdahulu;
 - 8) Simpulan. Bagian ini menjelaskan apakan tujuan penelitian sudah terjawab dengan baik atau belum, serta implikasi kebijakan yang ditawarkan;
 - 9) Pustaka acuan. Pustaka acuan menunjukkan literatur yang dipergunakan dalam penelitian ini. Pustaka acuan menggunakan APA style 6th edition. Penulis dianjurkan menggunakan referensi manajemen seperti Mendeley dan Zotero dalam pengutipan dan pustaka acuan.
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah ukuran A4, margin: atas 3 cm, bawah 3 cm, kiri 3 cm, dan kanan 3 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 15 s.d. 20 halaman, spasi 1, huruf Cambria, ukuran 12;

- g. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh:
 - Al Arif, M. N. R. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia
 - Al Arif, M.N.R & E. Amalia. (2010). *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
 - Amalia, E, dkk. (2012). *Potret Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramata
 - 2) Jurnal, contoh:
 - Al Arif, M. N. R. (2014). Tipe Pemisahan dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Aset Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan. *Kinerja*, 18(2), 168-179.
 - Al Arif, M.N.R. & T. Nurashah. (2015). Customer Relationship Management dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah Bank: Studi Pada Bank Muamalat Indonesia. *ESENSI: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(1), 51-64
- h. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
- i. Penggunaan bahasa Indonesia. Para penulis harus merujuk kepada ketentuan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan EYD, antara lain:
- 1) Penulisan huruf kapital
 - a) Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat;
 - b) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung;
 - c) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan nama kitab suci, termasuk ganti untuk Tuhan;
 - d) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang;
 - e) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat;
 - f) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang;
 - g) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa-bangsa dan bahasa. Perlu diingat, posisi tengah kalimat, yang dituliskan dengan huruf kapital hanya huruf pertama *nama bangsa, nama suku, dan nama bahasa*; sedangkan huruf pertama kata *bangsa, suku, dan bahasa* ditulis dengan huruf kecil;
 - h) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah;
 - i) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama khas dalam geografi;
 - j) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, nama resmi badan/lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan, serta nama dokumen resmi;
 - k) Huruf kapital dipakai sebagai huruf kapital setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan/lembaga;
 - l) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua unsur kata ulang sempurna) dalam penulisan nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, *kecuali* kata seperti *di, ke, dari, dan, dalam, yang, untuk* yang tidak terletak pada posisi awal;
 - m) Huruf kapital *tidak* dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam penyapaan;
 - n) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan;
 - o) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti *Anda*.

- 2) Penulisan tanda baca titik (.)
 - a) Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf pengkodean suatu judul bab dan subbab;
 - b) Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu dan jangka waktu;
 - c) Tanda titik *tidak* dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah;
 - d) Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka;
 - e) Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya;
 - f) Tanda titik *tidak* dipakai pada akhir judul, misalnya judul buku, karangan lain, kepala ilustrasi, atau tabel;
 - g) Tanda titik *tidak* dipakai di belakang (1) alamat pengirim atau tanggal surat atau (2) nama dan alamat penerima surat.
- 3) Penulisan tanda koma (,)
 - a) Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan;
 - b) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti *tetapi* atau *melainkan*;
 - c) Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya;
 - d) Tanda koma harus dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat, seperti *oleh karena itu*, *jadi*, *lagi pula*, *meskipun begitu*, *akan tetapi*;
 - e) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti *o*, *ya*, *wah*, *aduh*, *kasihan* dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat;
 - f) Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat;
 - g) Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki;
 - h) Tanda koma dipakai di antara orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga;
 - i) Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi;
 - j) Tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat;
 - k) Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru.
- 4) Tanda titik koma (;)
 - a) Tanda titik koma untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara;
 - b) Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk;
 - c) Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam kalimat kompleks yang tidak cukup dipisahkan dengan tanda koma demi memperjelas arti kalimat secara keseluruhan.
- 5) Penulisan huruf miring
 - a) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan;
 - b) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata;
 - c) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata ilmiah atau ungkapan asing, *kecuali* yang sudah disesuaikan ejaannya.

- 6) Penulisan kata dasar
Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan.
 - 7) Penulisan kata turunan
 - a) Imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) ditulis serangkai dengan kata dasarnya;
 - b) Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan, atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya;
 - c) Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai.
 - 8) Bentuk ulang
Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung.
 - 9) Gabungan Kata
 - a) Gabungan kata yang lazim disebutkan kata majemuk, termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah;
 - b) Gabungan kata, termasuk istilah khusus, yang mungkin menimbulkan salah pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian unsur yang berkaitan;
 - c) Gabungan kata berikut ditulis serangkai karena hubungannya sudah sangat padu sehingga tidak dirasakan lagi sebagai dua kata;
 - d) Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai.
 - 10) Kata ganti *ku, kau, mu, dan nya*
Kata ganti *ku* dan *kau* sebagai bentuk singkat kata *aku* dan *engkau*, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya.
 - 11) Kata depan *di, ke, dan dari*
Kata depan *di, ke, dan dari* ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, *kecuali* di dalam gabungan kata yang sudah dianggap kata yang sudah dianggap sebagai satu kata seperti *kepada* dan *daripada*.
 - 12) Kata sandang *si* dan *sang*
Kata *si* dan *sang* ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.
 - 13) Penulisan partikel
 - a) Partikel *-lah* dan *-kah* ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya;
 - b) Partikel *pun* ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya;
 - c) Partikel *per* yang berarti (demi), dan (tiap) ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya.
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
 7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya enam bulan sebelum waktu penerbitan. Artikel dikirimkan melalui online submission: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas/user/register>.